

# Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah



Akhmadi

Asri Yusrina

Athia Yumna



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



Toward Pro-poor Policy through Research

**LAPORAN PENELITIAN SMERU**

**Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh  
Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan,  
Jawa Tengah**

Akhmadi

Asri Yusrina

Athia Yumna

**Editor**

Valentina Yulita Dyah Utari

**The SMERU Research Institute**

**Juni 2016**

# TIM PENELITIAN

## **Koordinator Penelitian:**

Akhmadi

## **Peneliti:**

Asri Yusrina

Athia Yumna

## **Tim Pelatih dan Supervisor Pendataan:**

### *SMERU:*

Athia Yumna

Asri Yusrina

Sulton Mawardi

Hastuti

Eduwin Pakpahan

Palmira P. Bachtiar

Akhmadi

### *PATTIRO:*

Aminudin Azis

Sugiyarto

Setyawan Dwi H.

### *Universitas Pekalongan:*

Siti Nurhayati

Choliq Sabana

Mahirun

Andi Suhermanto

Yarianto

Foto Sampul: Hastuti

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan dan pelaksanaan pendataan dengan menggunakan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan ini dapat diselesaikan berkat kerja sama berbagai pihak. Secara khusus kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Walikota Pekalongan, Mohamad Basyir Ahmad beserta jajarannya dan Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Chaeruddien Mustahal, beserta stafnya Agus Jati Waluyo, Sri Budi Santoso, Kaelani, Undani, dan Muchamad Rizal. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Kota Pekalongan, para camat dan lurah di wilayah studi, dan anggota tim pengelola kegiatan SPKOM.

Kami pun berterima kasih atas peran serta Sudjaka Martana dan PATTIRO yang berkedudukan di Jakarta dan Pekalongan, khususnya kepada Dini Mentari, Chitra Hariyadi, Aminudin Azis, Sugiyarto, Setyawan Dwi H. Selain itu, kami sangat menghargai kontribusi civitas academica Universitas Pekalongan—khususnya Siti Nurhayati, Choliq Sabana, Mahirun, Andi Suhermanto, dan Yariato—dan Heru Sayoko beserta staf CV Waditra atas kerja keras mereka dalam pendataan ini.

Laporan yang diterbitkan pada Juni 2016 ini mencakup revisi bahasa dan format dari draf yang telah diunggah ke situs web SMERU pada 2011. Selain itu, versi revisi ini dilengkapi dengan rangkuman eksekutif. Terima kasih kepada editor dan staf publikasi SMERU yang berkontribusi pada proses revisi ini.

## Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Akhmadi, Asri Yusrina, dan Athia Yumna

Dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan, pemerintah memerlukan data akurat dan terkini. Pemerintahan daerah, khususnya pada tingkat kabupaten, telah mulai mengambil peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah mereka sejak pemerintah pusat memberlakukan aturan otonomi daerah. Temuan-temuan yang didapat dari proyek pilot Community-Based Monitoring System (CBMS) atau Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Indonesia menunjukkan bahwa sistem tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan enumerasi wilayah secara akurat berdasarkan kategori kesejahteraan keluarga. Selain itu, sistem ini juga bisa memprediksi enumerasi kesejahteraan keluarga dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat lokal mengenai status kesejahteraan keluarga, terutama keluarga miskin.

Temuan-temuan tersebut dipresentasikan kepada segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan, dan pemerintah lokal tertarik menggunakan sistem pengumpulan data ini di kota mereka; Pekalongan menjadi yang pertama dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang secara resmi menggunakan SPKOM. Disebabkan ukuran wilayah Indonesia dan kebijakan desentralisasi yang memberi kekuasaan lebih kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program pengentasan kemiskinan, kami percaya bahwa sistem pemantauan ini sangat cocok diterapkan di Indonesia.

Tujuan pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan adalah untuk mendapatkan data komprehensif yang bisa diakses, digunakan, dan dianalisis oleh badan-badan pemerintah lokal dan lembaga-lembaga lain di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Selain itu, hasil pengumpulan data ini bisa digunakan sebagai rekomendasi kepada Pemkot Pekalongan, terutama ketika mereka tengah menyusun rencana pembangunan dan anggaran.

Kata kunci: keluarga, kesejahteraan, Pekalongan, peringkat, SPKOM

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vi
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Profil Kota Pekalongan	2
1.3 Profil Kemiskinan di Kota Pekalongan	3
1.4 Tujuan Pengumpulan Data SPKOM	4
II. LOKAKARYA DENGAR PENDAPAT DAN MODUL SPKOM	5
2.1 Lokakarya Dengar Pendapat Awal	5
2.2 Lokakarya Dengar Pendapat Lanjutan	5
2.3 Pengesahan Nota Kesepahaman Pengumpulan Data SPKOM	6
2.4 Panduan Penggunaan Kuesioner	7
2.5 Kuesioner Keluarga	7
III. METODOLOGI DAN PEMROSESAN DATA	9
3.1 Metode Pengumpulan Data	9
3.2 Proses Pengumpulan Data	9
3.3 Proses Entri Data	10
3.4 Proses Pembersihan Data	10
3.5 Pengembangan Diri	11
IV. MDG DAN HASIL PCA	13
4.1 Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) di Kota Pekalongan	13
4.2 Analisis Deskriptif: Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan	18
4.3 Analisis Deskriptif: Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara	28
4.4 Hasil PCA	36
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Rekomendasi	53
DAFTAR ACUAN	55
LAMPIRAN	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Profil Kecamatan Pekalongan Selatan, Timur, Utara, dan Barat, 2007	2
Tabel 2.	Indikator Kemiskinan Kota Pekalongan, 2002–2008	3
Tabel 3.	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Usia SD dan SLTP (%)	15
Tabel 4.	Tingkat Melek Huruf Kelompok Usia 15–24 Tahun (%)	15
Tabel 5.	Rasio Anak Perempuan dan Laki-laki di Pendidikan Dasar (%)	16
Tabel 6.	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15–24 Tahun (%)	16
Tabel 7.	Persentase Anak yang Diimunisasi Campak	17
Tabel 8.	Persentase Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	18
Tabel 9.	Proporsi Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun yang Menggunakan Alat Kontrasepsi	18
Tabel 10.	Karakteristik Keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan, 2008	19
Tabel 11.	Usia dan Status Perkawinan Kepala Keluarga, 2008 (%)	19
Tabel 12.	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Keluarga, 2008 (%)	20
Tabel 13.	Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga, 2008 (%)	22
Tabel 14.	Pola Konsumsi Makanan, 2008 (%)	22
Tabel 15.	Kepemilikan Rumah, 2008 (%)	24
Tabel 16.	Material Lantai Terluas, 2008 (%)	24
Tabel 17.	Keluarga Pengguna Fasilitas WC, 2008 (%)	25
Tabel 18.	Sumber Air Minum, 2008 (%)	25
Tabel 19.	Sumber Penerangan Utama, 2008 (%)	26
Tabel 20.	Bahan Bakar untuk Memasak, 2008 (%)	26
Tabel 21.	Material Jalan, 2008 (%)	26
Tabel 22.	Metode Pembuangan Sampah, 2008 (%)	27
Tabel 23.	Akses ke Lembaga Keuangan, 2008 (%)	28
Tabel 24.	Sumber Keuangan Utama untuk Mengakses Fasilitas Kesehatan, 2008 (%)	28
Tabel 25.	Karakteristik Keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara, 2009	29
Tabel 26.	Usia dan Status Perkawinan Kepala Keluarga, 2009 (%)	29
Tabel 27.	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Keluarga, 2009 (%)	30
Tabel 28.	Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga, 2009 (%)	30
Tabel 29.	Pola Konsumsi Makanan, 2009 (%)	31
Tabel 30.	Status Kepemilikan Rumah, 2009 (%)	32
Tabel 31.	Material Lantai Terluas, 2009 (%)	32
Tabel 32.	Keluarga Pengguna Fasilitas WC, 2009 (%)	32
Tabel 33.	Sumber Air Minum, 2009 (%)	33
Tabel 34.	Sumber Penerangan Utama, 2009 (%)	33

Tabel 35. Bahan Bakar untuk Memasak, 2009 (%)	34
Tabel 36. Material Jalan, 2009 (%)	34
Tabel 37. Metode Pembuangan Sampah, 2009 (%)	34
Tabel 38. Akses ke Lembaga Keuangan, 2009 (%)	35
Tabel 39. Sumber Keuangan Utama untuk Mengakses Fasilitas Kesehatan, 2009 (%)	36
Tabel 40. Tujuh belas Indikator Kesejahteraan dengan Peringkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Timur	37
Tabel 41. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Timur	38
Tabel 42. Tujuh Belas Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Selatan	41
Tabel 43. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Selatan	42
Tabel 44. Tujuh Belas Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Barat	45
Tabel 45. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Barat	45
Tabel 46. Tujuh Belas Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Utara	48
Tabel 47. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Utara	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bappeda No. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM)/CBMS	57
Lampiran 2 Petunjuk Pengisian, Istilah, dan Pengertian dalam Kuesioner	62
Lampiran 3 Kuesioner Keluarga	67

# DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Askeskin	Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
APM	angka partisipasi murni
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bapermas	Badan Pemberdayaan Masyarakat
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLT	bantuan langsung tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
FGD	<i>focus group discussion</i> diskusi kelompok terfokus
KK	kartu keluarga
Jamkesmas	jaminan kesehatan masyarakat
JPKM	jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i> Tujuan Pembangunan Milenium
MoU	<i>memorandum of understanding</i> nota kesepahaman
NER	<i>net enrollment ratio</i> angka partisipasi murni
PATTIRO	Pusat Telaah dan Informasi Regional
PCA	<i>principal components analysis</i> analisis komponen utama
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Pemkot	pemerintah kota
Raskin	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
Repelita	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	rukun tetangga
RW	rukun warga
SKPD	satuan kerja perangkat daerah
SPKOM	Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat
Unikal	Universitas Pekalongan

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

## Pendahuluan

Sejak diluncurkannya otonomi daerah yang menitikberatkan otonomi di tingkat kabupaten/kota, maka kabupaten/kota memiliki peran yang strategis untuk merumuskan kebijakan berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah kabupaten/kota harus dapat merumuskan kebijakan dan merencanakan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota sangat memerlukan data yang akurat dan terkini guna merumuskan kebijakan dan merencanakan pembangunan di wilayahnya.

Lembaga Penelitian SMERU memperkenalkan system pendataan yang berbasis masyarakat, yaitu Community-Based Monitoring System atau Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) pada 2005. Sistem ini telah diujicobakan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Sistem pendataan ini bersifat sederhana dengan memanfaatkan daftar pertanyaan yang mudah dicerna oleh masyarakat lokal. Data yang diperoleh ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan Principal Component Analysis (PCA) atau Analisis Komponen Dasar.

Hasil uji coba SPKOM di empat desa yang ada di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak menunjukkan hasil yang akurat pada tingkat dusun atau RW berdasarkan kategori kesejahteraan keluarga. Bahkan hasil perhitungan menggunakan PCA tersebut memiliki kemiripan dengan pendapatan masyarakat setempat yang dilakukan dengan metode *focused group discussion* (FGD). Temuan-temuan uji coba tersebut dipresentasikan di hadapan pemangku kepentingan di Kota Pekalongan, dan Pemerintah Kota Pekalongan tertarik untuk menerapkan dan sekaligus menjadi pemerintah kabupaten/kota pertama di Indonesia yang menerapkan SPKOM ini.

## Profil Kota Pekalongan

Kota Pekalongan terletak 384 km dari ibukota Jakarta dan 101 km dari Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Pekalongan dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kecamatan Pekalongan Barat. Jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 86.994 jiwa, disusul berturut-turut Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Selatan masing-masing sebanyak 71.753 jiwa, 63.045 jiwa, dan 50.196 jiwa pada 2007. Penduduk Kecamatan Pekalongan Utara umumnya bekerja di pabrik garmen, pabrik batik, industri rumah tangga pembuatan batik, atau nelayan karena wilayah kecamatan ini merupakan wilayah pantai.

Dilihat dari sisi kemiskinan, secara umum tingkat kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah daripada tingkat kemiskinan nasional, yaitu 9,90% pada 2002 turun menjadi 7,64% (2003), 6,62% (2007). Namun, jika dilihat dari rasio kesenjangan kemiskinan, Kota pekalongan cukup fluktuatif. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Pekalongan juga menunjukkan angka yang fluktuatif.

## Hasil SPKOM

Hasil analisis terhadap data SPKOM digunakan untuk mengetahui empat dari delapan pencapaian Millenium Development Goals, yaitu:

1. **Sasaran 2: Mencapai Pendidikan Dasar Universal**  
Angka Partisipasi Murni (APM) di empat kecamatan telah mencapai lebih dari 95% untuk anak usia sekolah dasar dan 80% untuk anak usia sekolah menengah pertama. APM SD di Kota Pekalongan merata dan hamper sama di semua kecamatan. APM SD di Kecamatan Pekalongan Timur mencapai 96,05%, Kecamatan Pekalongan Selatan 96,04%, Kecamatan Pekalongan Barat 95,90%, dan Kecamatan Pekalongan Utara 95,64%. Namun demikian, APM SLTP di keempat kecamatan cukup bervariasi dan terdapat perbedaan hingga empat titik persen. APM SLTP di Kecamatan Pekalongan Timur mencapai 82,54%, Kecamatan Pekalongan Barat 81,67%, Kecamatan Pekalongan Selatan 80,24%, dan di Kecamatan Pekalongan Utara 78,53%.
2. **Sasaran 3: Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan**  
Tiga dari empat kecamatan mencapai lebih dari 100% pada indeks paritas melek huruf berdasarkan gender. Hanya Kecamatan Pekalongan Barat yang memiliki rasio sedikit di bawah 100%. Oleh karenanya, dari ketiga indikator di atas, kesetaraan gender dalam hal pendidikan dan melek huruf di Pekalongan sudah tercapai berdasarkan sasaran MDG, yang lebih baik dibandingkan pada tingkat nasional.
3. **Sasaran 4: Mengurangi angka kematian anak**  
Untuk persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak, angka di Pekalongan tidak begitu baik. Angka tertinggi untuk indikator ini adalah 26,58% di Kecamatan Pekalongan Timur yang diikuti dengan 25,17% di Kecamatan Pekalongan Utara, 22,84% di Kecamatan Pekalongan Selatan, dan 22,08% di Kecamatan Pekalongan Barat. Persentase anak usia 12–23 bulan yang diimunisasi campak menunjukkan angka yang lumayan baik. Semua kecamatan mencapai lebih dari 50%. Kecamatan Pekalongan Timur bahkan telah mencapai lebih dari 75%. Di Kecamatan Pekalongan Barat, Utara, dan Selatan, masing-masing angkanya adalah 69,54%, 67,32%, and 59,31%.
4. **Sasaran 5: Meningkatkan kesehatan ibu.**  
Berdasarkan data SPKOM, data yang dicari adalah mengenai proporsi kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional yang terlatih. Persentase kelahiran terakhir yang ditolong tersebut menunjukkan angka yang luar biasa bagus di empat kecamatan (Kecamatan Pekalongan Timur, Selatan, Barat, dan Utara), yakni 93,78%, 86,59%, 94,49%, dan 89,72%.

Selain untuk mengetahui keempat indikator MDG's di atas, analisis deskriptif juga dilakukan terhadap data SPKOM yang mencakup kondisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pola konsumsi, penggunaan listrik, air bersih, keamanan, dan sebagainya. Dari hasil analisis yang menggunakan PCA diperoleh sepuluh indikator kesejahteraan berperingkat tertinggi di keempat kecamatan dengan variabel yang sebagian besar sama di keempat kecamatan. Variabel-variabel tersebut adalah kepala keluarga bekerja di sektor industri, kepemilikan lemari es, kompor gas, komputer, sepeda motor, dan telepon genggam, Namun, terdapat variabel yang membedakan untuk mengukur kesejahteraan. Di Kecamatan Pekalongan Selatan, kepemilikan mobil menjadi salah satu variabel penentu kesejahteraan, sementara di kecamatan lain tidak.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan, pemerintah memerlukan data akurat dan terkini. Pemerintah daerah (pemda), terutama pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot), telah mulai mengambil peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah mereka sejak Pemerintah Pusat memberlakukan aturan otonomi daerah. Berdasarkan aturan tersebut, pemda memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan kerja pemerintahan. Mereka tidak boleh hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemda mempunyai wewenang untuk merancang rencana kebijakan dan anggaran serta melaksanakan kebijakan yang telah disusun, terutama yang berkaitan dengan pembangunan, ketenteraman masyarakat, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penyelesaian masalah-masalah sosial, ketenagakerjaan, administrasi sipil, dan lain-lain. Semenjak diberlakukannya aturan tersebut, pemda telah berhasil mencapai kemajuan pesat di sektor pelayanan publik seperti akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, mereka masih menghadapi beberapa kendala, terutama yang berhubungan dengan sistem perencanaan dan penyusunan anggaran seperti proses penentuan target beberapa program dan proyek. Data merupakan elemen yang sangat vital—bagi pemda pada khususnya dan bagi pihak swasta atau institusi lain pada umumnya—dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran sebuah program atau proyek.

Pada 2005, Lembaga Penelitian SMERU memperkenalkan suatu sistem pengumpulan data yang disebut Community-Based Monitoring System (CBMS) atau Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) yang telah diujicobakan di empat desa di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Sistem ini memanfaatkan daftar pertanyaan yang mudah dipahami dan melibatkan anggota masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan *principal components analysis* (PCA) atau Analisis Komponen Utama, yakni suatu metode statistik yang menurunkan tingkat multidimensionalitas satu set data tetapi pada saat yang bersamaan juga mempertahankan sebanyak mungkin variasi di dalamnya.

Hasil uji coba SPKOM di keempat desa tersebut menunjukkan bahwa sistem ini bisa digunakan untuk menghasilkan enumerasi wilayah secara akurat—pada tingkat dusun atau RW—berdasarkan kategori kesejahteraan keluarga. Selain itu, SPKOM juga bisa memprediksi enumerasi kesejahteraan keluarga dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat lokal mengenai status kesejahteraan keluarga, terutama keluarga miskin. Temuan-temuan tadi dipresentasikan kepada segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan. Pemerintah lokal tertarik menggunakan sistem pengumpulan data ini di kota mereka; Pekalongan menjadi yang pertama dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang secara resmi menggunakan SPKOM.

Persiapan pelaksanaan pengumpulan data kesejahteraan keluarga dengan menggunakan SPKOM telah dilakukan sejak 2007. Tidak seperti uji coba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, pengumpulan data di Kota Pekalongan dengan menggunakan SPKOM—seperti yang diinginkan pemerintah lokal—dilakukan secara komprehensif, dalam arti bahwa data yang dihasilkan bisa diakses, digunakan, dan dianalisis oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan institusi lain yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Pengumpulan data ini diharapkan bisa menghemat waktu dan biaya untuk proses pengumpulan data yang dilakukan secara terpisah oleh setiap kantor dinas di bawah administrasi Pemkot Pekalongan.

Laporan ini berisikan hasil analisis data yang dikumpulkan di Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Timur pada 2008 dan di Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat pada 2009.

## 1.2 Profil Kota Pekalongan

Kota Pekalongan terletak 384 km dari Ibukota Jakarta dan 101 km dari Kota Semarang (Ibukota Provinsi Jawa Tengah), dan secara administratif dibagi menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kecamatan Pekalongan Barat.

Kecamatan Pekalongan Selatan menempati wilayah seluas 10,80 km<sup>2</sup> dan dibagi menjadi 11 kelurahan, 64 RW, dan 247 RT; jumlah penduduknya mencapai 50.198 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 4.648 per km<sup>2</sup>. Pada 2007, terdapat 12.592 rumah tangga di kecamatan ini. Dari keseluruhan penduduk, 50,46% adalah perempuan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh pada pabrik garmen atau pabrik batik atau industri rumah tangga pembuatan batik.

Kecamatan Pekalongan Timur menempati wilayah seluas 9,52 km<sup>2</sup> dan dibagi menjadi 13 kelurahan, 79 RW, 378 RT. Jumlah penduduknya mencapai 63.045 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 6.662 per km<sup>2</sup>. Pada 2007, terdapat 15.742 rumah tangga di kecamatan tersebut. Sama seperti Kecamatan Pekalongan Selatan, kecamatan ini dihuni oleh lebih banyak perempuan dengan perbandingan 51,99% dan 48,01%. Beberapa kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur, seperti Kelurahan Jenggot, Kelurahan Buaran, Kelurahan Banyu Ageng, dan Kelurahan Banyu Alit, dikenal sebagai daerah asal TKI yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia. Sebaliknya, di Kelurahan Noyontaan terdapat sejumlah pabrik tekstil dan sebuah pabrik teh yang pekerjanya terdiri atas masyarakat lokal.

**Tabel 1. Profil Kecamatan Pekalongan Selatan, Timur, Utara, dan Barat, 2007**

No.	Item	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Utara	Kecamatan Pekalongan Barat
1	Jumlah kelurahan	11	13	9	13
2	Jumlah RW	64	79	82	90
3	Jumlah RT	247	378	399	442
4	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	10,80	9,52	14,88	10,05
5	Jumlah penduduk	50.198	63.045	71.753	86.994
	- Laki-laki	24.867	30.267	34.942	42.120
	- Perempuan	25.331	32.778	36.811	44.874
6	Tingkat kepadatan penduduk (per km <sup>2</sup> )	4.648	6.622	4.822	8.656
7	Jumlah rumah tangga	12.592	15.742	17.810	21.056

Sumber: BPS Kota Pekalongan dan Bappeda Kota Pekalongan, 2008.

Kecamatan Pekalongan Utara memiliki luas wilayah 14,88 km<sup>2</sup> dan dibagi menjadi 9 kelurahan, 82 RW, dan 399 RT, dengan jumlah penduduk 71.753 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 4.822 per km<sup>2</sup>. Pada 2007, terdapat 17.810 rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Utara. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai karyawan pada pabrik garmen atau pabrik batik, industri rumah

tangga pembuatan batik, atau nelayan. Dari keseluruhan jumlah penduduk, 51,3% adalah perempuan.

Kecamatan Pekalongan Barat menempati wilayah seluas 10,05 km<sup>2</sup>, dan dibagi menjadi 13 kelurahan, 90 RW, dan 442 RT. Jumlah penduduknya mencapai 86.994 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 8.656 per km<sup>2</sup>. Pada 2007, terdapat 21.056 rumah tangga di wilayah tersebut. Sama seperti Kecamatan Pekalongan Utara, terdapat lebih banyak perempuan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan perbandingan 51,58% dan 48,42%.

### 1.3 Profil Kemiskinan di Kota Pekalongan

Bagian ini memaparkan profil kemiskinan di Kota Pekalongan secara keseluruhan, bukan per kecamatan. Sumber data adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Profil kemiskinan per kecamatan yang berdasarkan PCA akan disajikan di Bab IV.

Selama hampir satu dekade, dari 2002 hingga 2007, di Kota Pekalongan terlihat kecenderungan menurunnya jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan. Tabel 2 menunjukkan bahwa angka kemiskinan regional di Kota Pekalongan jauh lebih rendah daripada angka kemiskinan di tingkat nasional. Pada periode tersebut, angka kemiskinan selalu berada di bawah 10%; suatu prestasi yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Pada 2006 terdapat pengecualian karena angka kemiskinan meningkat dari 6,37% pada 2005 menjadi 7,38%; jumlah penduduk miskin bertambah dari 17.500 jiwa pada 2005 menjadi 19.900 jiwa pada 2006. Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dengan tingkat kenaikan rata-rata mencapai 120% pada akhir 2005 menjadi penyebab peningkatan angka kemiskinan tersebut. Kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas, terutama beras yang merupakan komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin.

Pada 2008 terdapat perbedaan yang signifikan pada angka-angka yang menunjukkan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan, dan data garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena BPS menerapkan metodologi baru untuk mengukur kemiskinan pada tahun tersebut sehingga dihasilkanlah angka-angka yang jauh lebih tinggi pada ketiga indikator dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2. Indikator Kemiskinan Kota Pekalongan, 2002–2008**

Tahun	Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (ribuan)	Angka Kemiskinan (%)	Kedalaman Kemiskinan (P1)	Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Angka Kemiskinan Nasional (%)
2002	26,3	9,90	1,30	0,27	95.947	18,19
2003	20,7	7,64	0,81	0,13	108.653	17,42
2005	17,5	6,37	1,27	0,29	136.266	15,97
2006	19,9	7,38	1,25	0,30	144.066	17,75
2007	17,9	6,62	0,87	0,19	151.517	16,58
2008	28,0	10,29	1,03	0,18	223.167	15,40

Sumber: BPS, berbagai tahun penerbitan.

Tabel 2 menunjukkan kedalaman kemiskinan (*depth of poverty*) dengan menggunakan rasio kesenjangan kemiskinan (P1). Rasio kesenjangan kemiskinan digunakan untuk mengukur jarak antara pendapatan rata-rata penduduk miskin dan garis kemiskinan. Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa kesenjangan kemiskinan di Pekalongan cukup fluktuatif. Pada 2007 terdapat perbaikan angka kesenjangan kemiskinan dibandingkan dengan 2006, tetapi pada 2008 kesenjangan kemiskinan meningkat dibandingkan dengan 2007. Hal ini memperlihatkan adanya penurunan total pengeluaran penduduk miskin.

Indikator lain yang digunakan untuk menguji kemiskinan pendapatan dari berbagai sudut adalah indeks keparahan kemiskinan (P2), yang didefinisikan sebagai hasil perkalian disparitas pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indeks tersebut menitikberatkan pada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Perbaikan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan kehidupan penduduk sangat miskin (Bappenas, 2007). Indeks keparahan kemiskinan di Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan yang pada 2002 berada pada angka 0,27 menurun hingga 0,13 pada 2003, lalu meningkat lagi pada periode 2005–2006. Pada 2008, indeks tersebut agak menurun dibandingkan dengan pada 2007.

## 1.4 Tujuan Pengumpulan Data SPKOM

Pengumpulan data atau sensus kesejahteraan keluarga di Kota Pekalongan bertujuan mendapatkan informasi dan/atau data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial dan status kesejahteraan keluarga di kota tersebut. Data yang dikumpulkan mencakup karakteristik kepala keluarga, konsumsi rumah tangga, kondisi rumah dan fasilitasnya, kepemilikan barang atau aset berharga, pinjaman dan tabungan, partisipasi dalam pembangunan dan politik, akses kepada informasi dan program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan profil kondisi sosial, status kesejahteraan, jumlah pengangguran, dan kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, hasil analisis pengumpulan data ini bisa digunakan sebagai rekomendasi kepada Pemkot Pekalongan, terutama ketika membuat perencanaan pembangunan dan menyusun anggaran.

## II. LOKAKARYA DENGAR PENDAPAT DAN MODUL SPKOM

### 2.1 Lokakarya Dengar Pendapat Awal

SMERU melakukan lokakarya dengar pendapat bagi staf Pemkot Pekalongan dengan tujuan memperkenalkan pengumpulan data SPKOM. Berdasarkan hasil uji coba di empat desa di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, SMERU merasa perlu untuk mengumpulkan data tentang kesejahteraan masyarakat di tingkat rumah tangga. SPKOM mencatat kesejahteraan multidimensi rumah tangga atas 63 indikator, dan data yang diperoleh tersebut dapat dipakai oleh dinas-dinas pemerintah kabupaten/kota. Sistem ini memanfaatkan penduduk setempat untuk mencacah rumah tangga sehingga kualitas data yang dihasilkan lebih baik. Indikator-indikator kesejahteraan sangat beragam, bergantung pada karakteristik setempat seperti halnya indikator-indikator yang ditentukan dengan menggunakan metode PCA. Dengan metode SPKOM, data yang diperoleh tidak dapat dimanipulasi karena indikator-indikator kesejahteraan ditentukan setelah semua data diperoleh.

Hasil pengumpulan data dan analisis ini sangat akurat. Kenyataan ini dipertegas melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*–FGD) para pemuka masyarakat setempat, pemuka agama, pengurus administrasi desa, petugas kesehatan, guru, dan anggota masyarakat. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa SPKOM mampu secara akurat mencacah kesejahteraan keluarga di tingkat RW atau dusun di suatu desa. Di samping itu, hasil verifikasi tersebut juga mengindikasikan bahwa SPKOM mampu memperkirakan angka kesejahteraan keluarga dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Angka tersebut juga sangat konsisten dengan pendapat masyarakat setempat tentang kesejahteraan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pendapat masyarakat miskin tentang kesejahteraan keluarga.

Dari pengumpulan data SPKOM, para pembuat rencana dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dapat membuat program atau proyek yang dirancang untuk wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya, dengan anggaran yang terbatas, mereka dapat memilih sektor-sektor yang perlu diutamakan: pendidikan, kesehatan, air bersih, atau infrastruktur lain.

Data yang akurat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan dapat mengurangi risiko manipulasi program pengentasan masyarakat miskin. Untuk mendapatkan data yang akurat, perlu komitmen yang kuat dari staf pemerintah. SPKOM merupakan suatu sistem monitoring dengan metodologi yang berbobot yang mempertimbangkan kondisi daerah saat pencacahan tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan. Oleh karena itu, Pemkot Pekalongan memutuskan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan SPKOM dan menambahkan sejumlah variabel yang diperlukan oleh pemkot.

### 2.2 Lokakarya Dengar Pendapat Lanjutan

Lokakarya dengar pendapat SMERU bagi staf Pemkot Pekalongan, khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ditekankan pada penyusunan variabel-variabel yang diperlukan dalam kuesioner. “Daftar kuesioner dasar” yang dipakai selama uji coba SPKOM disempurnakan dan diperdalam supaya kuesioner-kuesioner tersebut menjadi komprehensif sehingga dapat digunakan oleh semua dinas di kalangan Pemkot Pekalongan. Dalam dengar pendapat ini, semua

dinas dan lembaga vertikal, khususnya dinas pendidikan dan badan pemberdayaan masyarakat (Bapermas), memberikan berbagai masukan yang berharga bagi penyempurnaan daftar pertanyaan SPKOM di Kota Pekalongan.

Upaya penyempurnaan dan pendalaman daftar pertanyaan tersebut mencakup penjelasan hubungan antara anggota keluarga dan kepala keluarga, latar belakang pendidikan anggota keluarga yang dicacah, pendidikan yang dienyam, pekerjaan, apakah ada anggota keluarga yang sudah naik haji, apakah mereka termasuk kalangan lanjut usia (lansia), dan apakah mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental. Selain itu, hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah akses keluarga tersebut ke program-program pemkot, selain program-program Pemerintah Pusat, seperti penyemenan rumah, penyediaan kakus dan sumur, perbaikan rumah, dan program-program lainnya. Namun, program-program semacam ini merupakan hal yang khas di masing-masing wilayah.

Bahan pertimbangan berikutnya adalah berbagai reaksi yang muncul dari keluarga yang menjadi responden atas masalah ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, turun-naiknya pendapatan mereka selama enam bulan, jenis pekerjaan yang mereka lakukan, sumber pendapatan tambahan, apakah mereka memiliki usaha keluarga yang termasuk industri rumahan, industri kecil/menengah/besar, atau industri jasa.

## 2.3 Pengesahan Nota Kesepahaman Pengumpulan Data SPKOM

Lokakarya dengar pendapat yang ketiga diadakan secara lebih formal sebelum dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*–MoU) antara walikota Kota Pekalongan dan direktur eksekutif Lembaga Penelitian SMERU. Setelah itu, pada 17 Juli 2008, diadakan pertemuan teknis mengenai rencana pengumpulan data SPKOM, yang dihadiri oleh 32 peserta yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan seperti kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, kepala dan staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), kalangan akademis dari Universitas Pekalongan, staf pemerintah daerah (staf Bapermas, camat, forum lurah), dan aktivis PATTIRO. Dalam forum diskusi ini, para pemangku kepentingan menyepakati rencana pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan dengan cara mengakomodasi kepentingan dinas-dinas di lingkungan Pemkot Pekalongan. Tim teknis menindaklanjuti forum ini dengan menyempurnakan dan memperdalam daftar pertanyaan.

Diskusi antara SMERU dan tim teknis secara khusus terpusat pada pendalaman daftar pertanyaan baik untuk kuesioner keluarga maupun untuk kuesioner RT. Hasil diskusi tersebut kemudian diujicobakan pada beberapa rumah tangga untuk mendapatkan masukan dari para pencacah dan responden mengenai pemahaman pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sebelum tim pencacah menjalankan tugasnya, Pemkot Pekalongan yang diwakili oleh Bappeda mendiseminasikan rencana pengumpulan data SPKOM kepada para camat, pengurus kelurahan, dan pengurus PKK di tingkat kelurahan. Mereka kemudian menyampaikan rencana pengumpulan data tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Untuk melakukan pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan, SMERU menyiapkan dua set kuesioner, yakni satu set untuk keluarga dan satu set untuk pengurus RT, dan panduan tentang pengisian kuesioner tersebut. Kuesioner keluarga digunakan untuk mencatat data setiap keluarga di Kota Pekalongan, sedangkan kuesioner RT digunakan untuk memperoleh informasi dari pengurus RT di masing-masing wilayah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pemkot

Pekalongan membentuk tim SPKOM berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Bappeda Kota Pekalongan No. 050/1686/2008 tentang Pembentukan Tim CBMS Tahun 2008 (lihat Lampiran 1). Tim tersebut dibagi menjadi empat tim yang lebih kecil: tim pengarah, tim teknis, tim pendamping, dan tim sekretariat. Tim pengarah terdiri atas enam orang, sebagian besar pejabat senior di dinas masing-masing. Tugas tim pengarah adalah memberikan arahan dan/atau instruksi kepada tim teknis dan sekretariat supaya kegiatan SPKOM berjalan dengan baik dan berhasil. Tim teknis terdiri atas 24 orang, yang sebagian besar pegawai Bappeda dan dinas-dinas lain di Kota Pekalongan, PATTIRO Pekalongan, dan kalangan akademis dari Universitas Pekalongan. Tim pendamping terdiri atas para peneliti SMERU. Tim ini berperan sebagai mentor dan memberikan bantuan teknis sejak awal hingga akhir kegiatan supaya kegiatan-kegiatan SPKOM dapat berjalan lancar. Tim sekretariat terdiri atas lima orang; semuanya pegawai Bappeda.

## 2.4 Panduan Penggunaan Kuesioner

Panduan penggunaan kuesioner dibuat sebagai sarana pengendali supaya setiap orang memiliki persepsi yang sama atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut. Panduan ini mencakup rincian tentang cara melakukan wawancara, cara menyampaikan pertanyaan, dan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner keluarga, mulai dari penjelasan umum hingga penjelasan terperinci untuk setiap pertanyaan.

Panduan tersebut berfungsi sebagai pedoman dan acuan tidak saja bagi para pelatih selama memberikan pelatihan bagi para koordinator di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi juga bagi para koordinator di tingkat kelurahan yang memberikan penjelasan kepada para pencacah di tingkat RT. Untuk mendapatkan keterangan lebih rinci tentang panduan kuesioner ini, lihat Lampiran 2.

## 2.5 Kuesioner Keluarga

Kuesioner keluarga yang digunakan dalam pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan dibuat berdasarkan uji coba SPKOM yang dilakukan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Selain itu, ditambahkan pula beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi atau data yang diperlukan oleh dinas-dinas di lingkungan Pemkot Pekalongan.

Dalam kuesioner ini, istilah “keluarga” mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut menyebutkan bahwa Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang berisikan nama, hubungan, dan identitas anggota keluarga. Jika sepasang suami-istri sudah memiliki KK, meskipun mereka masih tinggal bersama dengan orang tua mereka, pasangan tersebut dianggap sebagai satu keluarga. Namun, pendataan menggunakan SPKOM ini memberi ruang bagi kasus-kasus menyangkut beberapa keluarga yang tidak memiliki KK yang memerlukan penjelasan khusus. Penjelasan khusus tersebut adalah (i) pasangan yang sudah menikah dianggap sebagai satu keluarga meskipun tidak memiliki KK; (ii) seorang perempuan yang hamil dan melahirkan anak di luar ikatan perkawinan dianggap sebagai satu keluarga, dan anak tersebut berstatus keturunan perempuan itu; (iii) seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menikah berdasarkan hukum agama (kawin sirri), lalu memiliki anak, dianggap sebagai satu keluarga, dan kepala keluarga ini adalah si laki-laki; (iv) jika seorang laki-laki menikahi dua perempuan atau lebih, ia dianggap sebagai kepala keluarga dari keluarga hasil perkawinan pertamanya saja; untuk perkawinannya yang kedua, istri keduanya yang dianggap sebagai kepala keluarga; dan (v) jika satu keluarga tinggal di suatu kelurahan tetapi secara administratif terdaftar

sebagai penduduk kelurahan lainnya, maka mereka dicatat dalam data berdasarkan dokumen catatan kependudukan.

Kuesioner keluarga terdiri atas tujuh jenis pertanyaan, yakni karakteristik kepala keluarga dan para anggota keluarga, pengentasan kemiskinan, kesehatan keluarga tersebut, kondisi perekonomian, partisipasi dalam pembangunan wilayah, keamanan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci tentang kuesioner tersebut, lihat Lampiran 3.

Seusai lokakarya dengar pendapat dan sesudah penyusunan kuesioner SPKOM, kuesioner keluarga tersebut diujicobakan kepada beberapa keluarga di Kelurahan Kraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara. Tujuan kegiatan ini adalah memastikan kuesioner tersebut mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan dengan baik antara pencacah dan responden. Jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kuesioner tersebut perlu diperbaiki. Uji coba ini juga dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mewawancarai satu keluarga.

## III. METODOLOGI DAN PEMROSESAN DATA

### 3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau sensus di Kota Pekalongan menggunakan SPKOM yang merupakan sistem pemantauan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh masyarakat lokal dan dilaksanakan melalui partisipasi aktif masyarakat tersebut. Pada dasarnya, pengumpulan data SPKOM dilakukan oleh Pemkot Pekalongan sendiri dengan mendapat bantuan teknis dari SMERU. Pendanaan bantuan teknis disediakan oleh International Development Research Center (IDRC), Kanada, melalui Poverty and Economic Policy (PEP)-CBMS Network Coordinating Team, yang berkedudukan di Angelo King Institute for Economic dan Business Studies, De La Salle University, Manila.

Metode pengumpulan data SPKOM menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan informasi rumah tangga. Informasi dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis komponen dasar yang dikenal dengan PCA. Dengan menggunakan PCA, data bisa menunjukkan peringkat atau enumerasi kesejahteraan (atau sebaliknya, enumerasi kemiskinan) keluarga di wilayah tersebut. Selain itu, metode ini juga bisa membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga di suatu wilayah secara spesifik karena status kesejahteraan atau faktor-faktor kemiskinan memang berbeda untuk wilayah yang berbeda (*local specific*).

Kuesioner keluarga yang digunakan pada pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan dibuat berdasarkan hasil uji coba SPKOM di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi atau data yang dibutuhkan oleh segenap kantor dinas Kota Pekalongan (konteks lokal) juga ditambahkan. Setiap keluarga mendapatkan pertanyaan yang sama dalam kuesioner keluarga.

### 3.2 Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan dilakukan melalui berbagai pelatihan dan proses pengumpulan data itu sendiri. Dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah rumah tangga di kota tersebut dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah lokal untuk kegiatan ini selama dua tahun, proses pengumpulan data SPKOM dilaksanakan dalam dua tahap: yang pertama mencakup Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Timur pada 2008, dan yang kedua mencakup Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat pada 2009.

Pelatihan pertama diadakan pada awal Agustus 2008, sedangkan untuk sensus kedua, pelatihan pengumpulan data diadakan pada Agustus 2009. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pelatihan untuk calon pelatih, pelatihan untuk koordinator di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan pelatihan untuk pencacah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan diri bagi staf pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat secara umum di Kota Pekalongan.

Pelatihan diadakan secara berurutan dan dilanjutkan dengan pengawasan pengisian kuesioner selama beberapa hari. Meskipun telah berpengalaman melakukan sensus pada 2008, tim SPKOM tetap mengalami masalah yang sama pada 2009. Masalah-masalah yang muncul selama pelatihan dan proses pendataan adalah (i) beberapa pencacah tidak mengikuti pelatihan; (ii) beberapa pencacah hanya lulusan SD atau berusia di atas 55 tahun; (iii) beberapa pencacah ternyata bekerja sebagai pegawai pemerintah; dan (iv) beberapa pencacah mengikuti pelatihan tetapi

meminta bantuan orang lain (anggota keluarga atau kerabat) untuk melakukan sensus. Semua hal tersebut mengakibatkan kesalahan atau ketidaklengkapan pengisian kuesioner yang pada akhirnya memengaruhi entri data.

### 3.3 Proses Entri Data

Proses entri data (termasuk pelatihan entri data) hasil pendataan SPKOM 2008 di Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Timur dilakukan oleh CV Waditra, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Perusahaan tersebut telah menjadi mitra Pemkot Pekalongan selama lima tahun. Sebanyak 28.249 keluarga dicatat dan data yang dihasilkan dalam format berbasis jaringan atau MySQL.

Sementara itu, pelatihan entri data SPKOM 2009 di Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Terdapat 42.230 keluarga dicatat dengan menggunakan perangkat lunak CPro dan data yang dihasilkan dalam format STATA.

Karena data 2008 diproses oleh CV Waditra, tiap kuesioner tidak dilengkapi dengan nomor identifikasi yang bisa mempermudah proses pembersihan. Sistem entri data secara otomatis memberikan nomor identifikasi berdasarkan urutan kuesioner yang dimasukkan. Namun, nomor identifikasi kuesioner hanya melekat pada nomor identifikasi kepala keluarga. Nomor identifikasi anggota keluarga yang lain juga melekat pada nomor identifikasi kepala keluarga.

Di tiap kuesioner SPKOM 2009, SMERU secara manual mencantumkan nomor identifikasi sehingga proses entri data memakan waktu lebih lama. Format entri data 2009 dibuat oleh SMERU dan berbeda dengan format 2008 sehingga orang yang bertugas melakukan entri data diharuskan mengikuti pelatihan. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mengikuti pelatihan. Masalah lain pada entri data 2009 adalah ketersediaan unit komputer untuk mengimbangi jumlah petugas entri data. Karena sistem entri data tidak berbasis jaringan dan jumlah komputer tidak memadai, satu unit komputer harus digunakan oleh dua petugas entri data secara bergantian.

### 3.4 Proses Pembersihan Data

Proses pembersihan data berarti memeriksa perbedaan antara data aktual yang tertera di kuesioner dan entri data yang dibuat petugas dalam format entri data. Proses ini juga berarti memeriksa apakah pertanyaan terstruktur di dalam kuesioner diisi dengan benar oleh pencacah.

Terdapat perbedaan dalam proses pembersihan data pada 2008 dan 2009. Data SPKOM 2008 dibuat dalam format berbeda sehingga proses ini termasuk mentransfer data yang tersedia ke dalam format STATA dan mencocokkan nomor identifikasi dengan kuesioner keluarga. Beberapa set data melekat pada nomor identifikasi kuesioner dan set data yang lain melekat pada nomor identifikasi kepala keluarga, sementara data karakteristik keluarga hanya melekat pada nomor identifikasi anggota keluarga. Proses pencocokan nomor identifikasi tersebut cukup sulit. Masalah lain ditemui dalam pelacakan lembar kuesioner yang asli. SMERU dengan dibantu oleh CV Wadira harus mencari lembar kuesioner asli berdasarkan nama responden dan kelurahan asal responden. Jika terdapat nama-nama yang hampir sama, pemeriksaan juga dilakukan terhadap nama anggota keluarga responden.

Proses pembersihan data pada 2009 cukup sulit dalam hal pemeriksaan jawaban pertanyaan terstruktur dalam perangkat lunak statistik STATA. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem entri data dari SMERU. Petugas entri data yang tidak memahami perangkat lunak tersebut atau tidak mengikuti pelatihan entri data melakukan kesalahan dalam pengisian kotak pertanyaan. Misalnya, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 dimasukkan pada kotak untuk jawaban pertanyaan nomor 3 karena petugas tidak memerhatikan kotak entri. Secara umum hal tersebut menyebabkan banyak jawaban kuesioner yang salah penempatannya. Proses pembersihan data mencakup proses mengidentifikasi pertanyaan dengan jawaban yang tidak dimasukkan pada tempatnya dan mencocokkannya dengan jawaban yang sesuai.

Perbedaan format/bentuk entri data juga menimbulkan masalah. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang boleh diisi dengan lebih dari satu jawaban, dan harus dilakukan pemeringkatan atas jawaban-jawaban itu. Karena pada 2008 terdapat data yang bentuk entrinya tidak sesuai dengan pedoman pengisian kuesioner tersebut, dilakukanlah penyesuaian pada bentuk data 2009 yang dapat mengakomodasi bentuk entri data 2008 sehingga kedua data dapat disatukan.

Setelah melewati beberapa kali proses pembersihan, terdapat penurunan jumlah data keluarga yang dapat diandalkan sekitar 1%, yakni dari 70.470 menjadi 69.840 keluarga. Oleh sebab itu, analisis data keluarga pada bab-bab berikut dilakukan pada data yang disebutkan terakhir.

### 3.5 Pengembangan Diri

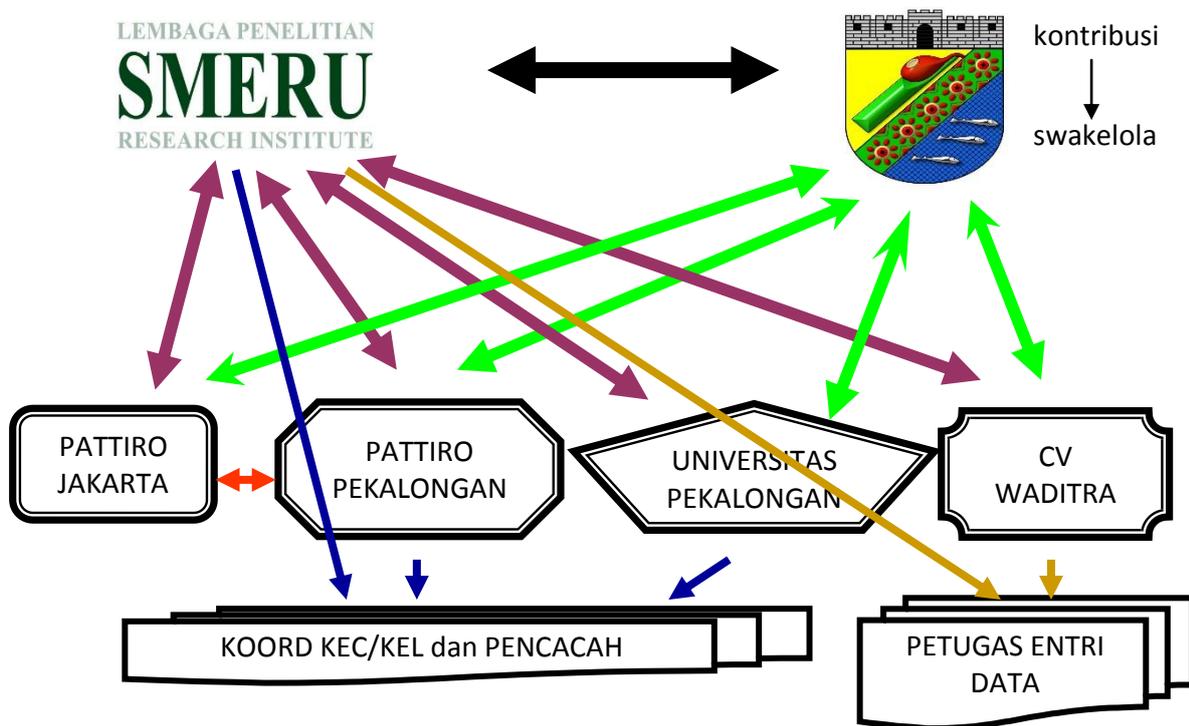
Sejumlah pelatihan diadakan sebagai kegiatan pengembangan diri untuk masyarakat dan staf pemerintah lokal. Hal ini menjamin bahwa pengetahuan dan kemampuan ditularkan dan dipertahankan oleh masyarakat lokal.

- a) **Pelatihan pengenalan SPKOM** adalah kegiatan pengembangan diri untuk staf pemerintah lokal dan dinas-dinas terkait. Pelatihan tersebut memperkenalkan inisiatif SPKOM termasuk manfaat, metodologi, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengannya. Peserta pelatihan adalah walikota, kepala Bappeda beserta jajaran stafnya, pejabat kantor dinas (kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) dan BPS Kota Pekalongan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, ketertarikan, dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap SPKOM.
- b) **Pelatihan untuk para calon pemberi pelatihan** diadakan di kantor Bappeda. Dalam pelatihan tersebut setiap instrumen sensus dibahas dan dimodifikasi oleh tim teknis untuk memasukkan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Yang mengikuti pelatihan ini adalah staf dari PATTIRO dan Universitas Pekalongan. Pada waktu yang berbeda, staf kedua lembaga tersebut bersama dengan SMERU memberikan pelatihan bagi para pencacah di tiap kelurahan.
- c) **Pelatihan koordinator kelurahan** melibatkan 51 koordinator (4 dari tingkat kecamatan dan 24 dari tingkat kelurahan). Para koordinator (di tingkat kelurahan) bertugas membantu tim teknis dan SMERU mengawasi proses pengisian kuesioner, mengkaji kembali dan mengumpulkan kuesioner yang telah diisi, dan selanjutnya menyerahkan kuesioner tersebut kepada koordinator kecamatan/kota.
- d) **Pelatihan untuk pencacah** diadakan di tiap kelurahan, masing-masing melibatkan 15–30 pencacah. Mereka adalah penduduk lokal, kebanyakan ibu rumah tangga yang memiliki

waktu luang untuk melaksanakan sensus di siang hari. Latar belakang pendidikan mereka beragam—dari lulusan SD hingga S1—tetapi pada umumnya adalah lulusan SMA.

- e) **Pelatihan entri data** pada 2009 diselenggarakan oleh SMERU, melibatkan 60 peserta yang dibagi menjadi dua kelompok. Bahan pelatihan terdiri atas teknik entri data ke dalam komputer, Access, dan pelatihan dasar CPro sebagai perangkat lunak basis data. Terdapat 42.230 rumah tangga yang tercatat dengan menggunakan CPro dan keluaran data (*data output*) dihasilkan dalam format STATA.

Secara skematis, hubungan kerja sama antarlembaga dan peranan tiap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pendataan SPKOM, mulai pembahasan kuesioner, pelatihan dan supervisi pencacah, sampai pembersihan data, tampak pada Gambar 1.



**Gambar 1. Koordinasi dalam pelaksanaan SPKOM**

## IV MDG DAN HASIL PCA

### 4.1 Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) di Kota Pekalongan

Perdebatan mengenai dikotomi pertumbuhan dan pemerataan telah berlangsung di kalangan ahli ekonomi dan pembuat kebijakan selama beberapa dasawarsa. Mekanisme teoritis yang menghubungkan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pertumbuhan membuat isu ini menarik untuk diperdebatkan. Kesimpulan mendasar dari studi empiris menunjukkan pertumbuhan dan pemerataan bersifat saling melengkapi dalam beberapa dimensi pembangunan yang mendasar (Bourguignon, 2007). Selain itu, hasil empiris lainnya memperlihatkan bahwa pembangunan yang berfokus pada distribusi dan pemerataan memberikan dampak yang lebih positif pada masyarakat (Bappenas, 2007). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara aktif mengangkat wacana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil dalam Pertemuan Puncak Milenium pada November 2000 di New York. Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*—MDGs) pertama kali diluncurkan sebagai suatu perjanjian dari 189 negara anggota PBB dalam pertemuan tersebut.

Delapan tujuan MDGs yang menghubungkan beragam sasaran pembangunan ke dalam suatu agenda global adalah (i) menghapus kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; (ii) mencapai pendidikan dasar universal; (iii) mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (iv) mengurangi angka kematian anak; (v) meningkatkan kesehatan ibu; (vi) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya; (vii) menjamin kelestarian lingkungan; dan (viii) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan sasaran tersebut telah diterjemahkan ke dalam target-target yang dapat diukur dan kemajuannya dilaporkan melalui indikator-indikator yang dapat diverifikasi dan dibandingkan secara internasional. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa MDGs bukan sasaran PBB meskipun PBB telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kampanye global mengenai MDGs dan membantu banyak negara mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. MDGs merupakan sasaran yang diadopsi oleh suatu negara melalui pemerintahnya. Di Indonesia, Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan pemda, DPR/DPRD, masyarakat sipil, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut (UNDP Indonesia, 2004).

Sasaran-sasaran MDGs bukanlah hal yang baru dalam konteks pembangunan di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, para presiden dan pemerintahan yang dijalankan mereka telah berfokus pada kerangka pembangunan yang ada pada tiap-tiap masa pemerintahan tersebut. Pada era Orde Baru, Indonesia memiliki Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai dengan Repelita I pada tahun 1969 dan diakhiri dengan Repelita VI pada tahun 1994, yang terhenti karena krisis moneter 1997. Selama era transisi setelah jatuhnya Orde Baru, Pemerintah Indonesia mengembangkan dokumen serupa mengenai perencanaan pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Versi terakhir dokumen tersebut adalah RPJMN 2010–2014. RPJMN berisi pedoman kebijakan dan program untuk periode lima tahun bagi Pemerintah Pusat dan pemda, berdasarkan visi dan misi presiden terpilih. Dimasukkannya MDGs ke dalam RPJMN dan dokumen lain yang berisikan program-program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tetap teguh dalam memperlakukan MDGs, bukan sekadar menunjukkan niat baik tetapi juga melakukan tindakan yang nyata (Bappenas, 2007).

Seperti yang telah disebutkan di atas, upaya mencapai MDGs bukan hanya tugas Pemerintah Pusat. Semua pemangku kepentingan harus berperan dalam upaya ini, termasuk pemda. Pada saat penyusunan, laporan yang mengikuti perkembangan upaya pencapaian sasaran MDGs tersebut hanya tersedia di tingkat pusat, padahal akan lebih bermanfaat apabila laporan mengenai kemajuan MDGs juga tersedia di tingkat kabupaten dan kecamatan, mengingat masalah-masalah yang dihadapi lebih terkonsentrasi di tingkat akar rumput.

Sebelum desentralisasi, kebutuhan akan data untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi tampaknya terabaikan. Pada era desentralisasi seperti sekarang ini, pemda memerlukan informasi dan data yang andal mengenai keadaan masyarakatnya karena peran pemda yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Informasi dan data tersebut diperlukan supaya pemda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti program pembangunan mana yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bagaimana pemda dapat mempercepat pembangunan, kelompok-kelompok mana yang memerlukan perhatian lebih, atau kecamatan/wilayah mana yang harus diprioritaskan. Namun demikian, survei dan pengumpulan data seperti itu tidak mudah dilakukan dan memerlukan dana yang besar. Meskipun sudah pernah ada upaya melaksanakan uji coba survei indikator MDGs di tingkat kabupaten dan kecamatan, yakni di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan serta di Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat pada 2007, sebagian besar pemda agak enggan melakukan survei dan pengumpulan data yang memerlukan dana besar itu. MDGs memang bukan sekadar pengukuran tetapi lebih merupakan suatu tindakan (Stalker, 2008); tujuannya bukan untuk menghitung jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi bagaimana membuat mereka dapat hidup layak. Dengan data yang andal di tingkat daerah, tinjauan mengenai apa yang sudah dan belum dilakukan oleh pemda untuk kesejahteraan masyarakatnya dapat dilakukan.

#### 4.1.1 Tujuan Mengetahui Pencapaian MDGs melalui Data SPKOM

Tujuan utama mengetahui pencapaian MDGs melalui SPKOM di Kota Pekalongan sebenarnya bukan untuk melakukan penilaian atas indikator MDGs, tetapi untuk memperlihatkan bahwa beberapa indikator MDGs dapat dilihat dari sensus keluarga dan bahwa tinjauan terhadap kemajuan pencapaian MDGs di Kota Pekalongan dapat diselesaikan, tentunya dengan sejumlah keterbatasan. Pertama, ada sejumlah kesulitan terkait dengan data (*baseline*) Sensus Penduduk 1990 karena tidak adanya data. Data yang ada hanya menunjukkan angka-angka terbaru mengenai pencapaian indikator MDGs di Kota Pekalongan tanpa dibandingkan dengan data dasar (*baseline data*). Kedua, seperti yang telah disebutkan, hanya beberapa indikator MDGs saja yang bisa diperoleh melalui data SPKOM. Oleh karenanya, analisis data hanya tersedia untuk indikator-indikator yang ada, sedangkan yang lainnya diperuntukkan bagi perbaikan ke depan. Ketiga, karena sensus SPKOM berupa pengumpulan data di tingkat keluarga, ada kemungkinan bahwa dalam prosesnya ada nilai-nilai yang hilang sehingga pencapaian MDGs lebih rendah daripada rasio yang dipublikasikan.

Ada sejumlah target pada empat (dari delapan) sasaran pada subbagian berikut, yaitu sasaran 2 mencapai pendidikan dasar universal, sasaran 3 mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, sasaran 4 mengurangi angka kematian anak, dan sasaran 5 meningkatkan kesehatan ibu. Yang terakhir, perlu diperhatikan bahwa indikator-indikator untuk Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan disusun berdasarkan data sensus 2008, sedangkan indikator-indikator untuk Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara berdasarkan data sensus 2009.

#### 4.1.2 Sasaran 2: Mencapai Pendidikan Dasar Universal

Target 2A: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak, laki-laki dan perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.

**a) Indikator**

Di Indonesia, pengukuran untuk target ini menggunakan tiga indikator, yakni (i) rasio angka partisipasi murni (APM, atau *net enrollment ratio-NER*) murid SD (7–12 tahun); (ii) APM murid SLTP (13–15 tahun); dan (iii) tingkat melek huruf pada kelompok usia 15–24 tahun.

**b) Keadaan**

Tabel 3 menunjukkan keadaan APM anak usia SD dan SLTP di Kota Pekalongan. Keempat kecamatan telah mencapai APM lebih dari 95% untuk usia SD, yang artinya 95% anak usia 7–12 tahun bersekolah. Untuk usia SLTP, APM-nya sedikit di bawah APM anak usia SD, yakni rata-rata sebesar 80%. APM tertinggi untuk usia SLTP (82,54%) ditemukan di Kecamatan Pekalongan Timur dan yang terendah (78,53%) di Kecamatan Pekalongan Utara.

**Tabel 3. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Usia SD dan SLTP (%)**

Angka Partisipasi Murni	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
APM usia SD (7–12 tahun)	96,05%	96,04%	95,90%	95,64%
APM usia SLTP (13–15 tahun)	82,54%	80,24%	81,67%	78,53%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009.

Indikator ketiga adalah tingkat melek huruf kelompok usia 15–24 tahun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. Untuk indikator ini, semua kecamatan di Kota Pekalongan mencapai angka yang sangat baik, yakni lebih dari 98%. Persentase melek huruf kelompok usia 15–24 tahun untuk Kecamatan Pekalongan Timur pada 2008 bahkan hampir mencapai 100%.

**Tabel 4. Tingkat Melek Huruf Kelompok Usia 15–24 Tahun (%)**

Tingkat Melek Huruf	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Tingkat melek huruf usia 15–24 tahun	99,56%	99,34%	98,89%	98,34%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009

### 4.1.3 Sasaran 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Target 3A: Menghapus kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah yang diharapkan dapat dicapai pada 2005 dan di semua tingkat pendidikan selambat-lambatnya pada 2015.

a) Untuk target ini, kemajuan dipantau menggunakan empat indikator, yakni (i) rasio anak perempuan dan laki-laki di sekolah dasar dan menengah, yang diukur melalui APM dari anak perempuan dan laki-laki; (ii) rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki dalam kelompok usia 15–24 tahun, yang diukur melalui tingkat melek huruf perempuan terhadap laki-laki (indeks

paritas melek huruf berdasarkan gender); (iii) porsi perempuan dalam upah kerja pada sektor non pertanian; dan (iv) proporsi kursi perempuan di MPR.

#### b) Keadaan

Untuk mencapai sasaran mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, target rasio perempuan dan laki-laki di pendidikan dasar dan rasio melek huruf perempuan dan laki-laki pada kelompok usia 15–24 tahun menjadi bahan pertimbangan. Sayangnya, indikator (3) dan (4) tidak dapat diperoleh dari data SPKOM.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada 2008 rasio anak perempuan dan laki-laki usia SD (7–12 tahun) di dua kecamatan, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan, adalah 100,11 % dan 100,95%. Sensus SPKOM 2009 di Kecamatan Pekalongan Utara menghasilkan angka serupa, yakni proporsi anak perempuan terhadap anak laki-laki usia SD mencapai lebih dari 100%. Proporsi anak perempuan terhadap anak laki-laki usia SD di Kecamatan Pekalongan Barat justru di bawah 100%—proporsi terendah di antara empat kecamatan sampel. Sebaliknya, rasio anak perempuan dan laki-laki usia SLTP (13–15 tahun) di Kecamatan Pekalongan Timur adalah di bawah 100%, sedangkan rasio anak perempuan dan laki-laki usia SLTP di tiga kecamatan lainnya menunjukkan angka yang luar biasa, yakni di atas 100%.

**Tabel 5. Rasio Anak Perempuan dan Laki-laki di Pendidikan Dasar (%)**

Rasio Anak Perempuan dan Laki-laki di Pendidikan Dasar	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Rasio anak perempuan dan laki-laki di SD	100,11%	100,95%	99,57%	100,42%
Rasio anak perempuan dan laki-laki di SLTP	98,43%	106,03%	100,69%	106,10%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009.

Untuk indikator kedua, sekali lagi Kota Pekalongan memperlihatkan pencapaian yang luar biasa. Indeks paritas melek huruf berdasarkan gender di tiga dari empat kecamatan adalah lebih dari 100%. Kecamatan Pekalongan Barat adalah satu-satunya kecamatan sampel yang memiliki rasio sedikit di bawah 100%. Oleh karenanya, dari ketiga indikator di atas, kesetaraan gender dalam hal pendidikan dan melek huruf di Kota Pekalongan sudah tercapai berdasarkan sasaran MDGs. Angka yang dicapai oleh Kota Pekalongan lebih baik daripada yang dicapai secara nasional.

**Tabel 6. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15–24 Tahun (%)**

	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15–24 tahun	100,09%	100,22%	99,69%	100,07%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009

#### 4.1.4 Sasaran 4: Mengurangi Angka Kematian Anak

Target 4A: Mengurangi angka kematian anak balita sebanyak dua pertiga, antara 1990 dan 2015.

a) Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi target mengurangi angka kematian anak balita sebesar dua pertiga antara 1990 dan 2015 adalah (i) angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; (ii) angka kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup; (iii) persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak; dan (iv) persentase bayi usia antara 12 dan 23 bulan yang diimunisasi campak.

b) Keadaan

Indikator-indikator utama untuk sasaran keempat ini meliputi tingkat kematian anak, baik bayi (di bawah satu tahun), dan tingkat kematian balita. Sebenarnya sangat sulit menjawab indikator ini. Bahkan ketika survei uji coba dilakukan khusus untuk mengumpulkan indikator MDGs seperti yang sudah disebutkan di atas masih sangat sulit untuk mendapatkan indikator ini. Oleh karena itu, tingkat kematian bayi dan balita menggunakan data SPKOM tidak tersedia. Namun, masih perlu dilakukan upaya besar untuk memastikan target ini tercapai.

Indikator ketiga dan keempat adalah persentase anak di bawah usia satu tahun dan usia antara 12–23 bulan yang diberi imunisasi campak. Perlu diperhatikan bahwa data ini hanya mencakup anak-anak yang terakhir dalam keluarga yang didata. Persentase anak di bawah usia satu tahun yang diimunisasi campak untuk Kota Pekalongan tidak begitu baik. Angka tertinggi untuk indikator ini adalah 26,58% di Kecamatan Pekalongan Timur yang diikuti dengan 25,17% di Kecamatan Pekalongan Utara, 22,84% di Kecamatan Pekalongan Selatan, dan 22,08% di Kecamatan Pekalongan Barat. Persentase anak usia 12–23 bulan yang diimunisasi campak menunjukkan angka yang cukup baik; semua kecamatan mencapai lebih dari 50%. Kecamatan Pekalongan Timur mencapai lebih dari 75%, sedangkan Kecamatan Pekalongan Barat, Utara, dan Selatan, masing-masing meraih 69,54%, 67,32%, dan 59,31%.

**Tabel 7. Persentase Anak yang Diimunisasi Campak**

Imunisasi Campak	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Anak di bawah usia satu tahun yang diimunisasi	26,58%	22,84%	22,08%	25,17%
Anak usia 12–23 bulan yang diimunisasi	78,30%	59,31%	69,54%	67,32%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009

#### 4.1.5 Sasaran 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5A: Mengurangi rasio kematian ibu sebesar tiga perempat antara 1990 dan 2015.

a) Indikator

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur penurunan tingkat kematian ibu sebanyak tiga perempat selama periode 1990–2015 adalah (i) tingkat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; dan (ii) proporsi kelahiran yang dibantu oleh penolong kelahiran terlatih<sup>1</sup> (dalam persen).

b) Keadaan

Untuk data indikator kesehatan, adanya keterbatasan data tidak memungkinkan dilakukannya analisis terhadap upaya memperbaiki akses pada kesehatan reproduksi. Indikator utamanya,

<sup>1</sup>Berbeda dengan tenaga kesehatan terlatih, penolong kelahiran terlatih tidak memiliki pendidikan formal.

yakni tingkat kematian ibu, tidak tersedia di Kota Pekalongan karena alasan-alasan yang sama dengan yang diterangkan pada indikator-indikator yang terakhir.

Untuk indikator kedua, data yang dicari adalah mengenai proporsi kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional yang terlatih. Persentase kelahiran terakhir yang ditolong tersebut menunjukkan angka yang luar biasa bagus di empat kecamatan, yakni 93,78% untuk Kecamatan Pekalongan Timur, 86,59% untuk Kecamatan Pekalongan Selatan, 94,49% untuk Kecamatan Pekalongan Barat, dan 89,72% untuk Kecamatan Pekalongan Utara.

**Tabel 8. Persentase Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih**

	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	93,78%	86,59%	94,49%	89,72%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009

Target 5B: Mencapai akses universal ke kesehatan reproduksi pada 2015.

a) Indikator

Proporsi perempuan menikah yang berusia antara 15 dan 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi, apapun bentuknya (dalam persen).

b) Keadaan

Di Kota Pekalongan, dengan menggunakan data SPKOM, tingkat penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan menikah yang berusia 15–49 tahun dapat diketahui. Proporsi yang dihasilkan di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan berdasarkan sensus 2008 menunjukkan bahwa secara berturut-turut sebanyak 51,55% dan 44,75% perempuan usia 15–49 tahun yang berstatus menikah menggunakan alat kontrasepsi. Berdasarkan sensus 2009, proporsi untuk kelompok yang sama di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara adalah 52,55% dan 55,96% masing-masing. Angka-angka tersebut menyiratkan bahwa pemerintah harus lebih memerhatikan pembangunan dalam hal kesehatan reproduksi. Apabila tidak, akan terjadi berbagai masalah kependudukan di masa depan.

**Tabel 9. Proporsi Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun yang Menggunakan Alat Kontrasepsi**

	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun yang Menggunakan Alat Kontrasepsi, apapun bentuknya.	51,55%	44,75%	52,55%	55,96%

Sumber: Sensus SPKOM 2008–2009

## 4.2 Analisis Deskriptif: Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dengan keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Keterbatasan tersebut beragam bentuknya, seperti keterbatasan dalam hal pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, dan akses terhadap informasi.

Karena bersifat multidimensional, selain diukur melalui pendekatan keuangan, kemiskinan juga dapat diukur dari aspek-aspek lain, seperti akses kepada pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan fasilitas informasi publik; kepemilikan barang berharga; kesempatan ikut serta dalam kegiatan masyarakat; dan mengungkapkan pandangan politik.

Sensus di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan meliputi 111.008 penduduk dari 28.189 keluarga. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri atas 13 kelurahan, sedangkan Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri atas 11 kelurahan.

Di Kecamatan Pekalongan Timur terdapat 15.476 keluarga, dengan rata-rata satu keluarga terdiri atas 3,8 orang. Persentase penduduk laki-laki adalah 50,38%. Persentase keluarga dengan kepala keluarga perempuan, biasanya janda, adalah 17,09%. Jumlah keluarga di Kecamatan Pekalongan Selatan adalah 12.713, dengan satu keluarga rata-rata terdiri atas 4 orang. Persentase penduduk laki-laki adalah 50,47%, dan ada 15% keluarga dengan kepala keluarga perempuan.

**Tabel 10. Karakteristik Keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan, 2008**

Karakteristik	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Jumlah penduduk	59.178	51.830
Jumlah keluarga	15.476	12.713
Rata-rata jumlah anggota keluarga	3,82	4,07
Rasio perempuan: laki-laki (%)	50:50	50:50
Porsi kepala keluarga perempuan (%)	17,09%	15,00%

Tabel 11 menunjukkan angka persentase dari tabulasi silang kategori usia dan status perkawinan kepala keluarga terhadap total keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Ada tiga kategori usia dengan kurang dari 2% kepala keluarga di masing-masing kecamatan berusia di bawah 25 tahun dan sebagian besar berstatus menikah. Yang dimaksud dengan kepala keluarga di bawah usia 25 tahun dan tidak menikah dalam konteks ini adalah orang dewasa yang tinggal terpisah dari keluarga inti tetapi masih berada di kecamatan yang sama atau tinggal di kecamatan yang berbeda tetapi masih di Kota Pekalongan dengan alasan bersekolah atau bekerja. Kepala keluarga yang berstatus cerai adalah mereka yang cerai secara sah atau ditinggal oleh suami atau istrinya. Proporsi kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dan usia di kedua kecamatan relatif sama. Hampir 90% dari mereka, perempuan atau laki-laki, berada dalam kelompok usia produktif.

**Tabel 11. Usia dan Status Perkawinan Kepala Keluarga, 2008 (%)**

Usia Kepala Keluarga	Kecamatan Pekalongan Timur				Kecamatan Pekalongan Selatan			
	Tidak menikah	Menikah	Cerai	Janda	Tidak menikah	Menikah	Cerai	Janda

<25 tahun	0,16	1,43	0,03	0,02	0,17	1,45	0,02	0,02
25–65 tahun	1,88	72,78	2,35	8,46	1,01	75,91	2,47	8,78
>65 tahun	0,25	5,87	0,28	4,49	0,06	4,54	0,13	3,64

Peneliti mengelompokkan pendidikan kepala keluarga ke dalam lima kategori berdasarkan kategori BPS. Pengelompokan ini memungkinkan peneliti membandingkan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga di Kota Pekalongan dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas di tingkat nasional.

Berdasarkan data pendidikan dari BPS tentang pendidikan yang ditamatkan pada 2007, 7,57% penduduk usia 10 tahun ke atas tidak pernah bersekolah, 20,37% tidak lulus SD, 31,19% lulus SD, 17,49% lulus SLTP, dan 23,37% lulus SLTA. Jumlah kepala keluarga yang tidak lulus SD di Kota Pekalongan lebih rendah dari tingkat nasional, dan hal ini juga tercermin pada tingkat sekolah lainnya.

**Tabel 12. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Keluarga, 2008 (%)**

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Tidak sekolah	6,97	7,83
Tidak lulus SD	11,26	13,58
Lulus SD	35,74	44,28
Lulus SLTP	17,69	16,64
≥ Lulus SLTA	28,33	17,67

Persentase kepala keluarga yang minimal lulus SLTA lebih besar dibandingkan dengan yang tidak pernah bersekolah atau tidak lulus SD. Hal ini berarti bahwa kepala keluarga di Kota Pekalongan relatif berpendidikan baik. Tingkat pendidikan kepala keluarga berpengaruh pada rencana mereka untuk menyekolahkan anak mereka hingga ke tingkat yang setidak-tidaknya sama dengan tingkat pendidikan mereka. Oleh karenanya, tingkat pendidikan kepala keluarga adalah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa tinggi tingkat pendidikan anak mereka atau status ekonomi mereka.

Sektor pekerjaan kepala keluarga juga berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data BPS untuk 2007, lebih dari 50% populasi penduduk Kota Pekalongan bekerja di sektor industri. Berdasarkan data sensus SPKOM terhadap kepala keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan, sekitar 40% kepala keluarga bekerja di sektor jasa. Persentase ini lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di sektor industri. Hasil yang berbeda ini diperoleh karena diakumulasi beberapa sektor, seperti sektor transportasi dan keuangan, ke dalam sektor jasa. Kemungkinan lain adalah karena SMERU membuat penyederhanaan kategorisasi pekerjaan kepala keluarga ke sektor-sektor tersebut. Ada sejumlah besar kepala keluarga yang bekerja sebagai wiraswasta atau pekerja swasta yang dikategorikan sebagai bekerja di sektor jasa.

Melalui diskusi dengan pejabat daerah dan LSM di Kota Pekalongan, peneliti mengetahui bahwa sektor industri kebanyakan bergantung pada komoditas batik, garmen, dan kerajinan tangan. Kerajinan tangan umumnya terbuat dari bambu dan untuk pasar luar negeri.

Data menunjukkan bahwa dari 24,5% kepala keluarga yang bekerja di sektor industri di Kecamatan Pekalongan Timur, sekitar 10% menggeluti industri batik. Di Kecamatan Pekalongan

Selatan, sekitar 30 % kepala keluarga menggeluti industri batik dari 34,20% yang bekerja di sektor industri.

**Tabel 13. Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga, 2008 (%)**

Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Pertanian	1,64	2,66
Industri	24,5	34,20
Perdagangan	10,82	14,47
Jasa	46,94	35,19
Menerima Transfer/Pensiunan	5,91	3,82
Lainnya	3,85	4,04

Jenis pekerjaan kepala keluarga yang biasanya dilakukan di industri batik meliputi juragan batik, buruh batik, tukang *colet*, tukang *mbabar*, dan tukang *ngerombe*. Juragan batik adalah pemilik pabrik batik; buruh batik adalah pekerja di pabrik batik; tukang *colet* adalah pekerja yang mewarnai corak batik; tukang *mbabar* terlibat dalam pembuatan batik—mulai kain masih polos putih hingga menjadi kain batik; dan tukang *ngerombe* menenun pinggiran kain batik hingga menjadi rapi dan bagus.

Pada uraian dan tabel-tabel berikut, kami tampilkan informasi mengenai perilaku dan keadaan keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

Data pola konsumsi pangan yang diperoleh dari sensus SPKOM di Kota Pekalongan memberikan informasi tentang berapa kali dalam sehari suatu keluarga makan dan berapa kali dalam seminggu suatu keluarga mengonsumsi daging, telur, dan ikan. Selain itu, peneliti juga menambahkan pertanyaan tentang konsumsi susu. Data konsumsi susu memberikan informasi berapa kali anggota keluarga, kecuali bayi, minum susu apapun dalam satu minggu.

**Tabel 14. Pola Konsumsi Makanan, 2008 (%)**

Pola Konsumsi	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Proporsi keluarga yang anggota keluarganya makan sedikitnya tiga kali sehari	92,81	96,11
Proporsi keluarga yang mengonsumsi daging minimal sekali dalam seminggu	51,48	48,17
Proporsi keluarga yang mengonsumsi telur minimal sekali dalam seminggu	75,17	70,45
Proporsi keluarga yang mengonsumsi ikan minimal sekali dalam seminggu	72,16	66,07
Proporsi keluarga yang mengonsumsi susu minimal sekali dalam seminggu	51,62	43,58

Sebagian besar keluarga di kedua kecamatan Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan makan setidaknya tiga kali sehari. Meskipun persentase penduduk Kecamatan Pekalongan Timur yang makan tiga kali sehari lebih rendah daripada mereka yang di Kecamatan Pekalongan Selatan, konsumsi daging mereka lebih tinggi, dengan 51,48% keluarga mengonsumsi daging setidaknya sekali dalam seminggu. Secara keseluruhan, karena jumlah keluarga di

Kecamatan Pekalongan Timur lebih banyak daripada jumlah keluarga di Kecamatan Pekalongan Selatan, pola konsumsi mereka untuk daging, telur, ikan, dan susu juga relatif lebih tinggi.

Bagian selanjutnya dari laporan ini berisi informasi tentang program pengurangan kemiskinan dari pemerintah. Program-program yang diterima oleh keluarga-keluarga di kedua kecamatan tersebut termasuk program dari Pemerintah Pusat dan program dari pemkot, antara lain Raskin, BLT, dan beberapa program peningkatan mutu lingkungan.

Karena Raskin adalah program perlindungan sosial yang sifatnya massal, persentase keluarga penerima Raskin lebih tinggi daripada penerima program lainnya. Di kedua kecamatan, jumlah penerima Raskin lebih dari 50% populasi. Tingginya persentase ini dikarenakan penargetan program yang tidak akurat. Pihak yang mendistribusikan Raskin atau aparat kelurahan memasukkan baik warga miskin maupun tidak miskin yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai penerima ke dalam daftar penerima Raskin untuk mencegah konflik masyarakat atau demi kepentingan politiknya. Jumlah Raskin yang diterima oleh setiap keluarga kurang dari jumlah beras yang seharusnya diterima oleh keluarga miskin (Hastuti *et al.*, 2008: 23).

Jumlah keluarga penerima BLT pada 2005 dan 2008 relatif tidak berbeda. Namun, apabila dilakukan tabulasi silang antara penerima BLT 2005 dan penerima BLT 2008, terlihat bahwa 267 keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan 161 keluarga di Kecamatan Pekalongan Selatan menerima BLT pada 2005 tetapi tidak menerima bantuan yang sama pada 2008.

Berkaitan dengan masalah sanitasi, Pemkot Pekalongan menjalankan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan, yaitu Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM), Program Perbaikan Permukiman dan Lingkungan, serta Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman. Moto yang diusung dalam penanganan masalah sanitasi tersebut adalah “Bebas Rumah Kumuh” (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010). Plesterisasi, jambanisasi, dan sumurisasi, merupakan bagian dari Program Perbaikan Permukiman dan Lingkungan, sedangkan atapisasi adalah bagian dari Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman. Secara prinsip, program-program tersebut dijalankan oleh Pemkot Pekalongan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Yang dikategorikan tidak layak huni adalah rumah tanpa fasilitas kamar mandi atau WC dan sumber air bersih, rumah yang lantainya belum diplester dan masih berupa tanah, dan rumah tanpa ventilasi yang memadai. Komitmen Pemkot Pekalongan untuk meningkatkan fasilitas perumahan mensyaratkan sungai yang bersih. Akan tetapi, sungai-sungai di Kota Pekalongan saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena adanya industri batik yang turut menyebabkan degradasi lingkungan.

Informasi dasar mengenai keadaan rumah diperlukan untuk dapat membantu menggambarkan keadaan ekonomi setiap keluarga. Meskipun jumlah keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur lebih banyak dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Selatan, persentase keluarga yang memiliki rumah sendiri di Kecamatan Pekalongan Timur lebih kecil dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Selatan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penduduk di Kecamatan Pekalongan Timur kurang sejahtera dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Kecamatan Pekalongan Selatan. Apabila kita membandingkan jumlah keluarga yang menyatakan rumah mereka adalah warisan yang belum dibagi, kita bisa melihat bahwa di Kecamatan Pekalongan Timur terdapat lebih banyak keluarga yang memiliki rumah sendiri. Sebagai orang Jawa, mereka yang telah berkeluarga cenderung tetap tinggal di rumah orang tua mereka alih-alih tinggal terpisah supaya dapat merawat orang tua mereka atau supaya orang tua mereka dapat mengasuh anak-anak mereka, terutama apabila si ibu juga bekerja.

**Tabel 15. Kepemilikan Rumah, 2008 (%)**

Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Rumah milik sendiri	58,28	68,09
Warisan yang belum dibagi	22,31	14,21
Sewa/kontrak	3,49	1,31
Rumah dinas	1,78	0,24
Pinjam/milik keluarga	4,43	6,92
Menumpang keluarga lain	9,10	8,57

Tabel 16 menunjukkan bahwa sekitar 50% keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan telah menggunakan marmer, keramik, atau teraso untuk lantai rumah. Jumlah keluarga yang rumahnya berlantai ubin dan berlantai tanah di kedua kecamatan tersebut relatif tidak terlalu berbeda, yakni masih lebih rendah daripada jumlah keluarga yang menggunakan marmer, keramik, atau teraso. Meskipun demikian, kenyataan bahwa masih ada 22,95% rumah berlantai tanah dan 18,74% rumah berlantai ubin di Kecamatan Pekalongan Selatan dan 20,97% rumah berlantai tanah dan 22,73% rumah berlantai ubin di Kecamatan Pekalongan Timur seharusnya meningkatkan kesadaran akan keberadaan rumah tidak layak huni di wilayah Kota Pekalongan, dan rumah-rumah itu bisa menjadi sasaran Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman.

**Tabel 16. Material Lantai Terluas, 2008 (%)**

Jenis Bahan Lantai	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Marmer/keramik/teraso	48,28	51,43
Ubin/tegel	22,73	18,74
Plester/semen	1,54	2,03
Kayu	0,10	0,11
Bambu	5,52	3,96
Tanah	20,97	22,95

Presentase keluarga yang memiliki WC di rumah adalah 77,16% di Kecamatan Pekalongan Timur dan 87,12% di Kecamatan Pekalongan Selatan (lihat Tabel 17). Program sanitasi lain yang dijalankan Pemkot Pekalongan adalah penyediaan WC umum, yang dikenal sebagai mandi, cuci, kakus atau MCK. Tabel 17 memperlihatkan kepada kita bahwa ketersediaan MCK merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat. Hal ini terutama dapat dilihat dari persentase keluarga pengguna WC umum di Kecamatan Pekalongan Timur yang lebih tinggi daripada persentase keluarga pengguna WC umum di Kecamatan Pekalongan Selatan. Persentase keluarga yang memiliki WC di Kecamatan Pekalongan Timur lebih sedikit daripada mereka yang memiliki WC di Kecamatan Pekalongan Selatan. Selain itu, sekitar 6% keluarga di kedua kecamatan masih menggunakan sungai sebagai WC. Dari hasil diskusi dengan petugas sensus, peneliti menemukan bahwa kebanyakan orang yang tinggal di sekitar sawah menganggap sistem drainase sawah sebagai sungai kecil. Ada pula keluarga yang tidak memiliki WC yang menggunakan WC tetangga, yang mungkin masih berkerabat dengan keluarga tersebut, karena satu keluarga besar biasanya tinggal berdekatan satu sama lain.

**Tabel 17. Keluarga Pengguna Fasilitas WC, 2008 (%)**

Fasilitas WC	KecamatanPekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Menggunakan WC sendiri	77,16	87,12
Menggunakan WC umum	13,42	2,49
Memanfaatkan sungai/saluran air	6,67	6,17
Menggunakan WC keluarga lain	1,20	2,18

Sumur tidak terlindung juga masih menjadi sumber utama air minum bagi 41,46% keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan 63,05% keluarga di Kecamatan Pekalongan Selatan. Kecuali air minum kemasan dan isi ulang, air dari sumber lain harus direbus sebelum dikonsumsi. Meskipun sumur umum juga menjadi bagian dari program sanitasi Pemerintah Kota Pekalongan, ketersediaan sumur umum, terutama yang terlindungi, tidak mencakup lebih dari 1% populasi di setiap kecamatan. Berdasarkan pengamatan, kebanyakan sungai yang melintas Kota Pekalongan tercemar limbah cair industri batik, yang dapat dilihat dari warna air sungai yang menghitam. Peneliti berasumsi bahwa lebih kurang 0,1% keluarga di kedua kecamatan yang air minumannya bersumber dari air sungai atau air hujan menggunakan air sungai dari sistem drainase sawah atau air hujan yang ditampung.

**Tabel 18. Sumber Air Minum, 2008 (%)**

Sumber Air Minum	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Air minum dalam kemasan	2,77	2,31
Air minum isi ulang	5,65	1,82
Air PDAM <sup>a</sup> /air ledeng	14,15	4,45
Sumur terlindung/sumur bor	34,57	26,96
Sumur tidak terlindung	41,46	63,05
Air sungai /air hujan	0,05	0,12
Sumur umum	0,16	0,13

<sup>a</sup>Perusahaan Daerah Air Minum

Mayoritas keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan menggunakan listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber penerangan utama, dengan persentase secara berturut-turut 98,86% dan 98,82%. Perhatian utama dalam hal ketersediaan listrik sebenarnya bukan mengenai sumbernya, tetapi jenis sambungan yang digunakan untuk mengakses sumber listrik itu. Di Kecamatan Pekalongan Timur, 84,01% keluarga memiliki sambungan listrik sendiri dan 14,34% keluarga mengakses listrik dari rumah lain (*nyalur*). Di Kecamatan Pekalongan Selatan, terdapat 82,52% keluarga yang menggunakan sambungan listrik sendiri untuk mengakses layanan listrik dan 15,54% keluarga yang mengaksesnya dari rumah lain. Peneliti berasumsi bahwa keluarga yang mengakses listrik dari rumah lain melakukannya secara legal, yakni pemilik rumah mengetahui bahwa listrik mereka digunakan oleh rumah lain dan untuk itu menerima pembayaran.

**Tabel 19. Sumber Penerangan Utama, 2008 (%)**

Jenis Sumber Penerangan Utama	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Listrik PLN	98,86	98,82
Listrik non-PLN ( <i>generator set</i> )	0,23	0,20
Petromaks	0,04	0,02
Lampu tempel/pelita/lampu minyak	0,26	0,29

Tabel 20 menunjukkan bahwa 72,43% keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan 65,54% keluarga di Kecamatan Pekalongan Selatan masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Di Kecamatan Pekalongan Selatan, jumlah keluarga yang menggunakan kayu bakar ternyata lebih tinggi daripada jumlah keluarga yang menggunakan elpiji atau gas alam cair. Keluarga-keluarga tersebut menjadi target Program Konversi Gas dari Pemerintah Pusat. Pemkot Pekalongan seharusnya berusaha mencari latar belakang yang dapat memberikan penjelasan atas data tersebut: apakah warga lebih memilih kayu bakar karena masalah ketersediaan elpiji, harga elpiji yang terlalu mahal, atau kesalahpahaman warga tentang elpiji yang membuat mereka takut menggunakannya.

**Tabel 20. Bahan Bakar untuk Memasak, 2008 (%)**

Jenis Bahan Bakar untuk Memasak	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Listrik	1,38	0,98
Gas/elpiji	14,27	9,85
Minyak tanah	72,43	65,54
Kayu bakar	10,75	22,67
Arang/Batubara	0,03	0,06

Infrastruktur kota berpengaruh pada keadaan ekonomi dan kesehatan penduduk. Pemkot Pekalongan berusaha untuk memelihara dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan layanan sanitasi. Tabel 21 memperlihatkan berbagai jenis material yang digunakan dalam pembangunan jalan di wilayah tempat rumah keluarga responden berada. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% keluarga tinggal di wilayah dengan infrastruktur yang baik. Persentase jalan dari tanah atau pasir lebih tinggi di Kecamatan Pekalongan Selatan dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Timur. Namun, jalan dari tanah atau pasir tersebar di setiap lingkungan keluarga yang tinggal di kedua kecamatan tersebut. Oleh karenanya, tidak ada lokasi yang spesifik yang dapat dikelompokkan sebagai tertinggal.

**Tabel 21. Material Jalan, 2008 (%)**

Jenis Material	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Aspal	58,82	58,31
Semen/ <i>conblock/cor/paving</i>	32,04	26,20
Kerikil/Batu diperkeras	2,57	3,49
Tanah/pasir	6,20	11,56

Untuk memastikan infrastruktur jalan berada dalam kondisi baik, Pemkot Pekalongan harus mengetahui ada tidaknya saluran air dan saluran limbah di sekitarnya. Persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur yang rumahnya ada di sepanjang jalan beraspal dan tidak memiliki saluran air atau saluran limbah adalah 2,52%, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Selatan jumlahnya 6,62%. Apabila tidak ditangani dengan hati-hati, limbah cair dapat menyebabkan erosi atau merusak jalan seiring dengan waktu, yang nantinya dapat berpengaruh pada anggaran publik.

Sebagai daerah yang berkomitmen pada program sanitasi, Pemkot Pekalongan harus memberikan perhatian kepada metode pembuangan sampah kota. Tabel 22 menunjukkan bahwa anggaran publik untuk pembuangan sampah yang diangkut oleh pekerja pemda secara langsung hanya mencakup 14,43% keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur dan 13,39% di Kecamatan Pekalongan Selatan. Persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur (35,18%) yang bersedia membayar pekerja untuk mengangkut sampah mereka 26,17% lebih tinggi daripada yang di Kecamatan Pekalongan Selatan (9,01%). Pekerja yang dibayar warga tersebut hanya mengangkut sampah sampai ke tempat pembuangan sementara atau TPS, lalu sampah itu akan diangkut oleh petugas pemda sampai ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang terletak di wilayah Kabupaten Pekalongan. Keluarga-keluarga di Kecamatan Pekalongan Selatan lebih memilih membakar sampah mereka padahal hal ini dapat mengurangi kualitas udara di kecamatan tersebut dan membahayakan kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Mereka yang memilih membakar sampah harus diberi peringatan supaya berhenti melakukan pembakaran sampah dan lebih menyadari pentingnya menjaga kualitas kesehatan mereka dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, perlu adanya intervensi Pemkot apabila ternyata masyarakat menjalankan praktik tersebut akibat kemampuan ekonomi mereka yang terbatas, yang menghalangi mereka mendapatkan akses ke lingkungan yang lebih baik.

**Tabel 22. Metode Pembuangan Sampah, 2008 (%)**

Metode Pembuangan Sampah	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Diangkut petugas pemda	14,43	13,39
Diangkut petugas yang dibayar warga	35,18	9,01
Dibuang sendiri ke TPA	17,35	10,22
Ditimbun	1,62	1,12
Dibuat kompos	0,48	0,46
Dibakar	25,78	62,24
Dibuang ke selokan/sungai	4,40	2,20
Dibuang sembarangan	0,39	0,96

Karakteristik keuangan di Kota Pekalongan dipertimbangkan dari empat aspek untuk melihat bagaimana keluarga mengelola kebutuhan keuangan mereka (lihat Tabel 23). Di kedua kecamatan, porsi keluarga yang mengakses lembaga keuangan formal lebih tinggi daripada yang mengakses lembaga keuangan informal atau perorangan. Peneliti mengasumsikan bahwa suatu keluarga mengakses lembaga keuangan formal apabila mereka perlu modal usaha atau membeli aset yang bernilai tinggi, seperti tanah, rumah, mobil, atau yang lainnya. Adapun suatu keluarga mengakses lembaga keuangan informal dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok ketika tidak memiliki cukup uang. Sekitar 19,02% keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur memiliki tabungan, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Selatan persentasenya sebesar 20,48%. Yang terakhir, persentase keluarga yang harus menjual harta mereka untuk membayar utang adalah 8,59% di Kecamatan Pekalongan Timur dan 10,75% di Kecamatan Pekalongan Selatan; jumlah yang relatif kecil.

**Tabel 23. Akses ke Lembaga Keuangan, 2008 (%)**

Akses ke Lembaga Keuangan	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Proporsi keluarga dengan akses ke lembaga keuangan formal	21,37	22,90
Proporsi keluarga dengan akses ke lembaga keuangan informal atau perorangan	0,11	0,15
Proporsi keluarga dengan tabungan di lembaga keuangan formal	19,02	20,48
Proporsi keluarga yang harus menjual harta benda untuk membayar utang	8,59	10,75

Lebih dari 60% keluarga di kedua kecamatan menggunakan uang mereka sendiri untuk mengakses fasilitas kesehatan. Jumlah keluarga yang menggunakan asuransi kesehatan atau mendapat penggantian untuk pengeluaran kesehatan dari pemberi kerja tidak banyak. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa kebanyakan kepala keluarga adalah buruh. Jika kita bandingkan persentase jumlah keluarga pengguna jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di kedua kecamatan, terdapat lebih banyak pengguna Jamkesmas di Kecamatan Pekalongan Timur (23,88%) daripada di Kecamatan Pekalongan Selatan (16,07%)

**Tabel 24. Sumber Keuangan Utama untuk Mengakses Fasilitas Kesehatan, 2008 (%)**

Sumber Keuangan	Kecamatan Pekalongan Timur	Kecamatan Pekalongan Selatan
Pribadi	69,98	79,70
Asuransi kesehatan	3,77	2,82
Askeskin <sup>a</sup> /JPKM <sup>b</sup> /Jamkesmas	23,88	16,07
Diganti kantor/perusahaan	1,06	0,54
Bantuan/pinjaman	0,97	0,49

<sup>a</sup>Asuransi kesehatan masyarakat miskin

<sup>b</sup>Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

### 4.3 Analisis Deskriptif: Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara

Sensus SPKOM dilanjutkan pada 2009 di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara. Kedua kecamatan ini memiliki jumlah penduduk lebih banyak daripada dengan dua kecamatan yang disensus pada 2008. Sensus 2009 mencakup 158.697 penduduk dari 41.651 keluarga di dua kecamatan ini. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri atas 13 kelurahan, sedangkan Kecamatan Pekalongan Utara 10 kelurahan. Kecamatan Pekalongan Utara menambah jumlah kelurahan dari 9 menjadi 10 kelurahan, dengan adanya pemekaran Kelurahan Panjang Baru.

Terdapat 22.095 keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3,8 orang. Sekitar 15,19% keluarga dikepalai oleh perempuan. Di Kecamatan Pekalongan Utara, terdapat 19.556 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 3,7 orang

per keluarga. Persentase keluarga yang dikepalai oleh perempuan sedikit lebih tinggi daripada Kecamatan Pekalongan Barat, yakni 15,24%.

**Tabel 25. Karakteristik Keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara, 2009**

Karakteristik	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Jumlah penduduk	84.919	73.778
Jumlah keluarga	22.095	19.556
Rata-rata jumlah anggota keluarga	3,84	3,77
Rasio jenis kelamin (perempuan:laki-laki)	50:50	50:50
Porsi kepala keluarga perempuan (%)	15,19%	15,24%

Data kepala keluarga dikelompokkan menjadi tiga kategori, berdasarkan usia kepala keluarga, yaitu kepala keluarga yang berusia di bawah 25 tahun, berusia antara 25 dan 65 tahun, dan kepala keluarga yang berusia di atas 65 tahun. Berdasarkan pengkategorian tersebut, ditemukan fakta bahwa sekitar 75% kepala keluarga yang berusia 25–65 tahun, yakni usia produktif, berstatus menikah. Rentang usia para kepala keluarga tersebut cukup besar, dengan kepala keluarga termuda berusia 18 tahun dan yang tertua berusia 104 tahun. Jika kita mempertimbangkan jumlah keluarga di kedua kecamatan, proporsi kepala keluarga yang berusia di bawah 25 tahun dan berstatus menikah di Kecamatan Pekalongan Utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Pekalongan Barat.

**Tabel 26. Usia dan Status Perkawinan Kepala Keluarga, 2009 (%)**

Usia Kepala Keluarga	Kecamatan Pekalongan Barat				Kecamatan Pekalongan Utara			
	Tidak menikah	Menikah	Cerai	Janda	Tidak menikah	Menikah	Cerai	Janda
<25 tahun	0,12	1,17	0,04	0,01	0,16	1,72	0,05	0,03
25–65 tahun	1,64	76,07	2,44	8,28	1,37	75,46	2,69	8,23
>65 tahun	0,10	5,15	0,16	3,05	0,10	4,67	0,15	3,27

Karakteristik lokasi Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan sektor pekerjaan kepala keluarga di kedua wilayah tersebut. Kecamatan Pekalongan Barat memiliki lebih banyak kepala keluarga yang minimal lulusan SLTA dan bekerja di sektor jasa. Sebagian besar universitas dan akademi lokal juga terdapat di kecamatan ini, dan kebanyakan pejabat pemkot yang pekerjaannya mensyaratkan lulus SLTA juga tinggal di sekitar wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Tabel 27 dan Tabel 28 akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini.

**Tabel 27. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kepala Keluarga, 2009 (%)**

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Tidak sekolah	4,41	6,77
Tidak lulus SD	10,44	11,13
Lulus SD	35,38	35,65
Lulus SLTP	15,18	16,16
≥ Lulus SLTA	32,91	28,19

Uraian berikutnya (lihat kembali Tabel 12) menunjukkan perbandingan antara data tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga dan kategori tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut kategori BPS. Berdasarkan data BPS mengenai tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas pada 2009, 6,7% warga berusia 10 tahun ke atas tidak pernah bersekolah, 21,58% tidak lulus SD, 29,16% lulus SD, 17,55% lulus SLTP, dan 25,01% lulus SLTA atau lebih. Tabel 27 menunjukkan bahwa persentase kepala keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara yang tidak pernah bersekolah dan tidak lulus SD lebih rendah daripada persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan yang sama di tingkat nasional. Selain itu, persentase kepala keluarga yang lulus SD dan SLTA lebih tinggi daripada persentase di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di Kota Pekalongan telah meningkat.

Kecamatan Pekalongan Utara terletak di bagian utara Kota Pekalongan dengan Laut Jawa sebagai batas administratif sebelah utara. Lokasi Kecamatan Pekalongan Utara membuat wilayah ini terkenal akan sektor perikanan, yang terdiri atas produksi perikanan kolam dan pengolahan ikan seperti pengasinan, perebusan, dan pengasapan ikan. Tabel 28 menunjukkan persentase kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian di Kecamatan Pekalongan Utara, termasuk perikanan, adalah 8,51%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Barat dan dua kecamatan lainnya (lihat Tabel 13). Di Kecamatan Pekalongan Utara juga terdapat sejumlah pabrik, termasuk pabrik garmen. Persentase kepala keluarga yang bekerja di sektor industri di kecamatan ini adalah 26,29%. Di sisi lain, Kecamatan Pekalongan Barat merupakan pusat pemerintahan Kota Pekalongan dengan Kantor Walikota, DPRD, dan berbagai dinas pemkot berlokasi di kecamatan ini. Persentase kepala keluarga bekerja di sektor jasa di wilayah ini adalah 47,10%.

**Tabel 28. Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga, 2009 (%)**

Sektor Pekerjaan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Pertanian	1,22	8,15
Industri	25,95	26,29
Perdagangan	11,40	9,02
Jasa	47,10	42,85
Menerima transfer/pengangguran	4,30	4,01
Lainnya	4,33	2,58

Pola konsumsi keluarga di kedua kecamatan dapat dilihat dari Tabel 29 yang memberikan informasi mengenai frekuensi makan suatu keluarga dalam sehari dan konsumsi daging, ikan, telur, dan susu keluarga tersebut dalam seminggu.

**Tabel 29. Pola Konsumsi Makanan, 2009 (%)**

Pola Konsumsi	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Proporsi keluarga yang anggota keluarganya makan sedikitnya tiga kali sehari	92,32	92,13
Proporsi keluarga yang mengonsumsi daging minimal sekali dalam seminggu	51,46	45,70
Proporsi keluarga yang mengonsumsi telur minimal sekali dalam seminggu	77,23	76,42
Proporsi keluarga yang mengonsumsi ikan minimal sekali dalam seminggu	70,32	78,81
Proporsi keluarga yang mengonsumsi susu minimal sekali dalam seminggu	51,84	51,94

Secara umum, pola konsumsi keluarga di kedua kecamatan cukup baik. Hampir setiap keluarga makan setidaknya tiga kali sehari. Tingkat konsumsi rutin ikan juga relatif tinggi pada keluarga-keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara mengingat wilayah ini terletak di kawasan pesisir. Dibandingkan dengan konsumsi daging, konsumsi ikan di kedua kecamatan tersebut juga relatif tinggi.

Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara menerima berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemkot Pekalongan. Tolok ukur program pemkot yang sudah ada adalah Program Perbaikan Permukiman dan Lingkungan, yang terdiri atas plesterisasi, jambanisasi, sumurisasi, dan perbaikan rumah.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, warga di kecamatan ini cenderung lebih rawan mengingat mereka adalah nelayan dan buruh industri perikanan atau garmen. Oleh karena itu, jumlah penerima Raskin, Jamkesmas, dan BLT di Kecamatan Pekalongan Utara lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Barat.

Tingkat ketercakupan sumurisasi di Kecamatan Pekalongan Utara adalah 1,63% atau 0,68% lebih rendah dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Barat. Efektivitas program ini akan menghadapi masalah lingkungan di kawasan pesisir, seperti degradasi air laut. Degradasi air laut menjadi sumber keprihatinan warga Kecamatan Pekalongan Utara, terutama di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Krapyak Lor, dan Kelurahan Degayu. Karena tingkat degradasi yang terjadi cukup parah, sumurisasi bukan merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan layanan sanitasi untuk warga.

Lebih dari 50% keluarga di kedua kecamatan memiliki rumah sendiri. Namun, persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara yang tinggal dengan keluarga lain relatif tinggi. Sebagian besar keluarga yang tinggal bersama keluarga lain ini adalah pasangan muda. Hal ini diverifikasi oleh Tabel 26 yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Pekalongan Utara terdapat lebih banyak keluarga dengan kepala keluarga berusia di bawah 25 tahun yang berstatus menikah (1,72%) dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Barat (1,17%).

**Tabel 30. Status Kepemilikan Rumah, 2009 (%)**

Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Rumah milik sendiri	58,35	58,78
Warisan yang belum dibagi	20,26	17,70
Sewa/kontrak	4,38	4,07
Rumah dinas	0,97	1,48
Pinjam/milik keluarga	7,00	5,03
Menumpang keluarga lain	8,89	12,66

Karena Kecamatan Pekalongan Barat merupakan pusat pemerintahan daerah, permukiman di sekitarnya relatif teratur dan tertata dengan baik, seperti kompleks perumahan. Sebaliknya, permukiman di Kecamatan Pekalongan Utara padat dan kurang tertata, seperti kawasan perumahan di desa. Persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat yang tinggal di rumah berlantai marmer/keramik (53,28%) jauh lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang tinggal di rumah berlantai kayu (0,08%) atau bambu (0,04).

**Tabel 31. Material Lantai Terluas, 2009 (%)**

Jenis Material	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Marmer/keramik/teraso	53,28	51,41
Ubin/tegel	18,52	19,91
Plester/semen	22,33	22,09
Kayu	0,08	0,10
Bambu	0,04	0,07
Tanah	4,15	4,97

**Tabel 32. Keluarga Pengguna Fasilitas WC, 2009 (%)**

Fasilitas WC	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Menggunakan WC sendiri	84,61	69,79
Menggunakan WC umum	8,69	14,80
Memfaatkan sungai/saluran air	4,20	12,71
Menggunakan WC keluarga lain	1,34	1,04

Persentase keluarga yang memiliki WC di rumah adalah 84,61% di Kecamatan Pekalongan Barat dan 69,79% di Kecamatan Pekalongan Utara. Karena warga di kawasan pesisir sulit memperoleh air tanah berkualitas baik, keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara mengandalkan WC umum. Sebanyak 12,71% keluarga yang tidak memiliki akses ke WC umum masih menggunakan sungai atau saluran air atau sistem drainase sawah untuk fasilitas WC.

**Tabel 33. Sumber Air Minum, 2009 (%)**

Sumber Air Minum	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Air minum dalam kemasan	5,18	4,65
Air minum isi ulang	5,27	4,13
Air PDAM/air ledeng	29,41	54,06
Sumur terlindung/sumur bor	33,73	18,29
Sumur tidak terlindung	23,99	11,56
Air sungai /air hujan	0,07	0,06
Sumur umum	2,10	6,16

Tidak tersedianya sumber air tanah yang bagus di Kecamatan Pekalongan Utara dikompensasi dengan penyediaan air PDAM/air ledeng. Persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara yang menggunakan fasilitas ini sebanyak 54,06%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Pekalongan Barat. Meski demikian, beberapa dari keluarga ini bukan pelanggan layanan PDAM. Mereka mengakses air PDAM dari tetangga atau keluarga lain yang tinggal dekat dengan mereka atau membeli dari pedagang air di lingkungan mereka. Sekitar 30% keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat memiliki akses ke sumur terlindung/sumur bor yang berarti mereka masih bisa mengandalkan ketersediaan sumber air tanah.

Kebanyakan keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama, dengan persentase masing-masing sebesar 95,96% dan 95,42%. Di Kecamatan Pekalongan Barat, 80,02% keluarga memiliki sambungan PLN sendiri dan 15,73% keluarga mengakses listrik dari rumah lain. Jumlah keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara yang memiliki sambungan PLN sendiri adalah 78,08%, sedangkan 17,20% keluarga mengakses listrik dari rumah lain. Sekitar 50% keluarga di kedua kecamatan menjadi pelanggan PLN, memiliki sambungan sendiri, dan menggunakan voltase 450 watt untuk keperluan sehari-hari.

**Tabel 34. Sumber Penerangan Utama, 2009 (%)**

Jenis Sumber Penerangan Utama	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Listrik PLN	95,96	95,42
Listrik non-PLN ( <i>generator set</i> )	2,43	2,64
Petromaks	0,64	0,71
Lampu tempel/lampu minyak	0,44	0,52

Kesalahan dalam pengisian kotak pertanyaan ketika proses entri data (lihat subbab 3.4 Proses Pembersihan Data) menyebabkan informasi mengenai bahan bakar yang digunakan untuk memasak oleh rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara memiliki sekitar 22% data yang hilang (*missing values*) dari total rumah tangga di kedua kecamatan tersebut. Namun, Tabel 35 menunjukkan bahwa lebih dari 50% rumah tangga di kedua kecamatan masih menggunakan minyak tanah. Tingkat penggunaan minyak tanah untuk memasak ini tidak jauh berbeda dengan mayoritas rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Pada Mei 2009 Pemkot Pekalongan melaksanakan program

konversi minyak tanah ke gas/elpiji. Program ini membagikan bantuan kompor serta tabung gas 3 kilogram untuk menggantikan penggunaan minyak tanah. Ketika sensus SPKOM 2009 dilakukan pada awal bulan Agustus, masih sedikit warga yang beralih menggunakan elpiji karena mereka khawatir dengan terjadinya kasus ledakan tabung elpiji yang didapat dari program bantuan konversi gas di berbagai daerah.

**Tabel 35. Bahan Bakar untuk Memasak, 2009 (%)**

Jenis	Kecamatan Pekalongan Barat <sup>a</sup>	Kecamatan Pekalongan Utara <sup>b</sup>
Listrik	1,78	1,38
Gas/elpiji	18,33	12,79
Minyak tanah	51,37	53,87
Kayu bakar	6,53	8,75
Arang/batubara	0,03	0,02

<sup>a</sup>terhitung dengan 21,78% data yang hilang.

<sup>b</sup>terhitung dengan 23,05% data yang hilang.

Berdasarkan kondisi infrastruktur di dua kecamatan yang menjadi subjek SPKOM 2009, persentase aspal yang dipakai sebagai material jalan di kawasan perumahan keluarga adalah 48,45% di Kecamatan Pekalongan Barat dan 49,05% di Kecamatan Pekalongan Utara. Bukan hal yang mudah untuk menjaga kualitas jalan aspal di Kecamatan Pekalongan Utara karena degradasi air laut yang terjadi cukup serius.

**Tabel 36. Material Jalan, 2009 (%)**

Jenis Material	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Aspal	48,45	49,05
Semen/ <i>conblock/cor/paving</i>	37,31	35,94
Kerikil/Batu diperkeras	3,44	5,37
Tanah/pasir	5,73	4,29

**Tabel 37. Metode Pembuangan Sampah, 2009 (%)**

Metode	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Diangkut petugas pemda	11,58	5,97
Diangkut petugas yang dibayar warga	36,72	35,96
Dibuang oleh warga ke tempat pembuangan akhir	11,02	16,58
Ditimbun	1,68	1,74
Dibuat kompos	0,33	0,52
Dibakar	35,24	28,84
Dibuang ke selokan/sungai	2,80	6,99
Dibuang sembarangan	0,16	2,68

Persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat yang bersedia membayar pekerja untuk mengangkut sampah mereka sebesar 36,72%, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara 35,96%. Cukup banyak keluarga yang memilih membakar sampahnya alih-alih menggunakan metode pembuangan sampah yang lain. Yang tidak terduga adalah tingginya persentase keluarga yang memilih membakar sampah mereka di Kecamatan Pekalongan Barat, yakni 35,24%. Jumlah keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara yang membuang sampah sembarangan dan membuang ke saluran air/sungai juga relatif tinggi, yakni sekitar 2,68% dan 6,99%.

Studi yang dilakukan oleh Center for Policy and Implementation Studies (CPIS) pada 1992 memberikan solusi penanganan sampah yang mungkin dapat dicontoh oleh Pemkot Pekalongan. Solusinya adalah dengan menjalankan suatu model usaha dengan dua jenis kegiatan untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah pasar secara terpadu, yaitu dengan mendaur ulang barang bekas dan pembuatan kompos (CPIS, 1992). Mendaur ulang barang bekas dapat menghasilkan manfaat ekonomi, yakni menjadikan barang-barang bekas kembali bermanfaat atau menjualnya kembali. Pengomposan atau pembuatan kompos, yang merupakan proses biologis yang terjadi karena adanya kegiatan jasad renik, juga memberikan banyak faedah. Pengomposan dapat membuka lapangan kerja, menghemat tempat pembuangan sampah akhir, menghemat biaya pembuangan sampah, meningkatkan kesehatan lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan, dan membantu melestarikan sumber daya alami.

Karena perbedaan format/bentuk entri data pada SPKOM 2008 dan 2009 (lihat subbab 3.4 Proses Pembersihan Data), terdapat selisih yang cukup besar antara akses keluarga ke lembaga keuangan informal atau perorangan di kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah sensus pada 2008 dan di kecamatan-kecamatan sensus pada 2009. Permasalahan tersebut menyebabkan persentase keluarga yang mengakses lembaga keuangan informal atau perorangan pada 2008 kurang dari 1% sedangkan pada 2009 lebih dari 10% keluarga. Persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat yang menyimpan uang di lembaga formal, seperti bank, BPR, koperasi, atau organisasi mikrokredit, mencapai 5,46% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara. Persentase keluarga yang harus menjual harta benda untuk membayar utang di kedua kecamatan hampir sama.

**Tabel 38. Akses ke Lembaga Keuangan, 2009 (%)**

Akses ke Lembaga Keuangan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Proporsi keluarga dengan akses ke lembaga keuangan formal	17,04	16,53
Proporsi keluarga dengan akses ke lembaga keuangan informal atau perorangan	13,22	14,03
Proporsi keluarga dengan tabungan di lembaga keuangan formal	21,72	16,26
Proporsi keluarga yang harus menjual harta benda untuk membayar utang	8,73	8,48

**Tabel 39. Sumber Keuangan Utama untuk Mengakses Fasilitas Kesehatan, 2009 (%)**

Sumber Keuangan	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Utara
Pribadi	73,05	66,12
Asuransi kesehatan	10,18	10,38
Askeskin/JPKM/Jamkesmas	13,86	20,80
Diganti kantor/perusahaan	1,59	1,22
Bantuan/pinjaman	0,67	0,62

Tabel 39 menunjukkan pola konsumsi keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara untuk urusan kesehatan yang menunjukkan bahwa banyak keluarga yang masih menggunakan uang mereka sendiri sebagai sumber keuangan utama untuk mengakses fasilitas kesehatan. Ada 73,05% keluarga di Kecamatan Pekalongan Barat dan 66,12% keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara yang menggunakan uang mereka sendiri ketika mengalami masalah kesehatan. Jumlah keluarga yang menggunakan Jamkesmas relatif tinggi di Kecamatan Pekalongan Utara, yakni sekitar 20,80%.

## 4.4 Hasil PCA

Pengukur kesejahteraan keluarga idealnya menggunakan data pendapatan, konsumsi, atau pengeluaran setiap keluarga. Namun, mengumpulkan data tersebut, khususnya data keluarga dalam jumlah besar, sulit dilakukan terkait waktu dan pendanaan. Masalah lain adalah keandalan data. Bisa saja suatu keluarga melebihkan atau mengurangi pengeluaran atau pendapatan yang sebenarnya ketika diwawancarai. Dengan menggunakan metode PCA, kesejahteraan keluarga diperkirakan berdasarkan informasi mengenai kepemilikan harta benda, seperti kepemilikan rumah, keadaan rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain lain. Hal ini merupakan alternatif dari mendata rincian pengeluaran konsumsi. Metode PCA juga memungkinkan peneliti untuk menentukan indikator-indikator kesejahteraan yang sifatnya khusus di suatu daerah.

Dalam laporan ini, peneliti memberikan informasi mengenai peringkat kesejahteraan setiap kecamatan di Kota Pekalongan. Namun, data yang tersedia dan digunakan pada analisis ini kurang dari yang seharusnya bisa diperoleh dari setiap kecamatan sampel karena ada data yang hilang dan ada yang tidak tersedia. PCA pada STATA hanya bisa menghitung keluarga/kuesioner yang di dalamnya tidak ada data yang hilang dalam daftar variabel yang digunakan.

Melalui PCA, bisa juga dilakukan pemeringkatan 10 indikator kesejahteraan tertinggi yang relevan untuk menjelaskan peringkat kesejahteraan suatu keluarga. Angka negatif suatu variabel mengindikasikan bahwa variabel itu cenderung mengurangi peringkat kesejahteraan keluarga, sedangkan angka positif mengindikasikan bahwa variabel itu menaikkan peringkat kesejahteraan suatu keluarga.

### 4.4.1 Hasil PCA: Profil Kemiskinan di Kecamatan Pekalongan Timur

Tabel 40 menampilkan 17 indikator dengan koefisien tertinggi dari sekitar 64 indikator kesejahteraan di Kecamatan Pekalongan Timur. Sembilan dari 17 indikator tertinggi yang ditampilkan dalam tabel tersebut mayoritas berhubungan dengan kepemilikan harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta benda, khususnya kepemilikan barang elektronik atau

kendaraan bermotor, merupakan pembeda kesejahteraan terbaik antara keluarga yang satu dan yang lain.

Hanya satu indikator yang mewakili variabel mengenai sektor kerja kepala keluarga, yakni pekerjaan di sektor industri—khususnya industri batik. Meskipun sektor industri adalah sektor yang membuka lapangan pekerjaan terbanyak di Kota Pekalongan, tren yang ditemui negatif. Hal ini berarti bahwa mereka yang bekerja di sektor industri cenderung miskin. Keluarga yang pendidikan tertinggi kepala keluarganya adalah SD juga cenderung miskin. Temuan menarik lainnya terkait dengan kepemilikan kompor gas. Lebih dari 50% keluarga di Kecamatan Pekalongan Timur masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Hal serupa dapat ditemui juga di Kecamatan Pekalongan Selatan (lihat Tabel 42).

**Tabel 40. Tujuh belas Indikator Kesejahteraan dengan Peringkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Timur**

Variabel	Nilai	Peringkat
Kepala keluarga bekerja di sektor industri	-0,29	1
Memiliki lemari es	0,27	2
Memiliki kompor gas	0,26	3
Memiliki telepon genggam	0,24	4
Memiliki sepeda motor	0,24	5
Memiliki kipas angin	0,22	6
Memiliki sambungan telepon permanen	0,22	7
Membaca koran atau majalah	0,20	8
Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	0,20	9
Memiliki tabungan	0,20	10
Memiliki mobil	0,18	11
Memiliki komputer	0,18	12
Memiliki pemutar DVD	0,18	13
Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	0,18	14
Menggunakan WC pribadi	0,17	15
Pendidikan kepala keluarga: SD	-0,16	16
Memiliki AC <sup>a</sup>	0,16	17

<sup>a</sup>Air conditioner atau pendingin ruangan.

Tabel 41 menampilkan karakteristik 10% keluarga termiskin dan 10% keluarga terkaya untuk membuktikan memang benar terdapat perbedaan yang signifikan antarkelompok tersebut. Pada 10% keluarga termiskin tidak ada yang memiliki lemari es, kompor gas, atau komputer. Sebaliknya, sebagian besar keluarga kaya memiliki ketiga benda tersebut. Hanya sebagian kecil dari keluarga miskin yang memiliki sambungan telepon permanen, telepon genggam, sepeda motor, atau kipas angin. Persentase kepala keluarga dari keluarga miskin yang bekerja pada sektor industri adalah 65,09%, sedangkan dari keluarga terkaya adalah 2,54%.

Dalam hal pendidikan, 65,70% kepala keluarga dari keluarga miskin lulus SD. Persentase keluarga miskin yang berpendidikan tinggi menurun dan akhirnya mencapai angka nol untuk jenjang pendidikan diploma atau sarjana. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin bahkan semakin

lebar untuk tingkat pendidikan pasangan (suami atau istri). Pada keluarga terkaya, sekitar 50% dari suami atau istri adalah lulusan SLTA, sedangkan pada keluarga termiskin, sebagian besar pasangannya hanya lulus SD.

Sekitar 84,14% kepala keluarga dari kelompok keluarga terkaya bekerja di sektor jasa; 38,65% dari pasangan (suami atau istri) kepala keluarga pada kelompok ini juga bekerja. Sebaliknya, lebih dari 50% kepala keluarga dari keluarga termiskin bekerja di sektor industri; sebagian besar dari mereka menjadi buruh. Dibandingkan dengan keluarga terkaya, persentase pasangan kepala keluarga pada keluarga miskin yang bekerja sedikit lebih tinggi, yakni 41,84%.

Dalam hal pola konsumsi makanan, kelompok keluarga termiskin cenderung makan kurang dari tiga kali sehari. Persentase keluarga termiskin yang mengonsumsi telur setidaknya satu kali seminggu adalah 38,68%, yang mengonsumsi daging sekali dalam seminggu 9,74%, yang mengonsumsi ikan sekali dalam seminggu 45,09%, dan hanya 14,39% yang minum susu sekali dalam seminggu.

Tidak ada perbedaan signifikan antara pemanfaatan fasilitas perawatan medis modern oleh keluarga terkaya dan pemanfaatan fasilitas tersebut oleh keluarga termiskin. Pola yang sama ditemukan pada keluarga yang mengalami kematian bayi selama tiga tahun terakhir. Persentase keluarga terkaya yang menggunakan fasilitas WC pribadi dan sumber air minum terlindung adalah 99,74% dan 90,88% jauh lebih tinggi daripada penggunaan fasilitas tersebut pada keluarga termiskin, yakni 33,60% dan 24,65%. Namun, 1,40% keluarga terkaya masih tinggal di rumah berlantai tanah.

Dilihat dari segi akses ke lembaga keuangan formal, 67,05% dari keluarga terkaya memiliki tabungan, sedangkan hanya 1,05% keluarga termiskin yang memiliki tabungan. Selama tiga tahun terakhir, 11,83% keluarga terkaya memiliki pinjaman pada lembaga keuangan formal; dan tidak ada yang memiliki utang pinjaman pada lembaga keuangan informal atau dari perorangan. Persentase keluarga yang harus menjual harta benda untuk membayar utang lebih tinggi pada keluarga termiskin, umumnya mereka melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pasokan listrik dapat diakses penduduk di kota sehingga baik penduduk yang kaya maupun yang miskin sama-sama memiliki akses atas listrik. Meskipun sebagian besar keluarga terkaya memiliki akses ke koran dan majalah karena mereka mampu membeli atau berlangganan terbitan tersebut, hanya 1,84% keluarga miskin yang memiliki akses ke sumber informasi itu.

**Tabel 41. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Timur**

Kelompok Variabel	Variabel	Proporsi 10% Keluarga Termiskin (%)	Proporsi 10% Keluarga Terkaya (%)
Status perkawinan	Kepala keluarga berstatus menikah	100	100
Jenis kelamin kepala keluarga	Kepala keluarga perempuan	0,18	0,18
Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya	Pendidikan kepala keluarga: tidak bersekolah	18,16	0,35
	Pendidikan kepala keluarga: SD	65,70	2,02
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	9,21	8,41
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	2,11	53,29

	Pendidikan kepala keluarga: diploma	0	10,96
	Pendidikan kepala keluarga: sarjana	0	23,14
	Pendidikan pasangan: tidak sekolah	18,07	0,44
	Pendidikan pasangan: SD	64,74	2,89
	Pendidikan pasangan: SLTP	9,56	10,78
	Pendidikan pasangan: SLTA	1,32	51,53
	Pendidikan pasangan: diploma	0	14,46
	Pendidikan pasangan: sarjana	0	18,32
Sektor pekerjaan kepala keluarga	Kepala keluarga di sektor pertanian	3,68	0,79
	Kepala keluarga di sektor industri	65,09	2,54
	Kepala keluarga di sektor perdagangan	4,56	9,82
	Kepala keluarga di sektor jasa	19,39	84,14
	Kepala keluarga menerima transfer (pengangguran/pensiunan)	4,12	0,53
	Kepala keluarga di sektor lain	3,16	2,19
Pekerjaan	Kepala keluarga bekerja	94,12	93,25
	Pasangan bekerja	41,84	38,65
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang bekerja	5,70	0,18
Konsumsi makanan	Makan tiga kali sehari	88,16	97,11
	Makan telur setidaknya sekali dalam seminggu	38,68	96,23
	Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	9,74	94,48
	Makan ikan setidaknya sekali dalam seminggu	45,09	90,45
	Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	14,39	92,38
Kepemilikan harta benda	Memiliki radio	26,32	78,35
	Memiliki TV hitam putih	3,07	2,28
	Memiliki TV berwarna	36,14	99,21
	Memiliki lemari es	0	95,88
	Memiliki sambungan telepon permanen	1,05	78,00
	Memiliki telepon genggam	2,81	97,72
	Memiliki kompor gas	0	86,24
	Memiliki pemutar DVD	7,19	86,85
	Memiliki kipas angin	5,09	92,99
	Memiliki komputer	0	49,26
	Memiliki <i>tape recorder</i>	0,79	27,87
	Memiliki AC	0,09	37,16
	Memiliki sepeda	68,07	64,86
	Memiliki sepeda motor	4,56	95,62
Memiliki mobil	0,09	47,77	

	Memiliki perahu	0	0,70
	Memiliki perahu motor	0	0,44
	Memiliki rumah	42,72	72,48
Kepemilikan hewan ternak	Memiliki sapi	0,09	0,79
	Memiliki kambing	0,44	0,96
	Memiliki ayam	8,51	3,16
Indikator kesehatan	Menggunakan WC pribadi	33,60	99,74
	Tinggal di rumah berlantai tanah	45,61	1,40
	Minum air dari sumber yang terlindung	24,65	90,80
	Mencari perawatan medis modern saat sakit	89,47	93,34
	Mengalami kematian bayi dalam tiga tahun terakhir	4,21	2,19
Indikator kesejahteraan lain	Menggunakan sumber penerangan listrik	95,35	99,82
	Mayoritas anggota keluarga membeli baju baru dalam setahun terakhir	80,79	98,95
	Membaca koran atau majalah	1,84	77,13
	Menjadi korban kejahatan tahun lalu	1,32	2,45
	Aktif di organisasi lingkungan rumah	10,61	34,18
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang putus sekolah	17,11	1,23
	Rasio ketergantungan yang tinggi (lebih dari separuh anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)	9,39	8,41
Akses ke lembaga keuangan	Memiliki tabungan	1,05	67,05
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal	32,81	11,83
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan informal	0,44	0
	Harus menjual harta benda untuk melunasi utang	12,81	4,56

#### 4.4.2 Hasil PCA: Profil Kemiskinan di Kecamatan Pekalongan Selatan

Dari 17 indikator kesejahteraan yang ada pada Tabel 42, variabel yang paling positif adalah kepemilikan lemari es dan yang paling negatif adalah kepala keluarga yang bekerja di sektor industri. Indikator-indikator kesejahteraan di Kecamatan Pekalongan Selatan sebagian besar sama dengan indikator-indikator di Kecamatan Pekalongan Timur. Dua indikator kesejahteraan dengan koefisien tertinggi yang membedakan Kecamatan Pekalongan Selatan dari Kecamatan Pekalongan Timur adalah kepemilikan TV berwarna dan kepemilikan radio. Tren sektor pekerjaan kepala keluarga juga negatif, meskipun koefisien variabel ini untuk Kecamatan Pekalongan Selatan relatif kecil dibandingkan dengan Kecamatan Pekalongan Timur. Indikator kesejahteraan seperti kepemilikan lemari es dan kompor gas mendapat peringkat satu dan dua.

Berdasarkan nilai kesejahteraan setiap keluarga, kami mengisolasi 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin. Tabel 43 menampilkan karakteristik 10% keluarga terkaya yang dibandingkan dengan karakteristik 10% keluarga termiskin berdasarkan 64 indikator kesejahteraan. Keluarga miskin tidak memiliki kompor gas, komputer, AC, atau mobil sebagai

harta benda mereka. Mereka juga cenderung tidak memiliki lemari es, telepon genggam, pemutar DVD, kipas angin, atau sepeda motor.

Berkaitan dengan sektor pekerjaan kepala keluarga atau pasangan/istri, pola yang tampak di Kecamatan Pekalongan Selatan tidak berbeda dengan yang ditemukan di Kecamatan Pekalongan Timur. Persentase kepala keluarga dari keluarga termiskin yang bekerja di sektor industri adalah 67,66%, sedangkan hampir 63,49% keluarga terkaya bekerja di sektor jasa. Persentase pasangan yang bekerja relatif tidak berbeda antara keluarga termiskin dan keluarga terkaya, yakni 43,63% dan 48%.

**Tabel 42. Tujuh Belas Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Selatan**

Variabel	Nilai	Peringkat
Memiliki lemari es	0,28	1
Memiliki kompor gas	0,26	2
Kepala keluarga bekerja di sektor industri	-0,24	3
Memiliki kipas angin	0,24	4
Memiliki telepon genggam	0,24	5
Memiliki sepeda motor	0,23	6
Memiliki sambungan telepon permanen	0,23	7
Memiliki komputer	0,21	8
Memiliki tabungan	0,21	9
Memiliki mobil	0,20	10
Membaca koran atau majalah	0,20	11
Memiliki pemutar DVD	0,20	12
Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	0,20	13
Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	0,17	14
Memiliki TV berwarna	0,16	15
Memiliki radio	0,15	16
Pendidikan kepala keluarga: SD	-0,14	17

Lebih banyak kepala keluarga dari keluarga terkaya yang lulus SLTA dibandingkan dengan kepala keluarga dari keluarga termiskin. Sekitar 69,40% kepala keluarga dari keluarga termiskin hanya lulus SD. Persentase tertinggi untuk tingkat pendidikan pasangan/istri dari keluarga termiskin adalah 66,12% (lulus SD).

Dari segi konsumsi makanan, 98,26% keluarga terkaya makan tiga kali sehari, sedangkan hanya 92,81% keluarga termiskin yang makan tiga kali sehari. Persentase keluarga yang mengonsumsi telur setidaknya satu kali dalam seminggu pada keluarga terkaya dan keluarga termiskin adalah 93,74% dan 33,57% masing-masing.

**Tabel 43. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Selatan**

Kelompok Variabel	Variabel	Proporsi 10% Keluarga Termiskin (%)	Proporsi 10% Keluarga Terkaya (%)
Status perkawinan	Kepala keluarga berstatus menikah	100	100
Jenis kelamin kepala keluarga	Kepala keluarga perempuan	0	0
Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya	Pendidikan kepala keluarga: tidak sekolah	16,22	1,64
	Pendidikan kepala keluarga: SD	69,40	10,97
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	7,70	15,90
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	0,72	39,59
	Pendidikan kepala keluarga: diploma	0	9,85
	Pendidikan kepala keluarga: sarjana	0	20,10
	Pendidikan pasangan: tidak bersekolah	15,71	1,64
	Pendidikan pasangan: SD	66,12	11,49
	Pendidikan pasangan: SLTP	10,37	18,26
	Pendidikan pasangan: SLTA	1,03	39,79
	Pendidikan pasangan: diploma	0	10,46
	Pendidikan pasangan: sarjana	0	16,10
Sektor pekerjaan kepala keluarga	Kepala keluarga di sektor pertanian	4,93	1,03
	Kepala keluarga di sektor industri	67,66	10,46
	Kepala keluarga di sektor perdagangan	4,62	17,64
	Kepala keluarga di sektor jasa	18,69	63,49
	Kepala keluarga menerima transfer (pengangguran/pensiunan)	1,95	0,41
	Kepala keluarga di sektor lain	2,16	6,97
Pekerjaan	Kepala keluarga bekerja	97,02	93,85
	Pasangan/Istri bekerja	43,63	48,00
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang bekerja	6,57	0,21
Konsumsi makanan	Makan tiga kali sehari	92,81	98,26
	Makan telur setidaknya sekali dalam seminggu	33,57	93,74
	Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	7,49	90,77
	Makan ikan setidaknya sekali dalam seminggu	38,19	85,85
	Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	10,37	85,33
Kepemilikan harta benda	Memiliki radio	25,05	89,74
	Memiliki TV hitam putih	1,64	2,05
	Memiliki TV berwarna	30,80	98,05
	Memiliki lemari es	0,10	88,82
	Memiliki sambungan telepon permanen	0,51	69,64

	Memiliki telepon genggam	6,06	97,03
	Memiliki kompor gas	0	75,59
	Memiliki pemutar DVD	3,59	83,18
	Memiliki kipas angin	2,46	92,00
	Memiliki komputer	0	46,26
	Memiliki <i>tape recorder</i>	0,31	29,03
	Memiliki AC	0	19,08
	Memiliki sepeda	71,36	85,03
	Memiliki sepeda motor	6,57	97,85
	Memiliki mobil	0	45,44
	Memiliki perahu	0	0,31
	Memiliki perahu motor	0	0,31
	Memiliki rumah	49,79	82,77
Kepemilikan hewan ternak	Memiliki sapi	0,21	1,54
	Memiliki kambing	2,05	1,44
	Memiliki ayam	13,76	8,51
Indikator kesehatan	Menggunakan WC pribadi	59,55	99,69
	Tinggal di rumah berlantai tanah	48,67	0,92
	Minum air dari sumber yang terlindung	16,63	74,26
	Mencari perawatan medis modern saat sakit	88,50	88,41
	Mengalami kematian bayi dalam tiga tahun terakhir	2,77	3,69
Indikator kesejahteraan lain	Menggunakan sumber penerangan listrik	95,79	99,69
	Mayoritas anggota keluarga membeli baju baru dalam setahun terakhir	84,60	99,69
	Membaca koran atau majalah	1,54	68,00
	Menjadi korban kejahatan tahun lalu	0,31	5,13
	Aktif di organisasi lingkungan rumah	9,75	47,69
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang putus sekolah	16,63	1,33
	Rasio ketergantungan yang tinggi (lebih dari separuh anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)	10,88	10,46
Akses ke lembaga keuangan	Memiliki tabungan	1,03	68,82
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal	24,64	25,03
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan informal	0,82	0
	Harus menjual harta benda untuk melunasi utang	10,99	7,38

Tidak ada perbedaan signifikan antara keluarga terkaya dan keluarga termiskin dalam hal pemanfaatan perawatan kesehatan modern. Namun, persentase keluarga yang mengalami kematian bayi selama tiga tahun terakhir lebih tinggi pada keluarga terkaya, dan masih ada 0,92% dari keluarga terkaya yang tinggal di rumah berlantai tanah. Persentase keluarga terkaya yang memiliki WC pribadi adalah 99,69%, sedangkan keluarga miskin yang memiliki WC pribadi adalah 59,55%. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Pekalongan Timur, secara umum penggunaan WC

pribadi di Kecamatan Pekalongan Selatan lebih tinggi, baik pada keluarga terkaya maupun pada keluarga termiskin. Persentase keluarga terkaya yang minum air dari sumber terlindung adalah 74,26%, sedangkan pada keluarga termiskin 16,63%.

Persentase keluarga terkaya yang memiliki tabungan adalah 68,82%, sedangkan pada keluarga termiskin hanya 1,03% yang memiliki tabungan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepemilikan utang/pinjaman dari lembaga keuangan formal dan informal di masing-masing kelompok. Persentase keluarga terkaya yang mengakses kredit dari lembaga keuangan formal 25,03% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengakses kredit informal. Persentase keluarga termiskin yang mengakses kredit dari lembaga keuangan formal adalah 24,64% dan yang mengakses kredit informal sebesar 0,82%.

Persentase kelompok keluarga terkaya yang mampu membeli baju baru selama satu tahun terakhir adalah 99,69% dan untuk keluarga termiskin sebesar 84,60%, yang sebenarnya relatif tinggi. Persentase keluarga kaya yang berperan aktif dalam organisasi lingkungan, termasuk menjadi pejabat RT atau RW atau sebagai anggota Karang Taruna, sekitar 47,69%. Di sisi lain, persentase keluarga termiskin yang aktif di organisasi lingkungan hanya 9,75%. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena keluarga termiskin memanfaatkan waktu mereka untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Persentase keluarga terkaya yang mengakses informasi dari koran atau majalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase keluarga termiskin. Berkaitan dengan tingkat kejahatan, pola serupa pun muncul. Persentase keluarga terkaya yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi daripada persentase keluarga termiskin. Hal ini karena keluarga terkaya, berdasarkan fakta, mempunyai lebih banyak harta benda.

#### 4.4.3 Hasil PCA: Profil Kemiskinan di Kecamatan Pekalongan Barat

Dari Tabel 44 kita bisa melihat bahwa keluarga dengan kepala keluarga yang bekerja di sektor industri cenderung miskin. Sebaliknya, kepemilikan lemari es dan kompor gas mengindikasikan besarnya kemungkinan bahwa suatu keluarga tergolong kaya. Keberadaan keluarga yang mengakses informasi melalui koran atau majalah juga memberikan kontribusi bagi tingkat kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, keluarga yang bisa mengakses informasi, berlangganan koran atau majalah, atau cenderung membaca koran dan majalah akan dimasukkan ke dalam kategori keluarga yang relatif kaya.

**Tabel 44. Tujuh Belas Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Barat**

Variabel	Nilai	Peringkat
Kepala keluarga bekerja di sektor industri	-0,31	1
Memiliki lemari es	0,26	2
Memiliki kompor gas	0,25	3
Memiliki komputer	0,23	4
Memiliki kipas angin	0,22	5
Memiliki sepeda motor	0,21	6
Memiliki tabungan	0,21	7
Memiliki sambungan telepon permanen	0,21	8
Membaca koran atau majalah	0,21	9
Memiliki telepon genggam	0,21	10
Memiliki mobil	0,20	11
Memiliki pemutar DVD	0,19	12
Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	0,18	13
Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	0,18	14
Memiliki AC	0,17	15
Pendidikan kepala keluarga: Sarjana	0,17	16
Pendidikan kepala keluarga: SD	-0,16	17

Berdasarkan nilai kesejahteraan setiap keluarga, kami mengisolasi 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin. Tabel 45 menampilkan karakteristik 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin berdasarkan 64 indikator kesejahteraan.

Dalam hal pendidikan, 67,66% kepala keluarga dari keluarga termiskin menyelesaikan pendidikan SD; hal serupa juga terjadi pada para pasangan (suami atau istri) kepala keluarga dari keluarga termiskin (64, 75%). Persentase keluarga termiskin yang memiliki pendidikan tinggi lebih kecil daripada persentase keluarga terkaya. Kepala keluarga dari keluarga terkaya memiliki persentase tertinggi untuk yang lulus universitas, yakni 43,54%, sedangkan pasangan mereka mayoritas lulus SLTA.

**Tabel 45. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Barat**

Kelompok Variabel	Variabel	Proporsi 10% Keluarga Termiskin (%)	Proporsi 10% Keluarga Terkaya (%)
Status perkawinan	Kepala keluarga berstatus menikah	100	100
Jenis kelamin kepala keluarga	Kepala keluarga perempuan	0,49	0,12
Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya	Pendidikan kepala keluarga: tidak sekolah	16,81	0,24
	Pendidikan kepala keluarga: SD	67,66	1,52

	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	10,13	4,06
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	2,18	33,90
	Pendidikan kepala keluarga: diploma	0,06	13,04
	Pendidikan kepala keluarga: sarjana	0,06	43,54
	Pendidikan pasangan: tidak sekolah	17,48	0,30
	Pendidikan pasangan: SD	64,75	1,64
	Pendidikan pasangan: SLTP	11,35	7,16
	Pendidikan pasangan: SLTA	2,25	40,27
	Pendidikan pasangan: diploma	0	16,56
	Pendidikan pasangan: sarjana	0,06	32,87
Sektor pekerjaan kepala keluarga	Kepala keluarga di sektor pertanian	2,79	0,24
	Kepala keluarga di sektor industri	68,20	2,12
	Kepala keluarga di sektor perdagangan	6,92	4,12
	Kepala keluarga di sektor jasa	13,96	90,12
	Kepala keluarga menerima transfer (pengangguran/pensiunan)	3,34	0,67
	Kepala keluarga di sektor lain	4,79	2,73
Pekerjaan	Kepala keluarga bekerja	95,69	90,12
	Pasangan bekerja	43,26	55,55
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang bekerja	5,10	0,24
Konsumsi makanan	Makan tiga kali sehari	82,16	97,15
	Makan telur setidaknya sekali dalam seminggu	42,48	96,24
	Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	8,86	92,54
	Makan ikan setidaknya sekali dalam seminggu	41,38	90,36
	Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	11,65	92,06
Kepemilikan harta benda	Memiliki radio	21,30	79,50
	Memiliki TV hitam putih	1,46	5,94
	Memiliki TV berwarna	35,74	99,21
	Memiliki lemari es	0,18	98,36
	Memiliki sambungan telepon permanen	1,76	83,44
	Memiliki telepon genggam	8,86	98,85
	Memiliki kompor gas	0,30	90,96
	Memiliki pemutar DVD	4,85	89,02
	Memiliki kipas angin	5,22	95,21
	Memiliki komputer	0,06	77,44
	Memiliki <i>tape recorder</i>	0,61	33,29
	Memiliki AC	0	49,24
	Memiliki sepeda	69,11	74,89
	Memiliki sepeda motor	6,13	97,15
	Memiliki mobil	0	62,64

	Memiliki perahu	0	3,94
	Memiliki perahu motor	0	3,64
	Memiliki rumah	34,59	83,93
Kepemilikan hewan ternak	Memiliki sapi	0,06	4,18
	Memiliki kambing	0,18	3,82
	Memiliki ayam	10,98	6,73
Indikator kesehatan	Menggunakan WC pribadi	53,70	99,09
	Tinggal di rumah berlantai tanah	18,75	0,06
	Minum air dari sumber yang terlindung	51,76	97,09
	Mencari perawatan medis modern saat sakit	89,26	89,69
	Mengalami kematian bayi dalam tiga tahun terakhir	4,19	1,70
Indikator kesejahteraan lain	Menggunakan sumber penerangan listrik	90,47	97,63
	Mayoritas anggota keluarga membeli baju baru dalam setahun terakhir	73,54	98,30
	Membaca koran atau majalah	2,37	83,02
	Menjadi korban kejahatan tahun lalu	1,46	5,03
	Aktif di organisasi lingkungan rumah	9,77	46,33
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang putus sekolah	15,29	1,70
	Rasio ketergantungan yang tinggi (lebih dari separuh anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)	9,16	5,58
Akses ke lembaga keuangan	Memiliki tabungan	0,55	76,53
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal	7,89	30,62
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan informal	27,91	4,49
	Harus menjual harta benda untuk bayar utang	12,32	6,31

Persentase kepala keluarga dari keluarga miskin yang bekerja di sektor industri adalah 68,20%, sedangkan 90,12% keluarga kaya bekerja di sektor jasa. Selisih persentase pasangan bekerja antara keluarga terkaya dan termiskin hanya sedikit, yakni sekitar 10%.

Dari segi pola konsumsi makanan, keluarga termiskin cenderung mengonsumsi jauh lebih sedikit daging setiap minggunya. Persentase keluarga terkaya yang mengonsumsi daging satu kali seminggu sebesar 92,54%, sedangkan keluarga termiskin hanya 8,86%. Namun demikian, kedua kelompok memiliki pola yang relatif sama, yakni makan tiga kali sehari dengan persentase lebih dari 80%.

Kesenjangan antara keluarga terkaya dan termiskin cukup besar dalam hal kepemilikan AC, mobil, lemari es, kompor gas dan komputer—yang menjelaskan 17 indikator kesejahteraan berperingkat tertinggi. Namun, perbedaannya tidak terlalu signifikan dalam hal kepemilikan sepeda.

Seperti halnya analisis terhadap Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan, tidak ada perbedaan signifikan antara keluarga terkaya dan keluarga termiskin dalam hal pemanfaatan perawatan kesehatan modern. Persentase keluarga terkaya yang menggunakan jasa perawatan kesehatan modern ketika sakit adalah 89,69% dan keluarga termiskin sebesar 89,26%. Persentase keluarga terkaya yang memiliki WC pribadi dan minum air dari sumber terlindungi 40% lebih tinggi daripada persentase keluarga termiskin.

Sebagian besar keluarga terkaya memiliki akses ke koran dan majalah karena mereka mampu membeli atau berlangganan, sedangkan hanya 2,37% dari keluarga termiskin memiliki akses ke sumber informasi tersebut. Mereka yang anggota keluarganya aktif di organisasi lingkungan biasanya adalah keluarga terkaya. Hal ini dimungkinkan karena status ekonomi yang mengangkat status sosial mereka dan memberi kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, selain lebih banyaknya waktu luang yang mereka miliki.

Apabila dilihat dari segi akses ke lembaga keuangan formal, 76,53% keluarga terkaya memiliki tabungan, sedangkan hanya 0,55% keluarga termiskin memiliki tabungan. Selama tiga tahun terakhir, terdapat 30,62% dari keluarga terkaya yang memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal dan 4,49% pada lembaga keuangan informal atau perorangan.

#### 4.4.4 Hasil PCA: Profil Kemiskinan di Kecamatan Pekalongan Utara

Sebagian besar indikator kesejahteraan di Kecamatan Pekalongan Utara (Tabel 46) relatif sama dengan indikator kesejahteraan di Kecamatan Pekalongan Barat (Tabel 44). Yang membedakan kedua kelompok indikator tersebut hanyalah peringkat tiap-tiap indikator. Sembilan dari tujuh belas indikator terkait dengan kepemilikan harta benda, yang memperlihatkan bahwa kepemilikan harta benda merupakan pembeda terbaik kesejahteraan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Yang berada pada peringkat pertama indikator kesejahteraan, seperti pada analisis terhadap Kecamatan Pekalongan Barat, adalah kepala keluarga yang bekerja di sektor industri—indikator ini memiliki tren yang negatif. Peringkat kedua dan ketiga, yakni kepemilikan lemari es dan kepemilikan kompor gas, juga sama dengan yang terdapat pada analisis terhadap Kecamatan Pekalongan Barat. Dua indikator kesejahteraan di Kecamatan Pekalongan Utara yang membedakan dengan analisis terhadap Kecamatan Pekalongan Barat adalah penggunaan WC pribadi (tren positif) dan kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian (tren negatif).

**Tabel 46. Tujuh Belas Indikator Kesejahteraan Berperingkat Tertinggi di Kecamatan Pekalongan Utara**

Variabel	Nilai	Peringkat
Kepala keluarga bekerja di sektor industri	-0,32	1
Memiliki lemari es	0,27	2
Memiliki kompor gas	0,24	3
Memiliki sepeda motor	0,24	4
Memiliki telepon genggam	0,23	5
Memiliki kipas angin	0,22	6
Membaca koran atau majalah	0,21	7
Memiliki tabungan	0,21	8
Memiliki komputer	0,21	9
Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	0,19	10
Memiliki pemutar DVD	0,19	11
Memiliki sambungan telepon permanen	0,19	12
Menggunakan WC pribadi	0,18	13
Kepala keluarga di sektor pertanian	-0,18	14
Memiliki mobil	0,17	15
Pendidikan kepala keluarga: SD	-0,16	16
Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	0,16	17

Tabel 47 yang berisi karakteristik 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin membuktikan bahwa memang benar ada perbedaan yang signifikan antarkelompok tersebut, di samping adanya 17 indikator kesejahteraan berperingkat tertinggi.

Persentase terbesar untuk tingkat pendidikan kepala keluarga dari keluarga terkaya adalah lulus SLTA, yakni sekitar 48,92%. Pada keluarga termiskin, tingkat pendidikan kepala keluarga yang persentasenya paling tinggi adalah SD (66,34%). Pendidikan pasangan kepala keluarga di Kecamatan Pekalongan Utara memiliki pola yang sama dengan pendidikan pasangan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pasangan kepala keluarga dari keluarga termiskin umumnya lulusan SD (64,19%) dan pasangan kepala keluarga dari keluarga kaya lulusan SLTA (49,20%).

Banyak kepala keluarga dari keluarga kaya bekerja di sektor jasa (90,34%), sementara hanya 9,67% mereka dari keluarga termiskin yang bekerja di sektor tersebut. Kepala keluarga dari keluarga termiskin di kecamatan ini umumnya bekerja di sektor industri (62,45%). Namun, komposisi kepala keluarga dari keluarga termiskin yang bekerja di sektor pertanian di Kecamatan Pekalongan Utara, yakni 17,80%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang di Kecamatan Pekalongan Barat, yakni 2,79% (bandingkan Tabel 47 dengan Tabel 45). Karena Kecamatan Pekalongan Utara terletak di daerah pesisir, jumlah kepala keluarga dari keluarga miskin yang bekerja di sektor pertanian, seperti nelayan dan buruh pengolahan ikan, lebih tinggi daripada kepala keluarga dari keluarga termiskin di Kecamatan Pekalongan Barat.

**Tabel 47. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan 10% Keluarga Termiskin di Kecamatan Pekalongan Utara**

Kelompok Variabel	Variabel	Proporsi 10% Keluarga Termiskin (%)	Proporsi 10% Keluarga Terkaya (%)
Status perkawinan	Kepala keluarga berstatus menikah	100	100
Jenis kelamin kepala keluarga	Kepala keluarga perempuan	0,28	0,14
Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya	Pendidikan kepala keluarga: tidak sekolah	17,80	0,21
	Pendidikan kepala keluarga: SD	66,34	1,60
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP	8,34	5,84
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA	1,11	48,92
	Pendidikan kepala keluarga: diploma	0	11,81
	Pendidikan kepala keluarga: sarjana	0,07	29,33
	Pendidikan pasangan: tidak sekolah	16,83	0,49
	Pendidikan pasangan: SD	64,19	3,34
	Pendidikan pasangan: SLTP	8,90	8,55
	Pendidikan pasangan: SLTA	1,81	49,20
	Pendidikan pasangan: diploma	0,07	15,29
	Pendidikan pasangan: sarjana	0	22,38
Sektor pekerjaan kepala keluarga	Kepala keluarga di sektor pertanian	17,80	0,49
	Kepala keluarga di sektor industri	62,45	1,95
	Kepala keluarga di sektor perdagangan	3,27	4,80

	Kepala keluarga di sektor jasa	9,67	90,34
	Kepala keluarga menerima transfer (pengangguran/pensiunan)	3,41	0,90
	Kepala keluarga di sektor lain	3,41	1,53
Pekerjaan	Kepala keluarga bekerja	95,69	94,58
	Pasangan/Istri bekerja	44,02	55,04
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang bekerja	4,94	0,42
Konsumsi makanan	Makan tiga kali sehari	82,13	97,43
	Makan telur setidaknya sekali dalam seminggu	44,30	95,97
	Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu	5,35	89,30
	Makan ikan setidaknya sekali dalam seminggu	62,38	89,44
	Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu	15,09	89,09
Kepemilikan harta benda	Memiliki radio	10,78	78,11
	Memiliki TV hitam putih	0,63	2,57
	Memiliki TV berwarna	35,12	98,68
	Memiliki lemari es	0,07	94,72
	Memiliki sambungan telepon permanen	1,74	64,42
	Memiliki telepon genggam	5,01	97,29
	Memiliki kompor gas	0,14	82,14
	Memiliki pemutar DVD	4,03	86,87
	Memiliki kipas angin	4,03	93,26
	Memiliki komputer	0	58,17
	Memiliki <i>tape recorder</i>	0,42	31,97
	Memiliki AC	0,07	31,34
	Memiliki sepeda	64,46	69,70
	Memiliki sepeda motor	3,06	97,15
	Memiliki mobil	0	37,94
	Memiliki perahu	0,07	1,25
	Memiliki perahu motor	0,07	1,11
	Memiliki rumah	38,46	81,10
Kepemilikan hewan ternak	Memiliki sapi	0,35	1,46
	Memiliki kambing	0,70	1,25
	Memiliki ayam	10,57	3,47
Indikator kesehatan	Menggunakan WC pribadi	23,78	98,96
	Tinggal di rumah berlantai tanah	21,42	0
	Minum air dari sumber yang terlindung	66,62	98,05
	Mencari perawatan medis modern saat sakit	87,55	92,49
	Mengalami kematian bayi dalam tiga tahun terakhir	3,69	2,43
Indikator kesejahteraan lain	Menggunakan sumber penerangan listrik	90,26	98,26
	Mayoritas anggota keluarga membeli baju baru	68,98	98,61

	dalam setahun terakhir		
	Membaca koran atau majalah	1,04	73,66
	Menjadi korban kejahatan tahun lalu	1,11	4,03
	Aktif di organisasi lingkungan rumah	10,43	52,74
	Setidaknya ada 1 anggota keluarga berusia 6–15 tahun yang putus sekolah	15,65	1,32
	Rasio ketergantungan yang tinggi (lebih dari separuh anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)	9,04	6,81
Akses ke lembaga keuangan	Memiliki tabungan	0,49	69,77
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal	9,60	31,97
	Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan informal	29,49	6,05
	Harus menjual harta benda untuk bayar utang	13,21	4,59

Terdapat perbedaan yang mencolok antara keluarga terkaya dan termiskin dalam hal pola konsumsi. Meskipun hampir semua keluarga makan tiga kali sehari, asupan protein mereka relatif berbeda. Lebih dari 89% keluarga kaya mengonsumsi telur, daging, dan ikan setidaknya satu kali dalam seminggu, sedangkan persentase keluarga miskin yang mengonsumsi telur, daging, dan ikan setidaknya sekali dalam seminggu adalah, secara berturut-turut, 44,30%, 5,35%, dan 62,38%.

Terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam hal kepemilikan harta benda antara kelompok terkaya dan kelompok termiskin. Ada dua benda bernilai tinggi yang dimiliki oleh keluarga terkaya tetapi tidak dimiliki keluarga termiskin, yaitu komputer dan mobil. Benda yang umumnya dimiliki baik oleh keluarga terkaya maupun oleh keluarga termiskin adalah sepeda. Berdasarkan letak geografis Kecamatan Pekalongan Utara, kami mengasumsikan bahwa keberadaan nelayan akan membuat persentase kepemilikan kapal atau kapal motor menjadi cukup signifikan. Namun, dari diskusi informal dengan petugas sensus di Kelurahan Panjang Baru, mayoritas kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan adalah buruh pada perahu atau kapal milik orang lain atau perusahaan sehingga persentase kepemilikannya kecil.

Sebesar 92,49% keluarga terkaya menggunakan layanan kesehatan modern saat sakit; hanya 87,55% keluarga termiskin yang melakukannya. Sebanyak 21,42% keluarga termiskin tinggal di rumah berlantai tanah dan hanya 23,78% yang memiliki WC pribadi.

Akses ke sumber listrik pada kedua kelompok tinggi karena sambungan PLN tersebar luas di kota. Persentase keluarga terkaya yang dapat membeli baju baru dalam satu tahun terakhir adalah 98,61%; untuk keluarga termiskin persentasenya 68,98%. Lebih dari 70% keluarga terkaya memiliki akses ke koran dan majalah, sedangkan sekitar 1% keluarga termiskin memiliki akses yang sama.

Berdasarkan kepemilikan harta benda mereka, keluarga kaya memiliki akses yang lebih besar ke lembaga keuangan formal. Kebanyakan keluarga kaya (69,77%) memiliki tabungan, sedangkan pada keluarga miskin hanya terdapat 0,49% yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal. Pada tiga tahun terakhir, 31,97% keluarga terkaya memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal dan 6,05% pada lembaga keuangan informal atau perorangan. Persentase keluarga miskin yang menggadaikan harta benda untuk membayar utang relatif tinggi, yakni sekitar 13,21%.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Pendataan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan bertujuan mengumpulkan informasi dan/atau data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial dan status kesejahteraan rumah tangga di kota tersebut. Pengumpulan data yang memanfaatkan sistem ini telah memberikan pengalaman yang berharga. Pelajaran yang bisa diambil mencakup cara memilih pencacah, pengawasan pencacah selama pemrosesan data, dan proses pemasukan data. Semua itu perlu perhatian yang serius agar proses pengumpulan data SPKOM bisa berjalan lancar.

Sejumlah pelajaran berharga dalam pelaksanaan SPKOM di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut.

- a) Tingginya frekuensi pergantian pejabat di tingkat pemerintah lokal menyulitkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses ini. Selama berlangsungnya pelaksanaan SPKOM, telah terjadi lima kali pergantian pejabat teknis dari pemerintah lokal yang diberi tanggung jawab yang berhubungan dengan proses ini. Hal itu mengakibatkan tertundanya jadwal proyek.
- b) Koordinasi antarlembaga memerlukan upaya dan perhatian khusus, terutama terkait dengan komitmen, waktu yang dikorbankan, serta pemahaman teknis atas SPKOM itu sendiri.
- c) Pencacah yang berusia di atas 55 tahun, yang lulusan SD, atau yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan mengalami kesulitan selama proses enumerasi data. Selain itu, pencacah yang tidak mengikuti pelatihan tetapi dilibatkan dalam proses enumerasi data turut andil menimbulkan kesalahan pemrosesan data.
- d) Pelatihan pencacah membutuhkan waktu yang lebih lama karena beragamnya latar belakang pendidikan dan usia pencacah. Hal ini juga menentukan kemampuan mereka untuk memahami isi kuesioner yang juga sangat bervariasi.
- e) Entri data yang dikumpulkan pada 2008 (untuk Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Timur) dilakukan oleh CV Waditra, perusahaan subkontrak pemerintah lokal yang bergerak di bidang informasi teknologi dan pemrosesan data. Namun karena perusahaan tersebut menggunakan aplikasi MySQL, yang berbeda dengan yang digunakan SMERU (STATA), SMERU harus memindahkan data yang diberikan CV Waditra ke dalam STATA. Proses ini menghabiskan banyak waktu.
- f) Pelatihan entri data yang diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemkot Pekalongan kurang efektif karena jumlah petugas entri data jauh melebihi jumlah komputer yang tersedia. Fasilitas pelatihan yang lain, seperti proyektor, juga tidak tersedia pada hari pelatihan.
- g) Entri data dilakukan di dua tempat yang berbeda. Hal ini mempersulit pengawasan atas entri data. Selain itu, jumlah petugas entri data jauh melebihi jumlah komputer sehingga mereka harus bergiliran menggunakan komputer.
- h) Kuesioner diisi tidak berdasarkan kelurahan. Hal ini mempersulit SMERU saat harus melakukan verifikasi data.

Berkaitan dengan analisis data SPKOM, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga masih rendah, APM pendidikan dasar masih perlu mendapatkan perhatian pemkot, sebagian besar keluarga masih menggunakan sumur tidak terlindung sebagai sumber air bersih,

dan keluarga-keluarga umumnya masih memilih membakar sampah sebagai sistem pembuangan sampah mereka.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil sensus SPKOM di Kota Pekalongan, peneliti mengajukan rekomendasi berikut.

### a) Perekrutan pencacah dan petugas entri data harus selektif.

Data yang akurat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan dapat mengurangi kebocoran program-program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pencacah menjadi faktor penting pertama dalam proses pendataan. Persyaratan menjadi pencacah adalah (i) penduduk lokal, (ii) tidak buta huruf, (iii) minimal lulusan SMP, (iv) memiliki pengalaman dalam proses pengumpulan data, (v) berusia maksimal 55 tahun, dan (vi) perempuan<sup>2</sup>. Perekrutan pencacah sangat penting dan harus sangat selektif. Latar belakang pendidikan seorang pencacah harus benar-benar dipertimbangkan karena bisa menjadi tolok ukur pemahaman mereka akan kuesioner yang digunakan. Pemahaman pencacah tentang isi kuesioner sangat penting agar mereka tidak melakukan kesalahan saat pengumpulan data, yang bisa memengaruhi validitas data.

Selama pemrosesan data, pencacah harus dikawal dan diawasi secara intensif, terutama pada awal proses. Hal ini bisa mengurangi atau bahkan meniadakan kesalahan pada proses pengisian data selanjutnya. Para pemberi pelatihan dan koordinator di tingkat kelurahan memainkan peran penting pada awal pemrosesan data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan sah, pelatihan dan entri data tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan proses pengumpulan data. Metode entri data yang sesuai sama pentingnya dengan pengisian kuesioner yang tepat, yang pada akhirnya akan menghasilkan data yang akurat.

Dengan menggunakan metodologi yang kami pilih, kami dapat mengidentifikasi penduduk miskin di setiap kelurahan. Kami juga percaya bahwa, dengan dukungan dan pengawasan yang memadai, penduduk lokal mampu melaksanakan pemantauan kemiskinan.

### b) Pemkot Pekalongan perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) yang rendah.

Hasil sensus SPKOM menyuratkan bahwa APM sekolah dasar, APM sekolah menengah pertama, dan tingkat melek huruf di Kecamatan Pekalongan Utara paling rendah dibandingkan dengan tiga kecamatan yang lain. Oleh karena itu, Pemkot Pekalongan perlu memberikan sosialisasi tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengadakan program kelompok belajar Paket A dan B, serta memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan usaha khususnya di wilayah dengan APM yang relatif rendah.

### c) Pemkot Pekalongan perlu meningkatkan kapasitas para kepala keluarga.

Lebih dari setengah kepala keluarga di Kota Pekalongan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah; umumnya paling tinggi hanya lulusan SD. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkot Pekalongan dapat memberikan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga, antara lain, dengan pelatihan-pelatihan keterampilan usaha.

---

<sup>2</sup>Dipilih perempuan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya perempuan lebih teliti.

**d) Pemkot Pekalongan perlu meningkatkan layanan penyediaan air bersih.**

Penggunaan sumber air minum utama yang digunakan oleh keluarga-keluarga di Kota Pekalongan bervariasi antarkecamatan. Sebagian besar keluarga-keluarga tersebut masih menggunakan sumber air minum dari sumur yang tidak terlindung. Untuk meningkatkan kebutuhan air bersih, Pemkot Pekalongan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun saluran air bersih (pipanisasi) ke lingkungan keluarga-keluarga yang belum terjangkau air bersih.

**e) Pemkot Pekalongan perlu membangun sistem pembuangan sampah rumah tangga yang terpadu.**

Pembuangan sampah atau limbah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan dengan berbagai cara. Namun, sebagian besar keluarga di Kota Pekalongan masih melakukan pembakaran sampah di halaman rumah mereka; hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan kendaraan pengangkut sampah Pemkot Pekalongan untuk mengangkut sampah mereka. Hal ini tentunya berdampak pada kebersihan udara dan lingkungan masyarakat. Sistem penanganan sampah yang terpadu akan membantu pemkot dan masyarakat di suatu wilayah. Misalnya, setiap kecamatan memiliki usaha daur ulang dan produksi kompos (UDPK) yang menggunakan tanah milik negara. Mekanisme yang dapat dijalankan adalah sampah pasar dan sampah rumah tangga diangkut ke UDPK, lalu dipilah atas sampah yang bisa dibuat kompos, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan.

Akhir kata, setelah melihat fakta tentang hasil penerapan SPKOM di Kota Pekalongan sebagai kota pertama di Indonesia yang secara resmi menjalankan sistem pemantauan ini, kami berharap para pemangku kepentingan di kabupaten/kota lain dapat mengetahui keberadaan sistem pemantauan kesejahteraan atau kemiskinan yang cukup akurat ini. Sistem yang melibatkan masyarakat setempat dan dirancang secara spesifik mengikuti karakteristik suatu daerah, meskipun tetap objektif, dan bisa dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota ini niscaya mampu membantu pemda dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintahan mereka secara lebih efektif.

## DAFTAR ACUAN

- Akhmadi, Daniel Suryadarma, Hastuti, dan Rizki Fillaili (2006) 'Verifikasi Ketepatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) dalam Penargetan Keluarga Miskin, Hasil Verifikasi di Dua Desa Uji Coba SPKM'. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Bourguignon, François (2007) *Development and Inequality: Where Do We Stand?* Amerika Serikat: Yale.
- BPS (2009) *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008*. Buku 1: Provinsi. Jakarta: BPS.
- BPS (2009) *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008*. Buku 2: Kabupaten/Kota. Jakarta: BPS.
- BPS (2008) *Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2007*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan dan Bappeda Kota Pekalongan.
- BPS (berbagai tahun penerbitan). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: BPS.
- CPIS (1992) 'Panduan Teknik Pembuatan Kompos dari Sampah: Teori dan Aplikasi.' Jakarta: Center for Policy and Implementation Studies.
- Hastuti, Sulton Mawardi, Bambang Sulaksono, Akhmadi, Silvia Devina, dan Rima Prama Artha (2008) 'Efektivitas Pelaksanaan Raskin.' Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Bappenas (2007) *Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2007*. Jakarta: Bappenas.
- Bappeda dan BPS Kota Pekalongan (2007) *Kota Pekalongan dalam Angka*. Pekalongan: Bappeda Pekalongan.
- Stalker, Peter (2008) *Let's Speak Out for MDGs: Achieving the Millennium Development Goals in Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Suryadarma, Daniel, Akhmadi, Hastuti, dan Nina Toyamah (2005) 'Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia'. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (2010) 'Walikota Pekalongan: Harus Ubah Peradaban' [dalam jaringan] <[http://www.sanitasi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=238%3Aawalikota-pekalongan-harus-ubah-peradaban&catid=57%3Aatokoh&Itemid=1](http://www.sanitasi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=238%3Aawalikota-pekalongan-harus-ubah-peradaban&catid=57%3Aatokoh&Itemid=1)> [22 February 2010].
- UNDP Indonesia (2004) *Indonesia Millennium Development Goals Report 2004*, Jakarta: United Nations Development Program Indonesia.
- Vibizdaily (2009) *Konversi Gas di Pekalongan dimulai Mei 2009* [dalam jaringan] <[http://vibizdaily.com/detail/fyi/2009/01/10/konversi\\_gas\\_di\\_pekalongan\\_dimulai\\_mei\\_2009](http://vibizdaily.com/detail/fyi/2009/01/10/konversi_gas_di_pekalongan_dimulai_mei_2009)> [16 Mei 2011].

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

## SK Bappeda No. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM)/CBMS



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jalan Mataram Nomor 1 Telepon 423223 Pekalongan

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 050/1686 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN  
OLEH MASYARAKAT (SPKOM) / CBMS  
TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sisrem Pemantauan Kesejahteraan Oleh Masyarakat perlu keterlibatan berbagai pihak;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditunjuk tim pengelola kegiatan;  
c. bahwa penunjukan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan Oleh Masyarakat (SPKOM) / CBMS Kota Pekalongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola kegiatan sebagaimana Diktum Pertama diatas terdiri dari : Tim Pengarah, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Sekretariat dengan tugas masing-masing sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Kegiatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan Oleh Masyarakat (SPKOM) / CBMS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan  
pada tanggal : 10 Juli 2008



**Ir. CHAIRUDDIEN MUSTHAHAL**

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 089 545

Lampiran I : Keputusan Kepala BAPPEDA  
Kota Pekalongan  
Nomor : 050/ 1686 Th. 2008  
Tanggal : 10 Juli 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM PEMANTAUAN  
KESEJAHTERAAN OLEH MASYARAKAT (SPKOM) / CBMS  
TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I TIM PENGARAH</b>			
1	Dr. H.M. Basyir Ahmad	Walikota Pekalongan	Pembina
2	H. Abu Almafachir	Wakil Walikota Pekalongan	Wakil Pembina
3	H. Masrof, SH	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
4	Ir. Chaeruddien Mustahal	Kepala Bappeda Kota Pekalongan	Ketua
5	Suharto, SH., M.Hum	Asisten Tata Praja	Anggota
6	Drs. Dwi Ari Putranto, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7	Drs. Manggus	Kepala BPS Kota Pekalongan	Anggota
8	Dr. Sudarno Sumarto	Direktur SMERU	Anggota
<b>II TIM TEKNIS</b>			
1	Ir. Agus Jati Waluyo	Kabag TU Bappeda Kota Pkl	Ketua
2	Drs. Sri Budi Santoso, MSi	Kasubbag PE Bappeda Kota Pkl	Sekretaris
3	Ir. Sochib Rochmat, MPi	Kabid Eksarpras Bappeda Kota Pkl	Anggota
4	Dra. Eni Purwani	Kabid Pemsosbud Bappeda Kota Pkl	Anggota
5	SP Andi Sutanto, SH	Kabid Litbang Bappeda Kota Pkl	Anggota
6	Dr. Siti Nurhayati MS	LPPM UNIKAL Pkl	Anggota
7	Mahirun, SE, MSi	LPPM UNIKAL Pkl	Anggota
8	Choliq Sabana, SE, Msi	LPPM UNIKAL Pkl	Anggota
9	H. Andi Suhermanto, SE, MM	LPPM UNIKAL Pkl	Anggota
10	Yarinato, SH, M.Hum	LPPM UNIKAL Pkl	Anggota
11	Ayu Nawangwulan S, SP, MM	Kasubbid Bappeda Kota Pkl	Anggota
12	Betty Dahfiani D, ST	Kasubbid Bappeda Kota Pkl	Anggota
13	Ir. M Choirul Huda, MT	Kasubbid Bappeda Kota Pkl	Anggota
14	Sri Muktiati	Kasubag Bappeda Kota Pkl	Anggota
15	Kaelani, ST	Kasubbid Bappeda Kota Pkl	Anggota
16	Tri Wahyuningsih	Kasubbid Bappeda Kota Pkl	Anggota
17	Dra. Titik Sunarsih	Kepala Capilduk Kota Pkl	Anggota
18	Ikrar Udin	Staf Capilduk Kota Pkl	Anggota
19	Agus Wahyudi, S. Kom	Ketua STIMIK Widya Pratama Pkl	Anggota
20	Aminudin Azis, SE	LSM PATTIRO Pekalongan	Anggota
21	Sugiharto	LSM PATTIRO Pekalongan	Anggota
22	Setyawan Dwi H, ST	LSM PATTIRO Pekalongan	Anggota
23	H. Sudjaka Mertana	Forum BKM Kota Pekalongan	Anggota
24	Budi Setyawan	Forum LPM Kota Pekalongan	Anggota
<b>III TIM PENDAMPING</b>			
1	Ahmadi	SMERU Jakarta	Koordinator
2	Edwin dkk	SMERU Jakarta	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
IV	<b>TIM SEKRETARIAT</b>		
1	Sri Muktiati	Kasubag Umum Bappeda Kota Pkl	Ketua
2	Dewi Husnulniaty, Amd	Staf Bappeda Kota Pkl	Sekretaris
3	Edy Murtono	Staf Bappeda Kota Pkl	Anggota
4	Adi Sumarsono	Staf Bappeda Kota Pkl	Anggota
5	Dwi Irawan, Amd	Staf Bappeda Kota Pkl	Anggota
6	Pudjio	Staf Bappeda Kota Pkl	Anggota
7	Jihan Risqoni	Staf Bappeda Kota Pkl	Anggota
8	Nor Romadhon	Staf Bappeda Kota Pkl	Anggota

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. CHAIRUDDIEN MUSTHAHAL

Pembina Tk. I  
NIP. 500 089 545

Lampiran II : Keputusan Kepala BAPPEDA  
Kota Pekalongan  
Nomor : 050/1686 Th. 2008  
Tanggal : 10 Juli 2008

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN  
OLEH MASYARAKAT (SPKOM) / CBMS  
TAHUN ANGGARAN 2008

**TIM PENGARAH :**

Memberikan pengarahan kepada Tim Teknis dan Tim Sekretariat untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan Oleh Masyarakat di Kota Pekalongan

**TIM TEKNIS :**

Mempersiapkan berbagai aspek teknis untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan Oleh Masyarakat di Kota Pekalongan, meliputi :

1. Penyusunan instrumen SPKOM
2. Mengadakan sosialisasi, workshop kegiatan SPKOM
3. Mengadakan rekrutmen tenaga surveyor kegiatan SPKOM
4. Mengadakan pelatihan kepada tenaga surveyor kegiatan SPKOM
5. Mengadakan pendampingan pendataan oleh surveyor kegiatan SPKOM
6. Mengadakan pengolahan data hasil kerja surveyor kegiatan SPKOM
7. Mengadakan analisis strategi penanggulangan kemiskinan
8. Diseminasi dan advokasi hasil pendataan dan strategi penanggulangan kemiskinan

**TIM PENDAMPING :**

Memberikan pendampingan sejak awal sampai selesainya pelaksanaan kegiatan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan SPKOM

**TIM SEKRETARIAT :**

1. Membantu Tim Pengarah dan Tim Teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Tim guna kelancaran pelaksanaan kegiatan SPKOM
2. Menyelenggaraan kegiatan pengadministrasian terhadap kegiatan SPKOM

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
  
Ir. CHAIRUDDIEN MUSTAHAHAL  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 089 545

## **LAMPIRAN 2**

**Petunjuk Pengisian, Istilah, dan Pengertian dalam Kuesioner**

**PENDATAAN  
SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN OLEH  
MASYARAKAT (SPKOM)  
KOTA PEKALONGAN  
2009**

**PETUNJUK PENGISIAN,  
ISTILAH, DAN PENGERTIAN  
DALAM KUESIONER**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Pemerintah Kota Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah**

# PETUNJUK UMUM

Untuk mengisi *Kuesioner Keluarga* dan *Kuesioner Rukun Tetangga*, maka harus dipahami hal-hal penting berikut ini menyangkut petunjuk umum dan khusus termasuk istilah dan pengertian yang digunakan.

## Petunjuk Umum:

- Isi jawaban sesuai dengan instruksi setiap blok atau nomor.
- Gunakan pensil untuk mengisi jawaban kuesioner. Tulis jawaban responden dengan jelas, mudah dibaca dan dimengerti.
- Sebagian besar kuesioner dijawab dengan menggunakan kode pada kolom paling kanan kuesioner. Lingkari jawaban yang dipilih dan tuliskan angka/huruf kode jawaban pada kolom jawaban.
- Bila pilihan jawaban adalah “lainnya”, maka harus diikuti/diisi dengan penjelasan atau sebutkan jenis lainnya tersebut, jangan dikosongkan.
- Untuk pertanyaan yang dapat terjadi berulang kali, tulis kejadian yang terakhir. Contoh: jenis kejahatan yang ditulis adalah yang terakhir diderita oleh anggota keluarga.
- Gunakan tempat kosong pada kuesioner atau halaman mana pun yang kosong pada kuesioner untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Setelah selesai wawancara, Pencacah tidak perlu menghapus catatan yang telah dibuat.
- Seluruh pertanyaan harus dijawab, tidak diperbolehkan mengosongkan jawaban atau membubuhkan tanda (-) pada kolom jawaban.
- Jika ada pertanyaan yang tidak relevan untuk ditanyakan kepada responden, atau, untuk pertanyaan kepemilikan dan responden tidak memiliki barang yang ditanyakan, gunakan kode sebagai berikut:
  - TIDAK RELEVAN: 99
  - TIDAK ADA: 0
- Untuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban, isi sebanyak mungkin. Contoh: keluarga responden bila sakit pergi ke puskesmas, rumah sakit, dan membeli obat di warung, maka pada kolom jawaban harus ditulis sesuai dengan banyaknya jawaban tersebut.
- Referensi waktu adalah periode yang berakhir satu hari sebelum wawancara dilakukan. Referensi waktu yang digunakan dalam pendataan ini adalah setahun terakhir, sebulan terakhir, dan seminggu terakhir. Referensi waktu akan dirinci pada pertanyaan-pertanyaan yang memerlukannya.

## PETUNJUK KHUSUS PER BLOK

Hal	Blok/ Nomor	Pertanyaan	Penjelasan
Cover		Nomor urut rumah (per RT)	Nomor urut rumah yang didata untuk setiap RT. Beda RT, nomor urut rumah dimulai dari 1 lagi.
		Nomor urut keluarga/KK (per RT)	Diisi per RT, mulai dari nomor urut keluarga satu hingga nomor urut terakhir dalam satu RT. Nomor urut rumah dan nomor urut keluarga/KK berbeda. Awalan nomor urut rumah adalah batas RT dan/atau nomor rumah terkecil, tetapi jika rumah dibatas RT menumpuk → dihitung secara zig-zag. Satu rumah bisa terdapat lebih dari satu keluarga/KK, sehingga nomor urut keluarga ≥ nomor urut rumah.
		Kepala keluarga dan responden	Pada blok ini mencatat karakteristik kepala keluarga dan responden. Usahakan yang menjadi responden adalah kepala keluarga dan/atau pasangannya. Berbagai penelitian membuktikan bahwa karakteristik kepala keluarga sangat berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Alamat. Isi nama jalan dan nomor tempat rumah kepala keluarga dan anggota keluarga tinggal.
2	II.K2	Isikan nama kepala keluarga dan anggota keluarga sesuai dengan keluarga/KK atau definisi keluarga di bagian kanan ini.	Unit dalam pendataan sosial ekonomi ini adalah keluarga sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. <b>KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</b> Jadi, memiliki Kartu Keluarga → satu keluarga <u>Beberapa kasus:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah menikah → keluarga sendiri, walaupun tidak memiliki kartu keluarga</li> <li>• Ibu hamil dan anak di luar nikah → dianggap keluarga sendiri, status anak dianggap anak ibu</li> <li>• Menikah siri (satu istri) punya anak → kepala keluarga adalah suami.</li> <li>• Menikah siri (dua istri atau lebih), kepala keluarga yaitu suami hanya dicatatkan pada kartu keluarga istri pertama. Kepala keluarga pada KK istri kedua adalah istrinya.</li> <li>• Keluarga "X" tinggal di Kelurahan "A", tapi administrasi di Kelurahan "B" → Didata berdasarkan dokumen administrasi kependudukan → kalau tidak memungkinkan untuk didata, tidak usah.</li> <li>• Data SPKOM akan di <i>crosscheck</i> dengan data capil</li> <li>• Kalau ada janda punya anak yg sudah menikah. Kalau jandanya masih punya KK → didata terpisah. Tapi jika si janda sudah tidak punya KK dan kemudian ikut anaknya → didata 2 Keluarga. Yang dilihat pertama adalah kepemilikan Kartu keluarga.</li> <li>• Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab atas KK yang dimaksud, atau orang yang dianggap sebagai kepala di keluarga tersebut.</li> </ul>
2	I.K.7		Nikah siri termasuk menikah.
3	K2	Nama	Nama kepala keluarga dan anggota keluarga pada K2 hal 2 ditulis kembali secara lengkap di K2 hal 3.
3	K13		Jika pekerjaannya belum ada di daftar/kode pekerjaan → bisa ditulis secara lengkap/detail
4	II. K14	Terdiri dari 2 pertanyaan	Isikan kode yang sesuai pada kolom K 14.1 dan K 14.2

4	II. A.1	Jenis pekerjaan dari sumber mata pencaharian keluarga yang mendatangkan penghasilan terbesar	Jenis pekerjaan sama dengan II.K.12. Pertanyaan ini mencatat pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Biasanya pekerjaan ini sama dengan pekerjaan kepala keluarga. Tetapi pada keluarga yang memiliki anak yang telah dewasa, mungkin saja pekerjaan anak mendatangkan penghasilan yang lebih besar.
4	II. A.2	Jenis pekerjaan sampingan	Jenis pekerjaan bukan utama, tidak harus sama dengan yang telah diisikan pada II.K.13. Bisa jadi pekerjaan sampingan dari kepala keluarga atau anggota keluarga.
4	II.A.4	Kiriman uang dari luar anggota/KK keluarga	Kiriman uang secara teratur bisa secara mingguan, bulanan, atau periode lainnya dari dari luar keluarga (di luar daftar pada Blok II). Ini bisa jadi kiriman dari anak yang telah menikah (memiliki KK sendiri)
4	II.B.1	Jumlah makan anggota keluarga dalam sehari	Makan yang dimaksud adalah makan penuh, bukan kudapan/selingan. Tentu saja pengertian 'makan penuh' sangat beragam tergantung dari kebudayaan, kebiasaan, dan selera. Makan penuh yang dimaksud pada pendataan ini adalah makan yang terdiri dari makanan pokok dan/atau lauk pauk yang berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan utama sehari-hari.
5	II.C.1	Apakah keluarga pernah menerima program pemerintah berikut sejak 2005?	Blok ini mencatat keikutsertaan keluarga dalam program-program pemerintah. Meskipun nama dari program-program tersebut mungkin berbeda, tetapi intinya adalah yang tertulis dalam pilihan kode. Sebagai contoh, pinjaman bergulir bisa bernama Kredit Usaha Tani, Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Program Pengembangan Kecamatan, dan lain-lain.  Karena itu, pengetahuan Pencacah akan berbagai jenis program pemerintah di daerah kerjanya sangat berguna.
5	IIIA No.3	Sumber biaya utama untuk berobat ke sarana kesehatan	Yang dimaksud adalah sarana kesehatan formal
5	III.A.4	Jika merupakan pasangan usia subur (PUS), apakah saat ini menggunakan alat kontrasepsi	Sesuai dengan definisi keluarga yang digunakan, berarti pertanyaan ini ditujukan kepada suami dan istri yang masih berusia subur (15-49 tahun bagi perempuan).
6	III.A.4.b	AKDR	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
6	III.B.1	Apakah ibu memperoleh perawatan rutin (minimal 4 kali) dari tenaga medis/ kesehatan pada kehamilan terakhir?	Jika ada lebih dari satu anak balita pada keluarga responden, jawab pertanyaan ini berdasarkan kelahiran terakhir (anak yang paling muda).
7	III.B.3	Imunisasi yang diterima oleh anak balita terakhir.	Jika ada beberapa anak balita, maka tanyakan untuk anak termuda yang berusia di atas satu tahun. Jika hanya ada satu anak balita dan usianya belum satu tahun, maka tetap isi data imunisasi anak tersebut. Contoh: terdapat 3 anak balita, masing-masing berusia 4 tahun, 2 tahun, dan 11 bulan. Maka yang diambil adalah anak kedua.
7	IIIC K8	Nifas	Masa nifas → pendarahan pasca melahirkan
7	III.D.1	Pilihan jawaban: perkampungan, kompleks perumahan, dan "lainnya"	Kompleks perumahan adalah rumah-rumah yang dibangun secara formal oleh perusahaan pengembang. "Lainnya", misalnya rumah berada di pematang sawah, kebun, dan sejenisnya.
7	III.D.3	Pilihan jalan raya,	Jalan raya adalah jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat,

		jalan lingkungan, gang/lorong	<p>kalau rusak diperbaiki pemerintah</p> <p>Jalan lingkungan adalah jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat, kalau rusak diperbaiki warga sendiri</p> <p>Gang/lorong adalah jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.</p>
8	IV.A.1	Status kepemilikan rumah	<p>Dari pilihan jawaban yang tersedia, yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara 'sewa/kontrak' dengan 'pinjam/milik keluarga', di mana pinjam berarti tidak membayar. Kemudian 'menumpang' adalah jika ada keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut dan keluarga lain itulah pemilik rumah tersebut. Contoh: anak yang telah menikah tetapi tetap tinggal di rumah orang tuanya.</p>
8	IV.A.6	Jenis lantai rumah terluas	Jenis lantai rumah terluas adalah jenis lantai yang menutupi bagian terluas dari bangunan rumah.
9	IV.A.11	Sumber utama air minum	Yang diisi adalah sumber dari air minum yang paling banyak dikonsumsi keluarga.
9	IVA. 11.b		Jika ada kemungkinan dua pilihan terjawab pada pertanyaan pompa listrik/pompa tangan/timba ember → diserahkan kepada responden untuk memilih satu jawaban
9	IV.A.12	Sumber penerangan utama.	Generator/genset, diesel, maupun sumber listrik swadaya masyarakat termasuk listrik non-PLN. Obor termasuk lampu tempel/pelita.
8	IV.A.13	Sambungan telepon rumah	Termasuk telepon rumah dari Telkom, Wifone, atau sejenisnya.
9	IV.B		Blok ini mencatat kepemilikan barang, kendaraan, lahan, dan ternak dalam unit. Jika ada keluarga lain yang tinggal di rumah yang sama, sebisa mungkin pisahkan kepemilikan keluarga-keluarga tersebut.
9	IVB No. 1a		Rumah yang ditinggali → luas lahannya dijumlahkan ke lahan pekarangan. Luas sama dengan panjang kali lebar.
10	IV.C.1	Apakah selama setahun terakhir ini anggota keluarga pernah membeli pakaian baru.	<p>Pakaian baru berarti 100 persen baru, termasuk membeli pakaian bekas. Pertanyaan ini juga tidak menghitung pemberian pakaian dari orang lain. Jawab '1' jika seluruh anggota keluarga membeli pakaian baru, '2' jika hanya sebagian yang membeli pakaian baru.</p> <p><b>Definisi membeli berarti salah seorang anggota keluarga mengeluarkan uang untuk mendapatkan pakaian, bukan berarti seluruh anggota keluarga pernah mengeluarkan uang dari kantong masing-masing untuk mendapatkan pakaian.</b></p>
10	IV.C.3	Apakah selama 3 tahun terakhir pernah meminjam uang/mengambil kredit ke lembaga formal.	<p>Lembaga keuangan formal adalah bank, BPR, koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).</p> <p>Rentenir ataupun bank keliling tidak termasuk lembaga formal.</p>
11	IV.D	Usaha/industri rumah tangga	Jumlah tenaga kerja 1–4 orang
		Usaha/industri kecil	Jumlah tenaga kerja 5–19 orang
		Usaha/industri menengah	Jumlah tenaga kerja 20–99 orang
		Usaha/industri besar	Jumlah tenaga kerja ≥100 orang

## LAMPIRAN 3

### Kuesioner Keluarga

RAHASIA

SPKOM.PKL09-KK

**PENDATAAN  
SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN OLEH  
MASYARAKAT (SPKOM)  
KOTA PEKALONGAN  
2009**

**KUESIONER KELUARGA**

Kecamatan	: Pekalongan Utara / Barat *)
Kelurahan	: _____
RT/RW	: _____
Nama Kepala Keluarga	: _____
Nama Responden	: _____
Alamat Lengkap Rumah	: Jl. _____ No. _____
No. Urut Rumah (per RT)	: _____
No. Urut Keluarga (per RT)	: _____
Apakah memiliki Kartu Keluarga?	: 1. Ya          2. Tidak
Nama Pencacah	: _____
Tanggal Pencacahan	: _____

\*) Coret yang tidak perlu

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
Pemerintah Kota Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah**

**I. KARAKTERISTIK KEPALA DAN ANGGOTA KELUARGA**

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	
No	Nama	Status/ hubungan dengan Kepala Keluarga	Jenis kelamin	Tempat lahir	Tanggal lahir	Status perkawinan	Untuk anggota keluarga berumur 5 tahun ke atas				
		<b>Kode K3:</b> 1. Kepala Keluarga 2. suami 3. Istri 4. Anak 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang tua 8. Mertua 9. Famili lain 10. pembantu 11. Lainnya	<b>Kode K4:</b> 1. Laki-laki 2. Perempuan	<b>Kode K5:</b> 1. Di kelurahan ini 2. Di luar kelurahan, di Pekalongan 3. Di kota lain, Jawa Tengah 4. Di provinsi lain 5. Di luar negeri 6. Tidak tahu	<b>Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran (tgl/bln/thn). Untuk tanggal dan bulan, jika tidak tahu isi dengan 99.</b>	<b>Kode K7:</b> 1. Belum menikah 2. Menikah 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	<b>Kode K8:</b> 1. Ya 2. Tidak	<b>Kode K9:</b> 1. Belum/tidak sekolah 2. Tidak tamat SD/ sederajat 3. Tamat SD/ sederajat 4. Tidak Tamat SMP/s 5. Tamat SMP/ sederajat 6. Tidak Tamat SMA 7. Tamat SMA/ sederajat 8. Tamat D1/D2/D3 9. Tamat DIV/S1 10. Tamat S2 11. Tamat S3	Jika masih sekolah		Kelas/ tingkat
									Jenjang pendidikan		
1.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
2.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
3.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
4.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
5.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
6.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
7.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
8.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
9.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	
10.	.....	___	___	___	.... /.... /.....	___	___	___	___	___	

K1	K2	K12	K13	K14		K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21
No	Nama	Untuk anggota keluarga berumur 5 tahun ke atas				Agama	Untuk wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin		Jika agama Islam, pernah naik haji?	Apakah jompo?	Apakah cacat?	Jika cacat, apa jenis cacatnya?
		Kegiatan yang dilakukan selama seminggu lalu	Jika jawaban K12=1, 3 atau 7 ( <b>bekerja atau lainnya</b> ), tuliskan <b>kode</b> pekerjaan utama	Jika jawaban K12=1 atau 3 ( <b>bekerja</b> ), apa <b>kedudukan</b> dalam pekerjaan utama?			Jumlah seluruh anak kandung yang dilahirkan hidup	Jumlah anak kandung yang sekarang masih hidup				
		<b>Kode K12:</b> 1. Bekerja 2. Sekolah 3. Bekerja & sekolah 4. Mencari pekerjaan 5. Sekolah & mencari pekerjaan 6. Menganggur 7. Lainnya	<b>Kode K13:</b> Lihat lampiran (kode pekerjaan)	<b>Kode K14.1:</b> 1. berusaha/bekerja sendiri 2. berusaha dibantu buruh tidak tetap 3. berusaha dibantu buruh tetap 4. buruh/pekerja/karyawan dibayar 5. pekerja tidak dibayar <b>Kode K14.2 :</b> Jumlah jam kerja seminggu <b>K14.1 dan K14.2</b>			<b>Kode K15:</b> 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu 7. Lainnya	<b>Kode K18:</b> 1. Ya 2. Tidak				
1.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II. PENANGGULANGAN KEMISKINAN			
A. PENDAPATAN KELUARGA			
1.	Jenis pekerjaan dari sumber mata pencaharian utama keluarga yang mendatangkan penghasilan terbesar	<i>Lihat lampiran (kode pekerjaan)</i>	_____
2.	Apakah keluarga memiliki sumber mata pencaharian sampingan?	1. <i>Ada</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
3.	Jenis pekerjaan dan sektor dari sumber mata pencaharian sampingan keluarga	<i>Lihat lampiran (kode pekerjaan)</i>	_____
4.	Apakah menerima kiriman uang/barang dari luar anggota keluarga secara teratur?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
5.	Secara umum, bagaimana perkembangan total pendapatan keluarga (dalam rupiah) selama enam bulan terakhir?	1. <i>meningkat</i> 2. <i>sama saja</i> 3. <i>menurun</i>	_____
6.	Apa yang dilakukan keluarga ini untuk menghadapi kenaikan harga-harga bahan pokok akhir-akhir ini?  (Kalau lebih dari satu jawaban, urutkan menurut prioritas: 1 = prioritas pertama; 12 prioritas terakhir)	1. <i>mengurangi kualitas konsumsi makanan</i> 2. <i>mengurangi kuantitas konsumsi makanan</i> 3. <i>mengurangi pengeluaran jasa dan rekreasi</i> 4. <i>mengurangi pengeluaran untuk pakaian</i> 5. <i>mengurangi pengeluaran untuk transportasi</i> 6. <i>mengambil tabungan</i> 7. <i>menjual barang/harta keluarga</i> 8. <i>meminjam dari pihak lain</i> 9. <i>memperbanyak penggunaan produksi sendiri</i> 10. <i>mengeluarkan anak dari sekolah</i> 11. <i>menggadaikan barang</i> 12. <i>lainnya (sebutkan):.....</i> 13. <i>tidak melakukan 1-12</i>	<b>Prioritas:</b> 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____ 13. _____
B. KONSUMSI ANGGOTA KELUARGA			
1.	Berapa kali anggota keluarga makan dalam sehari?	1. <i>sekali</i> 2. <i>dua kali</i> 3. <i>tiga kali atau lebih</i>	_____
2.	Berapa kali anggota keluarga makan <u>daging</u> (sapi/ayam/kambing/kerbau/sejenis)?	1. <i>Lebih sekali dalam seminggu</i> 2. <i>Sekali seminggu</i> 3. <i>Lebih sekali dalam sebulan</i> 4. <i>sekali sebulan</i> 5. <i>Lebih sekali dalam setahun</i> 6. <i>maksimal sekali setahun</i>	_____
3.	Berapa kali anggota keluarga makan <u>telur</u> ?	1. <i>Lebih sekali dalam seminggu</i> 2. <i>Sekali seminggu</i> 3. <i>Lebih sekali dalam sebulan</i> 4. <i>sekali sebulan</i> 5. <i>Lebih sekali dalam setahun</i> 6. <i>maksimal sekali setahun</i>	_____
4.	Berapa kali anggota keluarga makan <u>ikan</u> (selain ikan asin)?	1. <i>Lebih sekali dalam seminggu</i> 2. <i>Sekali seminggu</i> 3. <i>Lebih sekali dalam sebulan</i> 4. <i>sekali sebulan</i> 5. <i>Lebih sekali dalam setahun</i> 6. <i>maksimal sekali setahun</i>	_____

5.	Berapa kali anggota keluarga minum <u>susu</u> ?	1. Lebih sekali dalam seminggu 2. Sekali seminggu 3. Lebih sekali dalam sebulan 4. sekali sebulan 5. Lebih sekali dalam setahun 6. maksimal sekali setahun	—
<b>C. AKSES TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH</b>			
1.	Apakah keluarga pernah menerima program pemerintah berikut sejak 2005? (a) Raskin (b) Jamkesmas/Kartu sehat/JPKM (c) Beasiswa (BKM)/bantuan biaya dari BOS (d) Makanan tambahan/PMT (e) Pinjaman bergulir/bantuan modal (f) BLT 2005 (g) BLT 2008 (h) Plesterisasi (i) Jambanisasi (j) Sumurisasi (k) Pemugaran rumah (l) Pelatihan kerja/keterampilan (m) Lainnya, sebutkan .....	(a) 1. Ya 2. Tidak (b) 1. Ya 2. Tidak (c) 1. Ya 2. Tidak (d) 1. Ya 2. Tidak (e) 1. Ya 2. Tidak (f) 1. Ya 2. Tidak (g) 1. Ya 2. Tidak (h) 1. Ya 2. Tidak (i) 1. Ya 2. Tidak (j) 1. Ya 2. Tidak (k) 1. Ya 2. Tidak (l) 1. Ya 2. Tidak (m) 1. Ya 2. Tidak	(a) _____ (b) _____ (c) _____ (d) _____ (e) _____ (f) _____ (g) _____ (h) _____ (i) _____ (j) _____ (k) _____ (l) _____ (m) _____
<b>III. KESEHATAN KELUARGA</b>			
<b>A. KESEHATAN ANGGOTA KELUARGA</b>			
1.	Apakah dalam sebulan terakhir ada anggota keluarga yang sakit?	1. Ya 2. Tidak	—
2.	Tempat berobat apabila ada anggota keluarga sakit dalam satu tahun terakhir ini: (a) Rumah Sakit Pemerintah (b) Rumah Sakit Swasta (c) Puskesmas/Pustu (d) Klinik (e) Praktik dokter (f) Bidan/perawat/mantri (g) Posyandu/Polindes (h) Pengobatan tradisional/dukun (i) Obat tanpa resep/warung atau toko obat (j) Lainnya, sebutkan:.....	(a) 1. Ya 2. Tidak (b) 1. Ya 2. Tidak (c) 1. Ya 2. Tidak (d) 1. Ya 2. Tidak (e) 1. Ya 2. Tidak (f) 1. Ya 2. Tidak (g) 1. Ya 2. Tidak (h) 1. Ya 2. Tidak (i) 1. Ya 2. Tidak (j) 1. Ya 2. Tidak	(a) _____ (b) _____ (c) _____ (d) _____ (e) _____ (f) _____ (g) _____ (h) _____ (i) _____ (j) _____
3.	Sumber biaya utama untuk berobat ke sarana kesehatan	1. Pribadi 2. Asuransi kesehatan 3. Askeskin/JPKM 4. Diganti kantor/perusahaan 5. Bantuan/pinjaman 6. Lainnya, sebutkan .....	—
4.	a. Jika merupakan Pasangan Usia Subur (PUS), apakah saat ini sedang menggunakan alat kontrasepsi?	1. Ya 2. Tidak	—

	b. Jika ya, jenis alat kontrasepsi yang digunakan	1. <i>Pil</i> 2. <i>AKDR/IUD/spiral</i> 3. <i>Suntik KB</i> 4. <i>Susuk/implant</i> 5. <i>Kondom</i> 6. <i>Tissue KB/Intravag</i> 7. <i>Tubektomi/Steril Wanita</i> 8. <i>Vasektomi/Steril Pria</i> 9. <i>Lainnya, sebutkan .....</i>	_____
5.	Apakah dalam <u>tiga tahun terakhir</u> ada anak balita yang meninggal?	1. Ya      2. Tidak	_____
6.	a. Apakah <u>saat ini</u> memiliki anak usia balita? b. Jika ya, berapa orang?	(a) 1. Ya      2. Tidak (b) ..... orang	a. _____ b. _____

<b>B. KESEHATAN IBU DAN ANAK BALITA</b> <i>(Hanya untuk keluarga yang memiliki anak balita)</i> <b>Jika terdapat lebih dari 1 balita dalam keluarga, pertanyaan bagian ini untuk anak balita terkecil</b>			
1.	Apakah ibu memperoleh perawatan rutin dari tenaga medis/kesehatan pada kehamilan terakhir?	1. <i>Tidak pernah</i> 2. <i>Sekali</i> 3. <i>Dua kali</i> 4. <i>Tiga kali</i> 5. <i>Empat kali atau lebih</i>	_____
2.	Siapa yang membantu persalinan anak balita terakhir?	1. <i>Dokter spesialis kandungan</i> 2. <i>Dokter umum</i> 3. <i>Bidan</i> 4. <i>Mantri Kesehatan</i> 5. <i>Perawat</i> 6. <i>Dukun/tenaga persalinan tradisional</i> 7. <i>Lainnya, sebutkan .....</i>	_____
3.	Imunisasi yang diterima oleh anak balita terakhir: (a) <i>BCG</i> (b) <i>DPT</i> (c) <i>Polio</i> (d) <i>Campak</i> (e) <i>Hepatitis B</i>	(a) 1. Ya      2. Tidak (b) 1. Ya      2. Tidak (c) 1. Ya      2. Tidak (d) 1. Ya      2. Tidak (e) 1. Ya      2. Tidak	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____ e. _____
4.	Darimana imunisasi anak balita terakhir didapatkan (a) <i>Praktik dokter spesialis anak</i> (b) <i>Praktik dokter umum</i> (c) <i>Rumah sakit</i> (d) <i>Puskesmas</i> (e) <i>Posyandu</i> (f) <i>Bidan</i>	(a) 1. Ya      2. Tidak (b) 1. Ya      2. Tidak (c) 1. Ya      2. Tidak (d) 1. Ya      2. Tidak (e) 1. Ya      2. Tidak (f) 1. Ya      2. Tidak	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____ e. _____ f. _____
5.	a. Apakah anak balita pernah dibawa ke Posyandu dalam 6 bulan terakhir? b. Jika Ya, berapa kali? c. Jika ya, apa pelayanan yang diperoleh dalam kunjungan terakhir? (1) <i>Penimbangan</i> (2) <i>Imunisasi</i>	(a) 1. Ya      2. Tidak (b) .....Kali (c) (1) 1. Ya      2. Tidak (2) 1. Ya      2. Tidak	a. _____ b. _____ 1. _____ 2. _____

	(3) PMT/vitamin/oralit (4) Pengobatan (5) Konsultasi	(3) 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i> (4) 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i> (5) 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	3. ____ 4. ____ 5. ____
6.	a. Apakah balita diberi air susu ibu (ASI)? b. Jika ya, (1) Lama pemberian ASI eksklusif (2) ASI + susu formula atau makanan tambahan	(a) 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>  (1) ..... bulan (2) ..... bulan	____  1. ____ 2. ____

**C. KEJADIAN KEMATIAN DALAM KELUARGA**  
(Hanya untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga meninggal sejak 1998)

No	Nama yang meninggal	Tahun meninggal (Isi dengan 4 angka)	Jenis kelamin 1. <i>Lk</i> 2. <i>Pr</i>	Umur saat meninggal		Sebab kematian (kode K7)	Untuk wanita yang meninggal saat berumur 10 th ke atas, apakah kematiannya terjadi pada: 1. Saat hamil 2. Saat persalinan/keguguran 3. Saat nifas 4. Saat lain
				Tahun	Bulan		
<b>K1</b>	<b>K2</b>	<b>K3</b>	<b>K4</b>	<b>K5</b>	<b>K6</b>	<b>K7</b>	<b>K8</b>
1.			___	___ ___	___	___	___
2.			___	___ ___	___	___	___
3.			___	___ ___	___	___	___

**Kode K7 Sebab kematian:** 1. Kecelakaan lalu lintas (*lalin*)  
2. Kecelakaan bukan *lalin*  
3. Bukan kecelakaan

**D. KONDISI LINGKUNGAN**

1.	Lokasi rumah/bangunan tempat tinggal:	1. <i>Perkampungan</i> 2. <i>Kompleks Perumahan</i> 3. <i>Lainnya.....</i>	___
2.	a. Apakah rumah terletak di tepian/pinggiran sungai?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	___
	b. Apakah rumah terletak di tepian/pinggiran laut?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	___
	c. Apakah rumah berlokasi di wilayah rawan banjir?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	___
	d. Apakah rumah berlokasi di wilayah rawan longsor?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	___
	e. Apakah rumah berlokasi di wilayah rawan rob?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	___
	f. Apakah rumah berlokasi di wilayah rawan bencana lainnya (sebutkan: .....)?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	___
3.	a. Rumah terletak di tepi:	1. <i>Jalan raya</i> 2. <i>Jalan lingkungan</i> 3. <i>Gang/lorong</i> 4. <i>Lainnya, .....</i>	___
	b. Lebar jalan/gang/lorong	b. .... meter	___

	c. Jenis permukaan jalan/gang/lorong:	1. <i>Aspal</i> 2. <i>Semen/conblok/cor</i> 3. <i>Kerikil/batu diperkeras</i> 4. <i>Tanah/pasir</i> 5. <i>Lainnya, .....</i>	_____
	d. Jika rumah tidak di pinggir jalan raya, berapa jarak (1) ke jalan raya yang dilalui kendaraan umum (2) ke jalan raya yang tidak dilalui kendaraan umum	d. (1) .....meter (2) ..... meter	_____ _____
4.	Sarana pembuangan air limbah/mandi/dapur/cuci	1. <i>Saluran tertutup</i> 2. <i>Saluran terbuka</i> 3. <i>Tanpa saluran</i>	_____
5.	Keadaan air got/selokan di sekitar rumah	1. <i>Lancar</i> 2. <i>Tergenang</i> 3. <i>Mengalir lambat</i> 4. <i>Tidak ada got</i>	_____
6.	Cara pembuangan sampah	1. <i>Diangkut petugas pemda</i> 2. <i>Diangkut petugas yg dibayar warga sendiri</i> 3. <i>Dibuang sendiri ke TPA</i> 4. <i>Ditimbun</i> 5. <i>Dibuat kompos</i> 6. <i>Dibakar</i> 7. <i>Dibuang ke selokan/sungai</i> 8. <i>Dibuang sembarangan</i> 9. <i>Lainnya, .....</i>	_____
<b>IV. EKONOMI</b>			
<b>A. KONDISI PERUMAHAN DAN FASILITASNYA</b>			
1.	Status kepemilikan rumah tinggal	1. <i>Milik sendiri</i> 2. <i>Warisan yang belum dibagi</i> 3. <i>Sewa/kontrak</i> 4. <i>Rumah Dinas</i> 5. <i>Pinjam/milik keluarga</i> 6. <i>Menumpang keluarga lain</i>	_____
2.	a. Apakah ada keluarga lain tinggal di rumah?	a. 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
	b. Jika ya, berapa jumlah keluarga yang tinggal di rumah ini (termasuk keluarga responden)?	b. .... keluarga	_____
	c. Berapa jumlah orang yang tinggal di rumah ini (termasuk keluarga responden)?	c. ....orang	_____
3.	Luas tanah dan bangunan rumah:	a. .... m <sup>2</sup>	_____
	a. Luas bangunan b. Luas tanah	b. .... m <sup>2</sup>	_____
4.	a. Jumlah ruangan rumah	a. .... ruangan	_____

	b. Jenis dan jumlah ruang menurut fungsinya	<b>b. Jumlah (isi 0 bila tidak ada)</b>	
	(1) Ruang tidur	(1) ..... ruang	1. ____
	(2) Ruang keluarga	(2) ..... ruang	2. ____
	(3) Ruang tamu	(3) ..... ruang	3. ____
	(4) Ruang makan	(4) ..... ruang	4. ____
	(5) Ruang dapur	(5) ..... ruang	5. ____
	(6) Kamar mandi/WC	(6) ..... ruang	6. ____
	(7) Lainnya .....	(7)..... ruang	7. ____
5.	Jenis lantai rumah <u>terluas</u>	1. Marmor/keramik/teraso 2. Ubin/tegel 3. Plester/semen 4. Kayu 5. Bambu 6. Tanah 7. Lainnya, sebutkan .....	____
6.	Jenis atap rumah <u>terluas</u>	1. Beton/dak 2. Genteng 3. Sirap 4. Asbes 5. Seng 6. Lainnya, sebutkan .....	____
7.	Jenis dinding rumah <u>terluas</u>	1. Tembok 2. Kayu 3. Bambu 4. Lainnya, sebutkan .....	____
8.	Fasilitas Kamar Mandi (KM) rumah	1. KM Sendiri 2. KM Umum 3. Sungai/mata air 4. Lainnya, sebutkan .....	____
9.	Fasilitas WC rumah	1. WC Sendiri 2. WC Umum 3. Sungai 4. Lainnya, sebutkan .....	____
10.	a. Sumber utama air minum	1. Air minum dalam kemasan 2. Air minum isi ulang 3. Air PDAM/ledeng 4. Sumur terlindung/bor 5. Sumur tak terlindung 6. Air sungai/air hujan 7. Lainnya, sebutkan .....	____
	b. Jika jawaban no. 11a = 4 (sumur terlindung) atau 5 (sumur tak terlindung), alat yang digunakan untuk mengambil air adalah	1. Pompa listrik 2. Pompa tangan 3. Timba ember	____
	c. Jika jawaban no. 11 a bukan 1 dan 2, apakah air minum dimasak terlebih dahulu?	1. Ya      2. Tidak	____
11.	a. Sumber penerangan utama	1. Listrik PLN 2. Listrik non-PLN (genset) 3. Petromaks 4. Lampu tempel/pelita 5. Lainnya, sebutkan .....	____

	b. Jika sumber listrik PLN (1), jenis sambungan yang terpasang	1. <i>Pasang sendiri</i> 2. <i>Menyalur dari rumah lain lanjut ke pertanyaan no. 12</i>	—
	c. Jika listrik PLN pasang sendiri (1), berapa daya yang tersambung?	1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1.300 Watt 4. 2.200 Watt 5. > 2.200 Watt, sebutkan .....	—
12.	Apakah rumah ini memiliki sambungan telepon rumah (bukan telepon seluler)?	1. Ya      2. Tidak	—
13.	Jenis bahan bakar utama untuk memasak	1. Listrik 2. Gas/LPG 3. Minyak tanah 4. Kayu bakar 5. Arang/batu bara 6. Lainnya, sebutkan .....	—

#### B. KEPEMILIKAN BARANG BERHARGA

1.	Kepemilikan barang berharga	Jenis	Jumlah
	a. Luas Lahan	(1) Lahan kebun (2) Lahan sawah (3) Lahan pekarangan (4) Tambak/kolam/empang	(1) ___ m <sup>2</sup> (2) ___ m <sup>2</sup> (3) ___ m <sup>2</sup> (4) ___ m <sup>2</sup>
	b. Rumah (jumlah seluruhnya, termasuk yang tidak sedang ditinggali)		___ unit
	c. Peralatan elektronik/rumah tangga (Unit)	(1) Radio (2) Tape recorder (3) Radio/tape (4) Radio/tape/audio player (5) Televisi hitam putih (6) Televisi berwarna a. ≤ 14 inch b. 17 inch c. 21 inch d. ≥ 29 inch (7) Video/VCD/DVD Player (8) HP/Telepon genggam (9) Kulkas (10) AC (11) Kipas angin (12) Komputer/laptop (13) TV berlangganan (14) Antena parabola (15) Kompor gas (16) Microwave (17) Rice Cooker/Magic Jar (18) Dispenser air	(1) ___ (2) ___ (3) ___ (4) ___ (5) ___ (6) ___ a. ___ b. ___ c. ___ d. ___ (7) ___ (8) ___ (9) ___ (10) ___ (11) ___ (12) ___ (13) ___ (14) ___ (15) ___ (16) ___ (17) ___ (18) ___

	d. Umumnya peralatan elektronik/rumah tangga diperoleh melalui	(1) <i>Beli tunai</i> (2) <i>Beli kredit</i> (3) <i>Hadiah/pemberian</i>	_____
	e. Kendaraan (unit)	(1) <i>Sepeda</i> (2) <i>Sepeda motor</i> (3) <i>Mobil</i> (4) <i>Perahu/sampan</i> (5) <i>Perahu motor</i> (6) <i>Delman/Dokar</i> (7) <i>Becak</i>	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____ (6) _____ (7) _____
	f. Ternak (ekor)	(1) <i>Ternak sapi/kerbau/kuda</i> (2) <i>Ternak kambing/domba/babi</i> (3) <i>Ternak unggas (ayam/bebek/itik/angsa)</i> (4) <i>Lainnya, sebutkan .....</i>	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____
<b>C. PAKAIAN, PINJAMAN, DAN TABUNGAN</b>			
1.	Apakah selama setahun terakhir ini anggota keluarga pernah membeli pakaian baru?	1. <i>Ya, semua</i> 2. <i>Ya, sebagian</i> 3. <i>Tidak</i>	_____
2.	Apakah anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk setiap aktivitas (sekolah, bekerja, di rumah, pesta, dll.)?	1. <i>Ya, semua</i> 2. <i>Ya, sebagian</i> 3. <i>Tidak</i>	_____
3.	a. Apakah selama <u>3 tahun terakhir</u> ada anggota keluarga yang pernah mengambil kredit (uang/barang) ke lembaga keuangan formal (bank/BPR/koperasi/LKM)?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
	b. Apakah <u>saat ini</u> ada anggota keluarga yang memiliki pinjaman ke lembaga/perorangan?	1. <i>Ada</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
	c. Jika jawaban (b)= <i>ada</i> , kepada siapa meminjamnya? (1) Bank formal (2) Bank keliling (3) Koperasi (4) Pegadaian (5) Perorangan (6) Lainnya: .....	<i>Isi sesuai peringkat:</i> <i>1- paling banyak, 5-paling sedikit</i> c. (1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) ..... (6) .....	c.1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____
4.	Apakah dalam <u>setahun terakhir</u> pernah menjual aset (TV, ternak, motor, tanah dll.) untuk membayar utang atau keperluan mendadak lainnya?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
5.	Apakah memiliki tabungan di lembaga keuangan formal (bank/BPR/koperasi/LKM)?	1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	_____
<b>D. USAHA KELUARGA</b>			
1.	Apakah memiliki usaha industri rumah tangga (jumlah tenaga kerja 1–4 orang) berikut: a. Batik/tenun ATBM b. Konveksi c. Kerajinan d. Peralatan rumah tangga	a. 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i> b. 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i> c. 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i> d. 1. <i>Ya</i> 2. <i>Tidak</i>	_____ _____ _____ _____

	e. Makanan & minuman	<i>e. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	f. Lainnya, sebutkan .....	<i>f. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
2.	Apakah memiliki usaha industri kecil (jumlah tenaga kerja 5–19 orang) berikut:	<i>a. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	a. Batik/tenun ATBM	<i>b. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	b. Konveksi	<i>c. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	c. Kerajinan	<i>d. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	d. Peralatan rumah tangga	<i>e. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	e. Makanan & minuman	<i>f. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	f. Lainnya, sebutkan .....			_____

3.	Apakah memiliki usaha industri menengah/besar (jumlah tenaga kerja $\geq 20$ orang) berikut:	<i>a. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	a. Batik/tenun ATBM	<i>b. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	b. Konveksi	<i>c. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	c. Kerajinan	<i>d. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	d. Peralatan rumah tangga	<i>e. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	e. Makanan & minuman	<i>f. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	f. Lainnya, sebutkan .....			_____
4.	Apakah memiliki usaha jasa berikut:	<i>a. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	a. Salon kecantikan	<i>b. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	b. Bengkel	<i>c. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	c. Persewaan/rental VCD/DVD	<i>d. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	d. Persewaan komputer/play station	<i>e. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	e. Persewaan peralatan pesta	<i>f. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	f. Penjahit	<i>g. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	g. Tempat hiburan (karaoke, bilyar, bioskop, dll.)	<i>h. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	h. Kursus-kursus keterampilan	<i>i. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	i. Panti pijat	<i>j. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	j. Hotel/Tempat penginapan	<i>k. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	k. Persewaan rumah/kamar	<i>l. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	l. katering	<i>m. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	m. Lainnya, sebutkan .....			_____
5.	Apakah memiliki usaha perdagangan berikut:	<i>a. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	a. Warung/kios	<i>b. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	b. Toko	<i>c. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	c. Minimarket	<i>d. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	d. Supermarket	<i>e. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	e. Rumah makan/warung makan/restoran	<i>f. 1. Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	f. Lainnya, sebutkan .....			_____

#### V. PARTISIPASI PEMBANGUNAN

1.	Apakah ada anggota keluarga yang menjadi pengurus atau aktif dalam:			_____
	a. RT/RW	<i>(a) Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	b. PKK	<i>(b) Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____
	c. Kader (posyandu/pembangunan/kesehatan/KB)	<i>(c) Ya</i>	2. <i>Tidak</i>	_____

	d. Karang taruna	(d) Ya      2. Tidak	_____
	e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	(e) Ya      2. Tidak	_____
	f. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	(f) Ya      2. Tidak	_____
	g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	(g) Ya      2. Tidak	_____
	h. Ormas (contoh: Muhammadiyah, NU, Al Irsyad)	(h) Ya      2. Tidak	_____
2	Apakah anggota keluarga pernah mengikuti rapat/temu warga di RT/RW selama 2008?	1. sering 2. pernah 3. tidak pernah	_____

**VI. KEAMANAN**

1.	Apakah ada anggota keluarga yang menjadi korban kejahatan pada 2008?	1. Ya      2. Tidak	_____
2.	Jika ya, apa jenis kejahatannya?		
	(a) Pencurian	(a) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(b) Pencopetan	(b) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(c) perampokan	(c) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(d) Perusakan	(d) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(e) Perkosaan	(e) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(f) Penganiayaan/kekerasan	(f) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(g) Penyalahgunaan narkoba	(g) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(h) Pembunuhan	(h) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(i) Lainnya, sebutkan .....	(i) 1. Ya      2. Tidak	_____
3.	Jika mengalami kejahatan tersebut, di mana tempat kejadiannya?		
	a. Di dalam kelurahan	(a) 1. Ya      2. Tidak	_____
	b. Di dalam Kota Pekalongan	(b) 1. Ya      2. Tidak	_____
	c. Di luar Kota Pekalongan	(c) 1. Ya      2. Tidak	_____

**VII. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

1.	Apakah ada anggota keluarga yang mengakses informasi mengenai perkembangan situasi melalui:		
	(a) Surat kabar	(a) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(b) Majalah/tabloid	(b) 1. Ya      2. Tidak	_____
2.	Surat kabar/majalah diperoleh melalui		
	(a) Langganan	(a) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(b) Beli eceran	(b) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(c) Papan informasi	(c) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(d) Baca di kantor	(d) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(e) Lainnya.....	(e) 1. Ya      2. Tidak	_____
3.	Apakah anggota keluarga dapat menggunakan/mengoperasikan komputer	1. Ya, ....orang      2. Tidak	_____
4.	Apakah anggota keluarga pernah mengakses informasi melalui internet. Jika ya, dari:	1. Ya      2. Tidak	
	(a) Warnet	(a) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(b) Berlangganan di rumah	(b) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(c) Di kantor	(c) 1. Ya      2. Tidak	_____
	(d) Lainnya.....	(d) 1. Ya      2. Tidak	_____

5.	Dari mana anggota keluarga mengakses informasi yang berkaitan dengan program pembangunan pemerintah Kota Pekalongan :		
	(a) Pengurus RT/RW/Kelurahan	(a) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(b) Papan informasi RT/RW/Kelurahan	(b) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(c) PNS	(c) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(d) LSM/Ormas	(d) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(e) Tokoh masyarakat/agama	(e) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(f) Media cetak (surat kabar, buletin, dll.)	(f) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(g) Media elektronik ( <i>website</i> , radio, dll.)	(g) 1. Ya 2. Tidak	_____
	(h) Lainnya, sebutkan .....	(h) 1. Ya 2. Tidak	_____

## CATATAN:

### Definisi Keluarga

Unit dalam pendataan sosial ekonomi ini adalah keluarga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. **KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.**

Jadi, memiliki Kartu Keluarga → satu keluarga

Beberapa kasus:

- Sudah menikah → keluarga sendiri (satu KK tersendiri)
- Ibu hamil dan anak di luar nikah → dianggap keluarga sendiri, status anak dianggap anak ibu.
- Menikah siri punya anak → kepala keluarga tetap suami karena satu istri.
- Tapi jika menikah siri, istri kedua, kepala keluarga yaitu suami hanya dicatatkan pada kartu keluarga istri pertama. Kepala keluarga pada KK istri kedua adalah istri kedua.
- Keluarga X tinggal di Kelurahan A, tapi administrasi di Kelurahan B → maka Keluarga X didata berdasarkan dokumen administrasi kependudukan → kalau tidak memungkinkan untuk didata, tidak usah.
- Data SPKOM akan di *crosscheck* dengan data capil
- Kasus janda yang memiliki anak yang sudah menikah. Seandainya si janda masih memiliki KK sendiri → didata terpisah. Tetapi jika si janda sudah tidak memiliki KK dan kemudian ikut anaknya → didata 1 keluarga. Yang dilihat pertama adalah kepemilikan Kartu Keluarga.

### Definisi industri rumah tangga, kecil, menengah, dan besar:

- Usaha atau industri rumah tangga adalah usaha atau industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 1–4 orang.
- Usaha atau industri kecil adalah usaha atau industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 5–19 orang
- Usaha atau industri menengah adalah usaha atau industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 20–99 orang.
- Usaha atau industri besar adalah usaha atau industri yang memiliki jumlah tenaga kerja ≥ 100 orang.

## **The SMERU Research Institute**

Telephone : +62 21 3193 6336  
Fax : +62 21 3193 0850  
E-mail : [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)  
Website : [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)  
Facebook : The SMERU Research Institute  
Twitter : @SMERUInstitute  
YouTube : SMERU Research Institute